PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 (BAGIAN 1)



BIDANG STATISTIK SEKTORAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG

SATU DATA INDONESIA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
opendata.tangerangkab.go.id

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

Tangerang Gemilang

KABUPATEN TANGERANG SMART CITY

RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 (BAGIAN 1)



BIDANG STATISTIK SEKTORAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG

SATU DATA INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

opendata.tangerangkab.go.id

RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Ukuran Buku : 21 cm x 29.7 cm

Jumlah Halaman : ix + 441 halaman

Tim Penyusun

Pengarah:

Diyan Mayang Sari, S.STP. M.Si

Penanggung Jawab:

Dra. Budi Lestari, M.Si

Penyunting:

Engkos Kosasih, S.E

Hera Faizal Rachmat, S.Si, M.Si

Design dan Kompilator:

Lismayani Usman, S.Si

Mellisa Edrianingtyas, S.Kom

Swastessa Damayanti, S.Stat

Windyana Pusparani, S.Stat

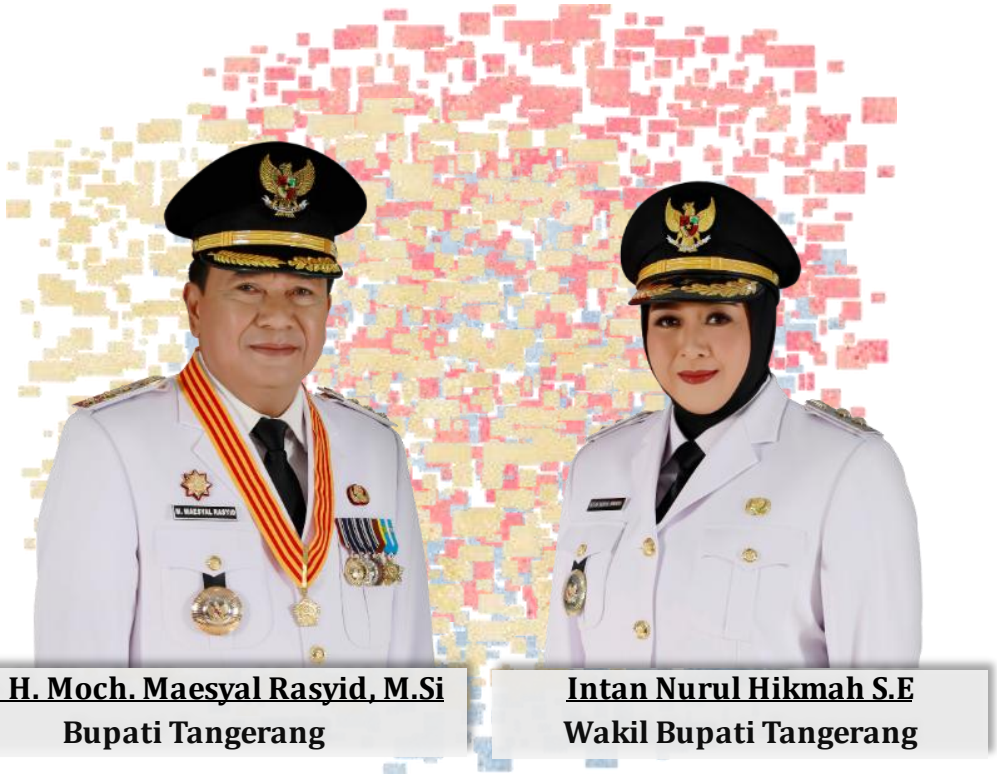
Fardilla Rahmawati, S.Stat

Nana Oktaviana, S.Stat

Diterbitkan oleh:
©Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2025

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang!

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG



Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si
Bupati Tangerang

Intan Nurul Hikmah S.E
Wakil Bupati Tangerang

SAMBUTAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANGERANG

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami menyambut dengan senang hati peluncuran Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Buku ini dibuat sebagai walidata tingkat daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Buku ini berisi informasi tambahan terkait data yang dikumpulkan melalui kegiatan statistik dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengamanatkan walidata untuk memberikan data dan metadatanya kepada publik.

Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca mengenai data, sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat lebih tepat. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, karena kesalahan dalam data dapat berujung pada kesimpulan atau kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, buku ini memiliki urgensi yang besar untuk memberikan manfaat, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, sehingga Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini masih memiliki kekurangan. Pembaruan informasi dalam buku ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami sangat menghargai setiap masukan berupa saran dan kritik yang konstruktif dari para sahabat data demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keberkahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tercurah dalam segala linimasa kehidupan kita. *Aamiin.*

Tangerang, September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tangerang

Diyan Mayang Sari, S.STP. M.Si

NIP. 19770902 199602 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku *Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2025* dapat diselesaikan dengan lancar. Salah satu prinsip ualitas suatu data adalah keberadaan metadata. Metadata Statistik ialah informasi yang menjelaskan data statistik dan disusun dalam format baku yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik selaku Pembina data.

Penyusunan buku metadata ini terbagi menjadi 4 bagian utama yakni Metadata Statistik Kegiatan (MS-KEG), Metadata Statistik Variabel (MS-VAR), Metadata Statistik Indikator (MS-IND) dan Standar Data. MS-KEG, MS-VAR, MS-IND dan Standar Data yang disusun dalam Buku ini merupakan informasi mengenai data dari kegiatan statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Kami berharap Buku Metadata ini dapat membawa kebermanfaatan bagi Sahabat Data sekalian melalui kemudahan menemukan dan pengelolaan data serta pencegahan intrepretasi yang keliru dari data yang tersedia.

Kami menyadari Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini tak dapat tersusun tanpa kerja sama dari *stakeholder* yang ada yakni Perangkat Daerah selaku produsen data dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang selaku Pembina data tingkat daerah Kabupaten Tangerang. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga kerja sama dan sinergi yang terjalin dapat semakin kuat ke depannya. Kami juga menyadari bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas terhadap isi metadata yang disajikan. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik dari para pengguna data sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam Satu Data!

Tangerang, September 2025
Kepala Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tangerang

Dra. Budi Lestari, M.Si.
NIP. 19690921 199203 2 007

DAFTAR ISI

COVER.....i

SAMBUTAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....viii

METADATA STATISTIK KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK DPRD KABUPATEN TANGERANG 1

MS-KEG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG 16

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG 19

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 33

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG 41

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG 51

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG 64

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG 82

MS-KEG SURVEI TINGKAT KESALEHAN SOSIAL KABUPATEN TANGERANG.....87

MS-KEG SURVEI TINGKAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TANGERANG 131

MS-KEG SURVEI PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN TANGERANG 178

MS-KEG SURVEI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG.....184

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....189

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KEBENCANAAN DAERAH 198

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG 219

MS-KEG PENDATAAN LENGKAP RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG 338

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK TATA RUANG DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TANGERANG 353
MS-KEG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) 363
MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN 385
MS-KEG PENDATAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG 411
MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PENDIDIKAN 421



MS-KEG KOMPILASI STATISTIK DPRD KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik DPRD Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Komplek Perkantoran Pemda Tigaraksa Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa, Tangerang Banten, 15720
Email	:	dprd.kabtng@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Pejabat Pengelola Data Sektoral
Alamat	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. Kh. Sarbini No.2 Lt.1 Tigaraksa
Email	:	dprd.kabtng@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Pemutakhiran data anggota DPRD dan program-program kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data kondisi jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin dan partai politiknya, komisinya dan mengetahui data persidangan serta kegiatan yang telah diselenggarakan DPRD. Data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan kursi dprd yang diduduki menurut partai politik dan seluruh perkembangan keadaannya. Anggota DPRD dapat berubah dengan kondisi sesuai pengganti antar waktu, sebagai contoh karena pindah partai politik atau berhalangan karena sakit atau meninggal.
Tujuan Kegiatan	:	Memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Di Kabupaten Tangerang, serta dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
2. Desain 05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
3. Pengumpulan Data 01 April 2025 s.d. 30 Juni 2025
4. Pengolahan Data 01 Juli 2025 s.d. 30 September 2025
5. Analisis 01 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025
6. Diseminasi Hasil 01 November 2025 s.d. 30 November 2025
7. Evaluasi 01 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Nama Ketua DPRD Menurut Periode
- Nama Wakil Ketua DPRD Menurut Periode
- Nama Anggota DPRD Menurut Fraksi
- Nama Anggota DPRD Menurut Komisi
- Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin
- Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Pendidikan
- Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi dan Jenis Kelamin
- Jumlah Sidang Pleno/Paripurna DPRD Menurut Bulan dan Jenis Sidang
- Jumlah Produk Hukum DPRD
- Jumlah Produk Hukum Daerah
- Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang menurut Kepanitiaan
- Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Menurut Kelompok Umur

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data : *Longitudinal Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Sebagian Wilayah Indonesia

Wilayah Kegiatan

Nama Provinsi : Banten

Kabupaten/Kota : Tangerang

Metode Pengumpulan Data : Pengumpulan Data Sekunder

Sarana Pengumpulan Data	:	*Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*
Unit Pengumpulan Data	:	Individu

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Tidak
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Desember 2025

Digital	:	31 Desember 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK DPRD KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Nama Ketua DPRD Menurut Periode
Alias	:	Tabel 3.1.2 kol (1)
Konsep	:	DPRD, Partai politik
Definisi	:	Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota
Referensi Pemilihan	:	UU no 17 tahun 2014 UU no. 23 tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (Golkar dan PDIP)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Wakil Ketua DPRD Menurut Periode
Alias	:	Tabel 3.1.2 kol (1)
Konsep	:	DPRD, Partai politik
Definisi	:	Wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP, Gerindra, dan PKB)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Anggota DPRD Menurut Fraksi
Alias	:	Tabel 3.1.3 kol (2)
Konsep	:	DPRD, Fraksi DPRD, Partai politik
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Fraksi (Golkar + PPP, PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, Nasdem)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Nama Anggota DPRD Menurut Komisi
Alias	:	Tabel 3.1.4 kol (2)
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Partai politik
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III, IV)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.1.5 kol (4)
Konsep	:	DPRD, Partai Politik, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut partai dan Jenis Kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Pendidikan
Alias	:	Tabel 3.1.6 kol (2) – (5)
Konsep	:	DPRD, Partai politik, Jenjang pendidikan
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai dan jenjang pendidikan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

		Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Partai dan Pendidikan Formal. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi dan Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.1.7 kol (4)
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Komisi dan Jenis Kelamin. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III,IV)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Sidang Pleno/Paripurna DPRD Menurut Bulan dan Kategori Sidang
Alias	:	Tabel 3.1.8
Konsep	:	Sidang Paripurna
Definisi	:	Jumlah Rapat lengkap anggota dan pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang dilaksanakan setiap bulan. Kategori sidang yaitu Istimewa, Biasa dan Internal
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.1.9 kol (4)
Konsep	:	Produk Hukum DPRD, Jenis Produk Hukum
Definisi	:	Setiap keputusan ketetapan peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban. Produk hukum yang dimaksud terdiri dari Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum (Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan DPRD, Peraturan Daerah)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum Daerah DPRD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.1.10 kol (2) – (3)
Konsep	:	Produk Hukum Daerah, Raperda
Definisi	:	Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau namalainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Jenis Produk Hukum Daerah yang dikatagorikan menurut kategori Raperda, yaitu raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum daerah (Raperda Eksekutif, Raperda Inisiatif, Raperda Daftar Kumulatif Terbuka)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kepanitiaan
Alias	:	Tabel 3.1.11 kol (2) – (5)
Konsep	:	Anggota DPRD, Kepanitiaan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Alat Kelengkapan Daerah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah

c. Komisi;

d. Badan Legislasi Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis kepanitiaan (Badan musyawarah, Badan Anggaran)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Usia
Alias	:	Tabel 3.1.12 kol (2) – (5)
Konsep	:	DPRD, Usia/Umur
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yangdikategorikan menurut kelompok umur
Referensi Pemilihan	:	Tatib DPRD No 1 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK DPRD KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Konsep	:	DPRD, Partai politik
Definisi	:	Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP, Gerindra, Golkar, PKB)
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama anggota DPRD menurut Fraksi
Konsep	:	DPRD, Fraksi DPRD, Partai politik
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Fraksi
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama anggota DPRD menurut Komisi
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Partai politik
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III, IV)
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin
Konsep	:	DPRD, Partai Politik, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut partai dan Jenis Kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN) Klasifikasi berdasarkan Jenis kelamin (Laki-Laki, Perempuan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenjang Pendidikan
Konsep	:	DPRD, Partai politik, Jenjang pendidikan
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai dan jenjang pendidikan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Partaidan Pendidikan Formal.

		Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN) Klasifikasi berdasarkan Jenjang pendidikan (SLTA, DIII, DIV/S1, S2/S3)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi dan Jenis Kelamin
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Komisi danJenis Kelamin. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III,IV) Klasifikasi berdasarkan Jenis kelamin (Laki-Laki, Perempuan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Sidang Pleno/Paripurna menurut kategori sidang dan Bulan

Konsep	:	Sidang
Definisi	:	Jumlah Rapat lengkap anggota dan pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang dilaksanakan setiap bulan. Kategori sidang yaitu Istimewa, Biasa dan Internal
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) Klasifikasi berdasarkan kategori sidang (Biasa, Internal, Istimewa)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Sidang

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Dokumen Hukum
Definisi	:	setiap keputusan ketetapan peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban. Produk hukum yang dimaksud terdiri dari Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum (Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan DPRD, Peraturan Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum Daerah DPRD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Dokumen Hukum
Definisi	:	Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau namalainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD danberbentuk keputusan meliputi keputusan kepaladaerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinanDPRD dan keputusan badan

		kehormatan DPRD. Jenis Produk Hukum Daerah yang dikatagorikanmenurut kategori Raperda, yaitu raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum daerah (Raperda Eksekutif, Raperda Inisiatif, Raperda Daftar Kumulatif Terbuka)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kepanitiaan
Konsep	:	DPRD
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Alat Kelengkapan Daerah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis kepanitiaan (Badan musyawarah, Badan Anggaran)
Ukuran	:	Jumlah

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Usia
Konsep	:	DPRD, Usia/Umur
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur adalah anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yangdikategorikan menurut kelompok umur

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN) Klasifikasi berdasarkan kelompok usia (21-35, 36-49, 50-59, 60+)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

MS-KEG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Survei
Sektor Kegiatan	:	Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	V.22.36.03.001
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	:	setda@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Analis Kebijakan Muda
Alamat	:	Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	:	setda@tangerangkab.go.id
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Merupakan kegiatan pada Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk mengumpulkan Data Pelayanan Publik. Informasi yang dihimpun meliputi data Kepuasan terhadap Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Tangerang. Data tersebut akan dijadikan materi Publikasi serta Data Evaluasi terutama dalam rangka Optimalisasi pada Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Tangerang

Tujuan Kegiatan	:	Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Jadwal Kegiatan	:	
1. Perencanaan Kegiatan		02 Januari 2025 s.d. 21 Januari 2025
2. Desain		02 Januari 2025 s.d. 21 Januari 2025
3. Pengumpulan Data		21Januari 2025 s.d. 30 November 2025
4. Pengolahan Data		01 Desember 2025 s.d. 17 Desember 2025
5. Analisis		18 Desember 2025 s.d. 22 Desember 2025
6. Diseminasi Hasil		23 November 2025 s.d. 24 November 2025
7. Evaluasi		24 Desember 2025 s.d. 30 Desember 2025
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Semesteran
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longiudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang
Wilayah Kegiatan	:	Provinsi Banten
Nama Provinsi	:	Kabupaten Tangerang
Kabupaten/Kota		
Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi Kuisioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Web SiKEPO

DESAIN SAMPEL

Jenis Rancangan Sampel	:	Single stage atau Phase
Metode Pemilihan Sampel	:	Metode Nonprobabilitas
Jenis Metode Sampel	:	Accidental Sampling

Fraksi Sampel Keseluruhan	:	Masyarakat Pengguna Layanan Publik
Unit Sampel	:	Organisasi Perangkat Daerah
Unit Observasi	:	Organisasi Perangkat Daerah

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: SMA/SMK
Jumlah Petugas	:
Supervisor/Penyelia/Pengawas	5 Orang
Pengumpul Data/Enumerator	63 Orang
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: SMA/SMK
Jumlah Petugas	:
Supervisor/Penyelia/Pengawas	5 Orang
Pengumpul Data/Enumerator	63 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data	
Penyuntingan	: Ya
Penyandian	: Ya
Data Entry	: Ya
Validasi	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak

Waktu ketersediaan Produk

Tercetak	: 23 Desember 2025
Digital	: 31 Desember 2025
Data Mikro	: -

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Kompilasi Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	: Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	: setda@tangerangkab.go.id

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	: Analis Kebijakan Muda
Alamat	: Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	: setda@tangerangkab.go.id

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai aspek pemerintahan di

wilayahnya, termasuk pengelolaan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Data sektoral ini mencakup informasi penting seperti jumlah desa dan kelurahan, serta hasil survei kepuasan masyarakat yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Tujuan Kegiatan : Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan di setiap unit pelayanan di Kabupaten Tangerang. Mengumpulkan dan mengelola data sektoral seperti jumlah desa dan kelurahan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
2. Desain 05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
3. Pengumpulan Data 01 April 2025 s.d. 30 Juni 2025
4. Pengolahan Data 01 Juli 2025 s.d. 30 September 2025
5. Analisis 01 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025
6. Diseminasi Hasil 01 November 2025 s.d. 30 November 2025
7. Evaluasi 01 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Nama kepala daerah Kabupaten Tangerang
- Nama organisasi Perangkat Daerah Kab. Tangerang
- Batas wilayah administrasi Kab. Tangerang Menurut Kecamatan
- Jumlah Peraturan Daerah
- Jumlah Peraturan Bupati
- Jumlah Tempat Ibadah
- Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)
- Indeks Reformasi Birokrasi
- Jumlah dokumen kerjasama daerah, jumlah capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan jumlah

dokumen tata laksana dan kelembagaan di pemerintah daerah

- Jumlah kelurahan, RT, RW Menurut Kecamatan
- Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Pelayanan Publik

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Semesteran
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	*Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*
Unit Pengumpulan Data	:	Sekretariat Daerah Kab. Tangerang

PENGUMPULAN DATA		
Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Tidak
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Desember 2025
Digital	:	31 Desember 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.2 kol (2)
Konsep	:	Bupati
Definisi	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	SK Mendagri No 131.36-5897 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tangerang Provinsi Banten, dan No 132.36-5898 Tahun 2018
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Masa Jabatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.3 kol (2)
Konsep	:	Perangkat Daerah
Definisi	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah yang terdaftar
Referensi Pemilihan	:	SK Mendagri No 131.36-5897 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tangerang Provinsi Banten, dan No 132.36-5898 Tahun 2018
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.2.4 kol (2) – (5)
Konsep	:	Wilayah
Definisi	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler Dan Mekar Baru Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.5 kol (2)
Konsep	:	Peraturan Daerah
Definisi	:	Jumlah Peraturan Daerah yang terselesaikan
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.6 kol (2)
Konsep	:	Peraturan Bupati
Definisi	:	Jumlah Peraturan Bupati yang terselesaikan
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lembaga Keagamaan Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.7 kol (2) – (14)
Konsep	:	Lembaga keagamaan
Definisi	:	
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nilai Akuntabillitas Pemerintah (AKIP)
Alias	:	Tabel 3.2.8 kol (2) – (5)
Konsep	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Definisi	:	Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kriteria (BB)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Alias	:	Tabel 3.2.9 kol (2) – (5)
Konsep	:	Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Definisi	:	Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kriteria (B, BB)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokumen kerjasama daerah, jumlah capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan jumlah dokumen tata laksana dan kelembagaan di pemerintah daerah
Alias	:	Tabel 3.2.10 kol (3)
Konsep	:	Dokumen kerjasama
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kategori (Dokumen kerjasama daeragm capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, Dokumen tatalaksana dan kelembagaan)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka

Nama Variabel	:	Jumlah Kelurahan
Alias	:	Tabel 3.2.11 kol (2)
Konsep	:	Kelurahan
Definisi	:	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah RT
Alias	:	Tabel 3.2.11 kol (3)
Konsep	:	Rukun Tetangga
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah RW
Alias	:	Tabel 3.2.11 kol (4)
Konsep	:	Rukun Warga
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Pelayanan. Publik
Alias	:	Tabel 3.2.12 kol (3)
Konsep	:	Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang mencakup berbagai dimensi sebagai berikut a) persyaratan; b) sistem, mekanisme, dan prosedur; c) waktu penyelesaian; d)biaya/tarif; e) produk spesifikasi jenis pelayanan; f) kompetensi pelaksana; g)perilaku pelaksana; h) sarana dan prasarana dan; i) penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Kategori penilaian kepuasan (A, B, C)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Bupati
Definisi	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Perangkat Daerah
Definisi	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah yang terdaftar
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Konsep	:	Wilayah
Definisi	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan batas wilayah (Timur, Barat, Utara, Selatan)

Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Peraturan Daerah
Definisi	:	Jumlah Peraturan Daerah yang terselesaikan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Peraturan Bupati
Definisi	:	Jumlah Peraturan Bupati yang terselesaikan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Lembaga Keagamaan Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Lembaga Keagamaan
Definisi	:	
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Lembaga Keagamaan (Masjid, Musholla, Ponpes, majelis taklim, TPQ/TPA/Pura, Gereja Protestan, Gereja Katolik, Vihara, Klenteng/Litang)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Nilai Akuntabillitas Pemerintah (AKIP)
Konsep	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Definisi	:	Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Target, Realisasi, Kriteria
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Konsep	:	Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Definisi	:	Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Target, Realisasi, Kriteria
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Jumlah dokumen kerjasama daerah, jumlah capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan jumlah dokumen tata laksana dan kelembagaan di pemerintah daerah
Konsep	:	Dokumen kerjasama
Definisi	:	

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Kategori (Dokumen kerjasama daeragm capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, Dokumen tatalaksana dan kelembagaan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Kelurahan
Konsep	:	Kelurahan
Definisi	:	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah RT
Konsep	:	Rukun Tetangga
Definisi	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah RW
Konsep	:	Rukun Warga

Definisi	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Keuangan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Inspektorat Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Tangerang Inspektorat Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	inspektoratkabtangerang111@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tangerang
Alamat	:	Pemerintah Kabupaten Tangerang Inspektorat Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	inspektoratkabtangerang111@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Berdasarkan Aturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dimana Walidata Daerah Wajib Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Pemeriksaan Dan Publikasi Data Sektoral. Selain Itu Dikarenakan Data-data Sektoral Yang Ada Di Lingkup Kabupaten Tangerang Masih Tersebar Dan Belum Terarsipkan Sehingga Dengan Adanya Kegiatan Ini Diharapkan Data Dapat Dengan Mudah Dicari Dan Ditemukan.

Tujuan Kegiatan : Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Mengumpulkan Data Dan Fakta Berupa Aspek Administrasi Pemerintah, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, Kependudukan, Dan Geografi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Publik Di Kabupaten Tangerang Yang Dihimpun Dari Berbagai Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Informasi Tersebut Dapat Dijadikan Publikasi Sebagai Publikasi Yang Memberikan Kemudahan Bagi Pengguna Data. Selain Itu Juga Dapat Digunakan Sebagai Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Tangerang.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 01 Februari 2025 s.d. 16 Februari 2025
2. Desain 19 Februari 2025 s.d. 01 Maret 2025
3. Pengumpulan Data 23 Februari 2025 s.d. 04 April 2025
4. Pengolahan Data 08 April 2025 s.d. 22 April 2025
5. Analisis 23 April 2025 s.d. 30 April 2025
6. Diseminasi Hasil 01 Mei 2025 s.d. 10 Mei 202
7. Evaluasi 13 Mei 2025 s.d. 17 Mei 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
- Jumlah Hasil Penilaian RB Tematik
- Hasil Penilaian Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI)
- Hasil Penilaian Baseline Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- Gelar Pengawasan bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- Capaian MCP Kab. Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data : *Longitudinal Panel*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang

Wilayah Kegiatan

Nama Provinsi : Banten

Kabupaten/Kota : Tangerang

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	*Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)*
Unit Pengumpulan Data	:	OPD

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Kunjungan Kembali Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas Supervisor/Penyelia/Pengawas Pengumpul Data/Enumerator	:	1 Orang 2 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Juni 2025

Digital	:	31 Juni 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Alias	:	Tabel 3.3.2 kol (2)
Konsep	:	Kapasitas Inspektorat
Definisi	:	Kapasitas APIP dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas
Referensi Pemilihan	:	UU No. 30 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Hasil Penilaian RB Tematik
Alias	:	Tabel 3.3.3 kol (2)
Konsep	:	Reformasi Birokrasi
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Alias	:	Tabel 3.3.4 kol (2) – kol (3)
Konsep	:	Manajemen Risiko Indeks
Definisi	:	Aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko.
Referensi Pemilihan	:	PP No. 60 Tahun 2008
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Perencanaan, Kapabilitas
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Alias	:	Tabel 3.3.5 kol (2) – kol (3)
Konsep	:	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Definisi	:	Hasil indeks pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Gelar Pengawasan Bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Alias	:	Tabel 3.3.6 kol (2) – kol (6)
Konsep	:	-
Definisi	:	OPD kabupaten tangerang yg tercepat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Perwakilan Prov.Banten
Referensi Pemilihan	:	Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Capaian MCP Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.3.7 kol (3) – kol (5)
Konsep	:	-
Definisi	:	Sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,
Referensi Pemilihan	:	UU No. 30 Tahun 2002
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Konsep	:	Kapasitas Inspektorat
Definisi	:	Kapasitas APIP dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Jumlah Hasil Penilaian RB Tematik
Konsep	:	Reformasi Birokrasi
Definisi	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Konsep	:	Manajemen Risiko Indeks
Definisi	:	Aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Konsep	:	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Definisi	:	Hasil indeks pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Gelar Pengawasan Bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Konsep	:	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Definisi	:	OPD kabupaten tangerang yg tercepat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Perwakilan Prov.Banten
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Peringkat
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Capaian MCP Kabupaten Tangerang
Konsep	:	-
Definisi	:	Sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Keuangan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai 1
Email	:	bapenda@tangerangkab.go.id

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, Dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai 1
Email	:	bapenda@tangerangkab.go.id

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Berdasarkan Aturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dimana Walidata Daerah Wajib Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Pemeriksaan Dan Publikasi Data Sektoral. Selain Itu Dikarenakan Data-data Sektoral Yang Ada Di Lingkup Kabupaten Tangerang Masih Tersebar Dan Belum Terarsipkan Sehingga Dengan Adanya Kegiatan Ini Diharapkan Data Dapat Dengan Mudah Dicari Dan Ditemukan. Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Metadata Statistik Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Metadata Statistik Kegiatan, Metadata Statistik Variabel, Dan Metadata Statistik Indikator. Metadata Statistik Indikator, Disingkat Dengan Metadata Indikator, Adalah Informasi Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Banyak Pihak Yang Menggunakan Data Statistik. Dalam Penyusunan Metadata Statistik Badan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Tersebut Agar Organisasi, Instansi Lain, Akademisi, Maupun Masyarakat

Dapat Memahami Makna Yang Terkandung Dalam Data Yang Disajikan.

Tujuan Kegiatan : Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Mengumpulkan Data Capaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Yang Terdiri Dari Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Tangerang.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan — 05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
2. Desain — 05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
3. Pengumpulan Data — 01 April 2025 s.d. 30 Juni 2025
4. Pengolahan Data — 01 Juli 2025 s.d. 30 September 2025
5. Analisis — 01 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025
6. Diseminasi Hasil — 01 November 2025 s.d. 30 November 2025
7. Evaluasi — 01 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Semesteran

Tipe Pengumpulan Data : *Longitudinal Panel*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang

Wilayah Kegiatan

Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Sistem Informasi Internal dan Rekonsiliasi dengan OPD Pengelola Retribusi Daerah
Unit Pengumpulan Data	:	• Individu • Rumah Tangga • Usaha/Perusahaan

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Kunjungan Kembali Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas Supervisor/Penyelia/Pengawas Pengumpul Data/Enumerator	:	1 Orang 2 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Ya
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	• Individu • Rumah Tangga • Usaha/Perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Desember 2025
Digital	:	31 Desember 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.2 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan retribusi daerah adalah jumlah target penerimaan pungutan daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.2 kol (5) – kol (7)
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah adalah jumlah pungutan Daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau Badan Pendapatan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.3 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak daerah adalah jumlah target penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan Umum, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.3 kol (5) – kol (7)
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan Umum, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.4 kol (3)
Konsep	:	Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah target penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kode Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.4 kol (4)
Konsep	:	Pajak Bumi dan Bangunan
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah realisasi penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kode Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Ka Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.5 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata
Definisi	:	Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata adalah Data yang menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan retribusi daerah adalah jumlah target penerimaan pungutan daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah adalah jumlah pungutan Daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau Badan Pendapatan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak daerah adalah jumlah target penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	-

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pajak Bumi dan Bangunan
Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah target penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pajak Bumi dan Bangunan
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah realisasi penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata
Definisi	:	Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata adalah Data yang menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Klasifikasi Penyajian	:	-

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Kompilasi Statistik Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	: Keuangan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -
PENYELENGGARA	
Instansi Penyelenggara	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Jl. Kh. Sarbini No. 3 Tigaraksa – Tangerang
Email	: bpkadkab.tangerang@yahoo.com
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Sekretaris Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat	: Jl. Kh. Sarbini No. 3 Tigaraksa – Tangerang
Email	: bpkadkab.tangerang@yahoo.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
Latar Belakang Kegiatan	: Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pada Pasal 20 Ayat 2, Bidang Akuntansi Mempunyai Uraian Fungsi Sebagai Berikut: A. Penyiapan Rumusan Kebijakan Teknis Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi; B. Penyusunan Rencana Dan Program Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi; C. Penyelenggaraan Akuntansi Kas Dan Selain Kas Lingkup Pemerintah Daerah; D. Penyiapan Pengendalian Yang Terkait

Dengan Penerapan Akuntasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi, Dan Pembinaan Akuntansi; E. Penyiapan Bimbingan Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi; Dan Pengelolaan Administrasi Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi

Tujuan Kegiatan : Terciptanya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Handal Dan Dapat Dipercaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance).

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 02 Januari 2025 s.d. 10 Januari 2025
2. Desain 13 Januari 2025 s.d. 30 April 2025
3. Pengumpulan Data 01 Mei 2025 s.d. 31 Mei 2025
4. Pengolahan Data 01 Juni 2025 s.d. 30 Juni 2025
5. Analisis 01 Juli 2025 s.d. 31 Juli 2025
6. Diseminasi Hasil 01 Agustus 2025 s.d. 30 November 2025
7. Evaluasi 01 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Realisasi penerimaan daerah kabupaten Tangerang
- Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
- Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah SILPA Kabupaten Tangerang
- Jumlah APBD Kabupaten Tangerang
- Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang
- Jumlah Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Persentase belanja Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
- Jumlah Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang
- Persentase belanja Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
- Jumlah investasi BUMD Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	*Aplikasi Keuangan dan Aset Kabupaten Tangerang*
Unit Pengumpulan Data	:	Pemerintah Daerah

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Task Force
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas	:	1 Orang
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Tidak
Penyahihan (Validasi)	:	Tidak
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Lainnya: Pemerintah Daerah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Tidak
Digital	:	Tidak
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Juni 2025
Digital	:	31 Juni 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.2 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Penerimaan Daerah
Definisi	:	Realisasi Penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atas oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis penerimaan (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.3 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Belanja Daerah
Definisi	:	Semua realisasi pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis pengeluaran (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.4 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Pembiayaan Daerah
Definisi	:	Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah SILPA Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.5 kol (2)
Konsep	:	SILPA
Definisi	:	Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah APBD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.5 kol (3)
Konsep	:	APBD
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*

Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.6 kol (2)
Konsep	:	Belanja Pendidikan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan Pendidikan
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.7 kol (2)
Konsep	:	Belanja Pendidikan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan Kesehatan
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah investasi BUMD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.9 kol (3)
Konsep	:	Investasi
Definisi	:	Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI STATISTIK KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Indikator	:	Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	SILPA, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Total SILPA / Total APBD x 100%

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja pendidikan, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Pendidikan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Total jumlah belanja bidang urusan pendidikan / Total APBD x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja kesehatan, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Kesehatan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Total jumlah belanja bidang urusan pendidikan / Total APBD x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Penerimaan Daerah
Definisi	:	Realisasi Penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atas oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Daerah
Definisi	:	Semua realisasi pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

		anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pembiayaan Daerah
Definisi	:	Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah SILPA Kabupaten Tangerang
Konsep	:	SILPA
Definisi	:	Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	APBD
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	SILPA, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Pendidikan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan Pendidikan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja pendidikan, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Pendidikan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Kesehatan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan kesehatan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Kesehatan , APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Kesehatan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah investasi BUMD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Investasi
Definisi	:	Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Kompilasi Statistik Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	: Sektor Publik Perpajakan Dan Regulasi Pasar
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -
PENYELENGGARA	
Instansi Penyelenggara	: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Jalan Pemda Tigaraksa, Bojong, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710
Email	: bkpsdm@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian
Alamat	: Jalan Pemda Tigaraksa, Bojong, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710
Email	: bkpsdm@tangerangkab.go.id
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
Latar Belakang Kegiatan	: Pengelolaan Kepegawaian Yang Berbasis Data Sangat Penting Dalam Mendukung Efektivitas Pelayanan Publik Dan Kebijakan Pengembangan Asn. Kabupaten Tangerang Sebagai Wilayah Dengan Dinamika Pertumbuhan Yang Tinggi Membutuhkan Data Kepegawaian Yang Akurat, Terkini, Dan Terstruktur.
Tujuan Kegiatan	: Penyusunan Kompilasi Statistik Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ini Bertujuan Untuk Menyediakan Informasi Menyeluruh Terkait Profil Asn, Baik Dari Aspek Jumlah, Pendidikan, Usia, Golongan, Jabatan, Hingga Pengembangan Kompetensi. Dokumen Ini Diharapkan Menjadi Dasar Perencanaan Yang Lebih Strategis Dalam Mewujudkan Asn Yang Profesional, Adaptif, Dan Berdaya Saing.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 31 Januari 2024 s.d. 31 Januari 2024
2. Desain 01 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024
3. Pengumpulan Data 01 Desember 2024 s.d. 07 Desember 2024
4. Pengolahan Data 23 Desember 2024 s.d. 28 Desember 2024
5. Analisis 01 Februari 2025 s.d. 28 Februari 2025
6. Diseminasi Hasil 01 Maret 2025 s.d. 31 Agustus 2025
7. Evaluasi 01 April 2025 s.d. 30 April 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
-

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	: Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	: Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	: *Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	: Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provins Banten
Wilayah Kegiatan	
Nama Provinsi	: Provinsi Banten
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Tangerang
Metode Pengumpulan Data	: Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	: Lainnya : Dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN)
Unit Pengumpulan Data	: Individu

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	: Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	: • Kunjungan Kembali • Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	: Tidak
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas Supervisor/Penyelia/Pengawas Pengumpul Data/Enumerator	: 2 Orang 5 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS	
Tahapan Pengolah Data	
Penyuntingan (*Editing*)	: Ya
Penyandian (*Coding*)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL	
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum	
Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan	
Tercetak	: 17 Juni 2025
Digital	: 17 Juni 2025
Data Mikro	: -

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.2 kol (2) – kol (10)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif di Kabupaten Tangerang

Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.3 kol (2) – kol (8)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.4 kol (2) – kol (61)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin

Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin di Kabupaten Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.5 kol (2) – kol (19)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif menurut Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.6 kol (2) – kol (49)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Umur, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.7 kol (2) – kol (35)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kelompok Umur, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.8 kol (2) – kol (91)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Kepangkatan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Kepangkatan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.9 kol (2) – kol (17)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Golongan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif menurut Golongan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seseorang berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang

Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.10 kol (2) – kol (31)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Jabatan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Jabatan dan jenis kelamin terdiri dari jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.11 kol (2) – kol (5)

Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Jabatan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut Jabatan dan jenis kelamin terdiri dari jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.12 kol (2) – kol (25)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Agama, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Agama/Kepercayaan yang dianut dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.13 kol (2) – kol (17)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Agama, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut Agama/Kepercayaan yang dianut dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki

- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Definisi : Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin di Kabupaten Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- SD
- SLTP
- SLTA
- D-I

- D-III
- D-IV
- S1
- S2
- S3

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut tingkat Pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- SMA
- D-III/Akta III
- D-IV/Akta IV
- S1
- S2

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Umur, Jenis kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Kelompok Umur : - 21 – 25 Tahun - 26 – 30 Tahun - 31 – 35 Tahun - 36 – 40 Tahun - 41 – 45 Tahun - 46 – 50 Tahun - 51 – 55 Tahun - 56 – 60 Tahun - >60 Tahun
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kelompok Umur, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Kelompok Umur : - 21 – 25 Tahun - 26 – 30 Tahun - 31 – 35 Tahun - 36 – 40 Tahun - 41 – 45 Tahun - 46 – 50 Tahun

- 51 – 55 Tahun
- 56 – 60 Tahun
- >60 Tahun

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Kepangkatan, Jenis kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Kepangkatan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Kepangkatan :

- I/a
- I/b
- I/c
- I/d
- II/a
- II/b
- II/c
- II/d
- III/a
- III/b
- III/c
- III/d
- IV/a
- IV/b
- IV/c
- IV/d
- IV/e

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Golongan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif menurut Golongan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seseorang berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Tingkat Kepangkatan : - II/a - II/c - III/a - III/b
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Jabatan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Jabatan terdiri dari jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Tangerang.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Jabatan :

- Fungsional tertentu
- Fungsional umum/Staff
- Eselon IV
- Eselon III
- Eselon II

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Golongan, Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian aktif Menurut Jabatan dan jenis kelamin yaitu jabatan fungsional di Kabupaten Tangerang.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Jabatan :

- Fungsional tertentu

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Negeri Sipil, Agama, Jenis kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Agama yang dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Agama :

- Islam
- Katholik
- Protestan
- Buddha
- Hindu
- Lainnya

Aturan Validasi : Jumlah

Akses Publikasi : Orang

Nama Variabel : Jumlah PPPK Menurut Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Negeri Sipil, Agama, Jenis kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Agama yang dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Agama :

- Islam
- Katholik
- Protestan
- Buddha
- Hindu
- Lainnya

Aturan Validasi : Jumlah

Akses Publikasi : Orang

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Kompilasi Statistik Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	: Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -
PENYELENGGARA	
Instansi Penyelenggara	: Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Alamat	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D. No. 1 Tigaraksa
Email	: sundalaporbappeda@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
Latar Belakang Kegiatan	: Penyusunan Kompilasi Statistik Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan Masukan Penting Dalam Rangka Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Di Kabupaten Tangerang Secara Terpadu, Yakni Menjadi Sarana Teknis Dalam Melaksanakan Program Pembangunan, Antara Lain Untuk Menilai Gambaran Fisik Dan Sifat Sifatnya Serta Untuk Menilai Tingkat Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Alam, Masalah Lingkungan. Selain Itu Juga Dapat Digunakan Untuk Menilai Gambaran Potensi Alam, Manusia, Dan Hasil Kegiatannya, Menilai Keberhasilan Pembangunan Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Untuk Menilai Potensi Daerah Dan Kemungkinan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Atau Dengan Kata Lain Sebagai Sarana Publikasi Hasil Hasil

		Penyelenggaraan Pembangunan Dan Potensi Yang Masih Dapat Dikembangkan Di Kabupaten Tangerang.
Tujuan Kegiatan	:	Mengidentifikasi Potensi Daerah, Serta Karakteristik Kabupaten Tangerang.
Jadwal Kegiatan	:	
1. Perencanaan Kegiatan		05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
2. Desain		05 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025
3. Pengumpulan Data		01 April 2025 s.d. 30 Juni 2025
4. Pengolahan Data		01 Juli 2025 s.d. 30 September 2025
5. Analisis		01 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025
6. Diseminasi Hasil		01 November 2025 s.d. 30 November 2025
7. Evaluasi		01 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam PERDA
- Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
- Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	: Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	: Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	: *Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	: Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provins Banten
Wilayah Kegiatan	
Nama Provinsi	: Provinsi Banten
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Tangerang
Metode Pengumpulan Data	: Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	: *Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*
Unit Pengumpulan Data	: -

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	: Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	: Kunjungan Kembali Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	: Tidak
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas Supervisor/Penyelia/Pengawas Pengumpul Data/Enumerator	: 1 Orang 1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	: Tidak
Penyandian (*Coding*)	: Tidak
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Dokumen
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	: 31 Desember 2025
Digital	: 31 Desember 2025
Data Mikro	: -

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam PERDA
Alias	:	Tabel 3.7.2 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	RPMJD, Perda
Definisi	:	Program-program yang ada dalam RPJMD harus ada dalam RKPD
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Alias	:	Tabel 3.7.3 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Penelitian pengembangan
Definisi	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen : - Dokumen penelitian bidang pemerintahan - Dokumen penelitian bidang sosial kemasyarakatan - Dokumen penelitian bidang infrastruktur - Dokumen penelitian bidang ekonomi
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.7.4 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian
Definisi	:	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen : - Dokumen Perencanaan - Dokumen data pembangunan - Dokumen pengendalian
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam PERDA Kabupaten Tangerang
Konsep	:	RPMJD, Perda
Definisi	:	Program-program yang ada dalam RPJMD harus ada dalam RKPD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis program : - RPJMD yang harus dilaksanakan - APBD yang harus dilaksanakan - RKPD
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Program

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Konsep	:	Penelitian pengembangan
Definisi	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian
Definisi	:	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

MS-KEG SURVEI TINGKAT KESALEHAN SOSIAL KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Survei Tingkat Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Cara Pengumpulan Data	: Survei
Sektor Kegiatan	: Demografi Dan Kependudukan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: V-25.3603.005

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	: Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang

Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alamat	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
Latar Belakang Kegiatan	: Kesalehan Sosial adalah sebuah kondisi yang menunjuk pada perilaku orang atau orang - orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Nilai keagamaan diwujudkan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Mahaesa sedangkan sosial adalah hubungan secara horizontal yang dilakukan antara manusia dengan manusia. Dalam konteks ini mengandung makna bahwa manusia adalah makluk pribadi maupun makluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mendengar pernyataan atau istilah "kesalehan sosial dan kesalehan individual". Kedua corak kesalehan ini mesti harus ada pada pribadi kita sebagai umat manusia. Dengan demikian maka Kesalehan sosial adalah suatu bentuk kesalehan yang tidak cuma ditandai oleh aktivitas beribadah seperti Sholat lima waktu untuk umat Muslim, Pergi ke Gereja bagi umat Kristen, atau ibadah di Klenteng bagi umat Konghuchu atau pergi ke Wihara bagi umat Budha, melainkan kesalehan sosial juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di lingkungan sekitarnya dengan tidak memandang suku, agama atau ras. Jadi Kesalehan dapat dilihat secara sosial dan individual. Kesalehan individual yang kadang kadang disebut juga sebagai kesalehan ritual atau kesalehan yang hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial, dan kurang menerapkan nilai-nilai social dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal, yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai hablum minannas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalehan individual semestinya melahirkan kesalehan sosial sebagai sebuah integritas sosial yang berjalan selaras antara kepentingan pribadi dan individu untuk mendekatkan diri

kepada Tuhan Yang Maha Esa secara Vertikal juga menjamin keharmonisan hidup antara umat manusia.

Agama tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan manusia. Orang yang saleh memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya terutama memenuhi hak manusia lain. Dalam konteks kehidupan bernegara, kesalehan sosial menjadi indikator penting dalam menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kesalehan sosial meliputi 5 dimensi, yaitu: (1) Solidaritas Sosial/Kepedulian Sosial, (2) Relasi Antar manusia, (3) Etika dan Budi Pekerti, (4) Melestarikan Lingkungan, dan (5) Patuh pada Peraturan Negara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) diperlukan untuk melihat gambaran kehidupan religius masyarakat Kabupaten Tangerang berkontribusi terhadap kehidupan sosial dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan survei Kesalehan Sosial masyarakat Kabupaten Tangerang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 ini.

Tujuan Kegiatan :

1. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah terkait Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Kabupaten Tangerang;
2. Menjadi Bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam merumuskan kebijakan pembangunan terkait keagamaan dan mendorong secara lebih optimal dalam pengamalan Kesalehan Sosial di Kabupaten Tangerang; dan
3. Menyediakan Rujukan untuk bahan kajian lebih lanjut oleh akademisi, ahli, serta pemerhati perilaku kesalehan sosial masyarakat.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
2. Desain 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
3. Pengumpulan Data 24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
4. Pengolahan Data 10 Maret 2025 s.d. 16 Maret 2025
5. Analisis 17 Maret 2025 s.d. 23 Maret 2025

6. Diseminasi Hasil 24 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025
7. Evaluasi 01 April 2025 s.d. 07 April 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :
- Dimensi Solidaritas Sosial
- Dimensi Relasi Antar Manusia
- Dimensi Etika dan Budi Pekerti
- Dimensi Pelestarian Lingkungan
- Dimensi Patuh pada Peraturan Negara

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data : *Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Sebagian Wilayah Indonesia

Wilayah Kegiatan
Nama Provinsi : Banten
Kabupaten/Kota : Tangerang

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Sarana Pengumpulan Data : *Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*

DESAIN SAMPEL

Jenis Rancangan Sampel : Multi Stage

Metode Pemilihan Sampel : Metode Probabilitas

Jenis Metode Sampel : Systematic Random Sampling

Fraksi Sampel Keseluruhan : Tahap 1
Sampel Rukun Tetangga (RT)
f1 = n(h) x [M(hi)/M(h)]
dimana:
f1 : fraksi sampling Rukun Tetangga (RT)
: n(h) : Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang dgunakan sebagai Master Sampling Frame di starata ke-h
(h = 1 untuk daerah perkotaan, h = 2 untuk daerah perdesaan)
M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h

	M(h) : Jumlah Populasi Keluarga pada strata ke-h pada sampling frame Tahap 2 Sampel Keluarga f2 = m(hi)/M(hi) dimana: f2 : fraksi sampling Keluarga m(hi) : Jumlah Sampel Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h Tahap 3 Sampel Individu Seluruh anggota keluarga berusia 17 Tahun keatas akan terpilih sebagai sampel (take all) f3 = k(j)/K(j) dimana: f3 : fraksi sampling individu k(j) : Jumlah Anggota Keluarga berusia 17 Tahun keatas pada sampel keluarga j 1 K(j) : Jumlah Seluruh Anggota Keluarga pada sampel keluarga j Fraksi Sampling Keseluruhan (f) f = f1 x f2 x f3
Unit Sampel	: Anggota Keluarga berusia 17 Tahun keatas
Unit Observasi	: Anggota Keluarga berusia 17 Tahun keatas
Jumlah Responden	: 400
PENGUMPULAN DATA	
Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	: Tidak
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: SMA Atau SMK
Jumlah Petugas Supervisor/Penyelia/Pengawas Pengumpul Data/Enumerator	: 3 Orang 27 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	: Kunjungan Kembali Supervisi

PENGOLAHAN DAN ANALISIS	
Tahapan Pengolah Data	
Penyuntingan (*Editing*)	: Tidak
Penyandian (*Coding*)	: Tidak
Data Entry	: Tidak
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL	
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum	
Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan	
Tercetak	: 30 April 2025
Digital	: 30 April 2025
Data Mikro	: -

MS-VAR SURVEI TINGKAT KESALEHAN SOSIAL KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Pendidikan
Alias	:	B2R6
Konsep	:	Pendidikan
Definisi	:	Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Setuju - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-8
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Bertutur kata yang baik
Alias	:	B5R2
Konsep	:	Bertutur kata yang baik
Definisi	:	Bertutur kata yang baik adalah berbicara dengan sopan, santun, dan penuh hormat. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang tepat, nada suara yang lembut, serta memperhatikan lawan bicara.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menaati himbauan terkait ketertiban umum
Alias	:	B7R4
Konsep	:	Menaati himbauan terkait ketertiban umum
Definisi	:	Sikap atau tindakan warga masyarakat yang patuh dan berpartisipasi dalam menjalankan anjuran, petunjuk, atau peraturan non-punitif yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (seperti pemerintah daerah, kepolisian, atau lembaga terkait) demi menjaga keteraturan, keamanan, kenyamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis di lingkungan publik.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Tidak menyogok pada urusan layanan publik (denda lalu lintas, pembuatan KTP/ Paspor, layanan nikah)
Alias	:	B7R3
Konsep	:	Tidak menyogok pada urusan layanan publik (denda lalu lintas, pembuatan KTP/ Paspor, layanan nikah.
Definisi	:	Perilaku atau sikap yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dengan tidak memberikan, menjanjikan, atau menerima imbalan berupa uang, barang, atau bentuk gratifikasi lainnya untuk mempercepat, mempermudah, atau mempengaruhi proses

pelayanan publik yang semestinya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Denda Lalu Lintas: Tidak memberikan uang "damai" kepada petugas untuk menghindari tilang resmi. Pembuatan KTP/Paspor: Tidak menyuap petugas untuk mempercepat atau mempermudah pengurusan dokumen. Layanan Pernikahan (KUA/Disdukcapil): Tidak memberi imbalan di luar ketentuan resmi untuk mempercepat proses atau mendapatkan perlakuan khusus.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Ketaatan membayar pajak (PBB dan Pajak Kendaraan)
Alias	:	B7R2
Konsep	:	Ketaatan membayar pajak (PBB dan Pajak Kendaraan)
Definisi	:	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Pajak kendaraan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik mobil setiap tahunnya untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, seperti jalan

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menaati Peraturan lalu lintas
Alias	:	B7R1
Konsep	:	Menaati Peraturan lalu lintas
Definisi	:	Perilaku mematuhi semua aturan, rambu, dan ketentuan yang berlaku di jalan raya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain serta menciptakan ketertiban lalu lintas
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menanam kembali (penghijauan) pohon dan/atau tumbuhan
Alias	:	B6R4
Konsep	:	Menanam kembali (penghijauan) pohon dan/atau tumbuhan
Definisi	:	Kegiatan menanam pohon dan tumbuhan di suatu area, baik itu lahan kosong, lahan bekas hutan yang gundul (reboisasi), atau bahkan di area perkotaan untuk berbagai tujuan, seperti pemulihan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kualitas hidup.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Memanfaatkan kembali barang dari plastik/ bahan daur ulang (reuse, reduse, recycle)
Alias	:	B6R5
Konsep	:	Memanfaatkan kembali barang dari plastik/ bahan daur ulang (reuse, reduse, recycle)
Definisi	:	Strategi pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan cara memanfaatkan kembali barang, mengurangi jumlah sampah, dan mendaur ulang. Reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang

berbeda. Reduce berarti Mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Membuang sampah pada tempatnya
Alias	:	B6R3
Konsep	:	Memanfaatkan kembali barang dari plastik/ bahan daur ulang (reuse, reduse, recycle)
Definisi	:	Menempatkan sampah ke dalam wadah atau lokasi yang telah disediakan untuk pengumpulan sampah, baik itu tempat sampah umum, tempat sampah terpilah, atau tempat pembuangan akhir sampah.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering

- Selalu

Aturan Validasi : Harus berisi angka 1-5

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Skor Indikator Menggunakan listrik dan/atau air sesuai kebutuhan

Alias : B6R2

Konsep : Menggunakan listrik dan/atau air sesuai kebutuhan

Definisi : Tindakan bijaksana yang bermanfaat bagi lingkungan dan juga keuangan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, serta menghemat penggunaan air dengan menutup keran rapat-rapat dan tidak membiarkannya mengalir sia-sia.

Referensi Pemilihan : Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Referensi Waktu : 24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025

Tipe Data : *String*

Klasifikasi Isian :
- Tidak Pernah
- Jarang
- Kadang-kadang
- Sering
- Selalu

Aturan Validasi : Harus berisi angka 1-5

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Skor Indikator Menjaga kebersihan lingkungan

Alias : B6R1

Konsep : Menjaga kebersihan lingkungan

Definisi	:	Upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan bau tidak sedap, serta bebas dari berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan dan kenyamanan. Hal ini mencakup pembersihan, pengelolaan sampah, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Bersikap adil, sesuai porsinya dalam menyelesaikan masalah di lingkungan tinggal
Alias	:	B5R9
Konsep	:	Bersikap adil, sesuai porsinya dalam menyelesaikan masalah di lingkungan tinggal
Definisi	:	Memberikan perlakuan yang sama dan proporsional kepada semua orang, tanpa memihak, dan sesuai dengan kebutuhan atau hak masing-masing.Ini mencakup objektivitas, kejujuran, dan penghargaan terhadap perbedaan individu dalam pengambilan keputusan dan solusi masalah.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menghargai waktu dan berkomitmen
Alias	:	B5R9
Konsep	:	Menghargai waktu dan berkomitmen
Definisi	:	Menghargai waktu berarti menyadari betapa berharganya waktu dan menggunakannya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan potensi diri. Sementara itu, berkomitmen berarti memiliki tekad yang kuat dan konsisten untuk menepati janji, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Setuju - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Memiliki kesetiaan (setia kawan, setia terhadap kesepakatan)

Alias	:	B5R8
Konsep	:	Memiliki kesetiaan (setia kawan, setia terhadap kesepakatan)
Definisi	:	Sikap teguh hati, ketaatan, dan kepatuhan terhadap janji, komitmen, atau hubungan yang telah terjalin. Kesetiaan mencakup konsistensi dalam tindakan, dukungan, dan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang dipegang bersama.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Bersikap jujur dan terbuka (berterus terang)
Alias	:	B5R7
Konsep	:	Bersikap jujur dan terbuka (berterus terang)
Definisi	:	Perilaku yang menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, serta menyampaikan informasi dengan apa adanya, tanpa ada niat untuk menyembunyikan atau memanipulasi fakta. Jujur berarti berkata benar dan apa adanya, tanpa menyembunyikan atau memanipulasi fakta. Keterbukaan, di sisi lain, adalah sikap bersedia berbagi informasi, perasaan, dan pikiran dengan orang lain.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Berhati-hati dalam bertindak (tidak sembarangan)
Alias	:	B5R6
Konsep	:	Berhati-hati dalam bertindak (tidak sembarangan)
Definisi	:	Melakukan sesuatu dengan penuh perhatian, kewaspadaan, dan pertimbangan matang, untuk menghindari kesalahan, bahaya, atau konsekuensi negatif lainnya
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Memberikan ketenangan (tidak membuat gaduh/bising/ribut/huru-hara) dalam lingkungan tinggal
Alias	:	B5R5

Konsep	:	Memberikan ketenangan (tidak membuat gaduh/bising/ribut/huru-hara) dalam lingkungan tinggal
Definisi		Menciptakan suasana yang damai, tenang, dan bebas dari gangguan suara bising, keributan, atau huru-hara yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni rumah dan tetangga. Hal ini mencakup upaya untuk tidak membuat kegaduhan, tidak membuat keributan, dan tidak menimbulkan kekacauan yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menghargai pendapat orang lain dalam pertemuan sosial dan/atau keagamaan
Alias	:	B5R4
Konsep	:	Menghargai pendapat orang lain dalam pertemuan sosial dan/atau keagamaan
Definisi		Mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk memiliki pandangan yang berbeda, serta memberikan perhatian dan mendengarkan pandangan tersebut tanpa merendahkan atau mengabaikannya. Pertemuan sosial dan/atau keagamaan adalah kegiatan berkumpulnya sekelompok orang, baik untuk tujuan sosial seperti bersosialisasi, berinteraksi, atau bekerja

sama, maupun untuk tujuan keagamaan seperti beribadah, ritual, atau kegiatan keagamaan lainnya.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Tidak Meludah sembarangan
Alias	:	B5R3
Konsep	:	Tidak Meludah sembarangan
Definisi		Tindakan tidak meludah di tempat umum yang tidak semestinya, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Berlaku sopan menghormati sesama pengguna jalan
Alias	:	B5R1
Konsep	:	Berlaku sopan menghormati sesama pengguna jalan
Definisi		Menunjukkan sikap ramah, santun, dan menghargai hak-hak pengguna jalan lain, baik itu pengendara, pejalan kaki, maupun petugas lalu lintas. Hal ini mencakup mematuhi aturan lalu lintas, memberikan prioritas kepada pengguna jalan lain yang membutuhkan, serta menghindari perilaku agresif atau tindakan yang dapat membahayakan orang lain
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menghargai kebudayaan, tradisi dan kearifan lokal
Alias	:	B4R2
Konsep	:	Menghargai kebudayaan, tradisi dan kearifan lokal
Definisi		Mengakui, menghormati, dan melestarikan warisan budaya serta pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan mencakup keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia, sementara tradisi adalah praktik yang

diwariskan secara turun-temurun, dan kearifan lokal adalah pengetahuan dan praktik khas suatu komunitas.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan)
Alias	:	B4R1
Konsep	:	Memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan)
Definisi		Memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama kepada setiap individu, tanpa membedakan latar belakangnya. Suku adalah Kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan budaya, bahasa, asal usul, dan tradisi. Agama adalah Sistem kepercayaan dan praktik ibadah yang dianut oleh individu atau kelompok. Ras adalah Pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik bawaan. Antar Golongan merujuk pada perbedaan dalam kelompok sosial, ekonomi, atau status dalam masyarakat.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Memberi bantuan/ sedekah/ hadiah/ untuk kepentingan umum
Alias	:	B3R3
Konsep	:	Memberi bantuan/ sedekah/ hadiah/ untuk kepentingan umum
Definisi		Tindakan memberikan sesuatu (bisa berupa uang, barang, atau jasa) kepada orang lain atau kelompok orang, dengan tujuan untuk memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menghadiri Forum warga di lingkungan tempat tinggal
Alias	:	B3R2
Konsep	:	Menghadiri Forum warga di lingkungan tempat tinggal
Definisi		Kegiatan menghadiri pertemuan atau rapat yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal, yang bertujuan untuk membahas isu-isu terkait lingkungan tersebut, serta mencari solusi bersama untuk masalah yang ada.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Menjalin silaturahmi (saling mengunjungi, berkomunikasi)
Alias	:	B3R1
Konsep	:	Menjalin silaturahmi (saling mengunjungi, berkomunikasi)
Definisi		Upaya untuk mempererat hubungan baik dengan keluarga, kerabat, atau orang lain, baik melalui kunjungan fisik maupun komunikasi. Ini mencakup menjaga hubungan, menghormati, membantu, serta saling menyapa dan memaafkan. Silaturahmi juga bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memberi bantuan, salam, dan dukungan dalam kebaikan.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Alias	:	B2R13
Konsep	:	Jenis Kelamin
Definisi		Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Referensi Pemilihan	:	Kondef Operasional Baku Statistik Sosial (2018)
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Laki-Laki - Perempuan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka 1 atau 2
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Alamat Tempat Tinggal
Alias	:	B2R11
Konsep	:	Alamat

Definisi		Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Di Lingkungan Kementerian Sosial
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Minimal berisi 10 karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Rukun Tetangga (RT)
Alias	:	B2R11
Konsep	:	Rukun Tetangga
Definisi		Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. RT merupakan bagian dari pembagian wilayah di bawah Rukun Warga (RW).
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi RT 001, RT 002, RT 002, RT 004, atau RT 005
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Rukun Warga (RW)
Alias	:	B2R11
Konsep	:	Rukun Warga (RW)
Definisi		Lembaga masyarakat yang dibentuk dari beberapa kelompok Rukun Tetangga (RT) di suatu desa atau kelurahan.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi RW 001, RW 002, RW 003, RW 004, RW 005, atau RW 006
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Desa/Kelurahan
Alias	:	B2R10
Konsep	:	Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
Definisi		Desa/Kelurahan
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi 010 - Surya Bahari
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Kecamatan
Alias	:	B2R9
Konsep	:	Kecamatan
Definisi		Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi 190 - Pakuhaji
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Penghasilan per bulan
Alias	:	B2R8
Konsep	:	Penghasilan per bulan
Definisi		Pendapatan yang diterima selama sebulan baik yang berupa uang maupun barang/jasa dalam rupiah.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman SBH 2022: Buku 3. Pedoman Pengisian Daftar VBH22-HR, VBH22-HRp, VBH22-KK, VBH22-LK, dan VBH22-S
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tanpa Penghasilan - Dibawah 1 Juta - 1-3 Juta - 3-5 Juta - Diatas 5 Juta

Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Pekerjaan
Alias	:	B2R8
Konsep	:	Penghasilan per bulan
Definisi		Jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.
Referensi Pemilihan	:	KBBI, kbbi.web.id/kerja
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak/Belum Bekerja - Ibu Rumah Tangga - Pelajar/Mahasiswa - PNS/ASN - Wiraswasta - TNI/-Polri - Petani - Karyawan Swasta
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-8
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Usia
Alias	:	B2R5
Konsep	:	Usia
Definisi		Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5

tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.

Referensi Pemilihan	:	1.https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Laporan-Riskesdas-2018-Nasional.pdf 2.https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf 3.https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html 4.https://www.abs.gov.au/statistics/standards/age-standard/2014-version-17
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- 17-20 Tahun - 21-30 Tahun - 31-40 Tahun - 41-50 Tahun - 51-60 Tahun - Di atas 60
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-6
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Agama
Alias	:	B2R4
Konsep	:	Usia
Definisi		Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.
Referensi Pemilihan	:	1. UUD Tahun 1945

2. UU No 23 Tahun 2006

3. UU No 24 Tahun 2013

Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Islam - Kristen - Katolik - Hindu - Buddha - Konghucu - Kepercayaan lainnya
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-6
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alias	:	B2R3
Konsep	:	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Definisi		Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang.
Referensi Pemilihan	:	UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka dengan jumlah 16 digit
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Kepala Keluarga
Alias	:	B2R1
Konsep	:	Kepala Keluarga
Definisi		Kepala Keluarga adalah salah seorang dari anggota keluarga yang tertulis di dalam Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan tinggal bersama dalam satu bangunan. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No.52 tahun 2009. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi Huruf A-Z dan minimal 3 huruf
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND SURVEI TINGKAT KESALEHAN SOSIAL KABUPATEN TANGERANG

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Tidak Meludah sembarangan
Konsep	:	Tidak Meludah sembarangan
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat tidak meludah sembarangan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-

		19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menjalin silaturahmi (saling mengunjungi, berkomunikasi)
Konsep	:	Menjalin silaturahmi (saling mengunjungi, berkomunikasi)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menjalin silaturahmi (saling mengunjungi, berkomunikasi).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	-
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Bersikap jujur dan terbuka (berterus terang)
Konsep	:	Bersikap jujur dan terbuka (berterus terang)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat bersikap jujur dan terbuka (berterus terang).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Berlaku sopan menghormati sesama pengguna jalan
Konsep	:	Berlaku sopan menghormati sesama pengguna jalan
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat berlaku sopan menghormati sesama pengguna jalan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)

Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan)
Konsep	:	Memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Solidaritas Sosial
Konsep	:	Solidaritas Sosial
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat solidaritas sosial masyarakat. Solidaritas Sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan antar manusia yang menunjukan sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu dan peduli terhadap orang lain atau sesama.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Dl = \frac{\sum_{j=1}^{l} Ilj}{l}$; l=3
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Berhati-hati dalam bertindak (tidak sembarangan)
Konsep	:	Berhati-hati dalam bertindak (tidak sembarangan)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat berhati-hati dalam bertindak (tidak sembarangan).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)

Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menghargai waktu dan berkomitmen
Konsep	:	Menghargai waktu dan berkomitmen
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menghargai waktu dan berkomitmen.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Ketaatan membayar pajak (PBB dan Pajak Kendaraan)

Konsep	:	Ketaatan membayar pajak (PBB dan Pajak Kendaraan)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat memiliki ketaatan membayar pajak (PBB dan Pajak Kendaraan).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menghargai kebudayaan, tradisi dan kearifan lokal
Konsep	:	Menghargai kebudayaan, tradisi dan kearifan lokal
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menghargai kebudayaan, tradisi dan kearifan lokal.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Etika dan Budi Pekerti
Konsep	:	Etika dan Budi Pekerti
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat etika dan budi pekerti masyarakat. Etika dan Budi Pekerti merupakan variabel yang menilai tentang bagaimana seseorang bersikap terhadap orang lain di lingkungan sekitarnya.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $D3 = \frac{\sum_{i}^{n} I3j}{n}$; n=10
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Membuang sampah pada tempatnya
Konsep	:	Membuang sampah pada tempatnya
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat membuang sampah pada tempatnya.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan)
Konsep	:	Memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat memperlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku, agama, ras dan antar golongan).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis

$$Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$$

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Memberikan ketenangan (tidak membuat gaduh/ bising/ ribut/ huru-hara) dalam lingkungan tinggal
Konsep	:	Memberikan ketenangan (tidak membuat gaduh/ bising/ ribut/ huru-hara) dalam lingkungan tinggal
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat memberikan ketenangan (tidak membuat gaduh/ bising/ ribut/ huru-hara) dalam lingkungan tinggal.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis

$$Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$$

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menghargai pendapat orang lain dalam pertemuan sosial dan/atau keagamaan
Konsep	:	Menghargai pendapat orang lain dalam pertemuan sosial dan/atau keagamaan
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menghargai pendapat orang lain dalam pertemuan sosial dan/atau keagamaan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menjaga kebersihan lingkungan
Konsep	:	Menjaga kebersihan lingkungan
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)

Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Relasi Antar Manusia
Konsep	:	Relasi Antar Manusia
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat relasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Relasi Antar Manusia merupakan pengukuran kesalehan sosial masyarakat pada sisi bagaimana masyarakat bekerja sama, menghargai perbedaan ras dan suku, menghargai perbedaan agama, serta bagaimana masyarakat menjaga kelestarian budaya lokal yang ada dalam lingkungan tempat tinggalnya.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $D2 = \frac{\sum_{1}^{l} I2j}{m}$; m=2
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya

Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Patuh pada Peraturan Negara
Konsep	:	Patuh pada Peraturan Negara
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat kepatuhan masyarakat pada peraturan negara. Patuh pada Peraturan Negara menggambarkan bagaimana masyarakat berprilaku dengan mematuhi aturan yang ada seperti undang-undang, pancasila, peraturan daerah, dan sebagainya.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $D5 = \frac{\sum_1^p I5j}{p}$; p=4
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menggunakan listrik dan/atau air sesuai kebutuhan
Konsep	:	Menggunakan listrik dan/atau air sesuai kebutuhan
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menggunakan listrik dan/atau air sesuai kebutuhan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan

		menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Memiliki kesetiaan (setia kawan, setia terhadap kesepakatan)
Konsep	:	Memiliki kesetiaan (setia kawan, setia terhadap kesepakatan)
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat memiliki kesetiaan (setia kawan, setia terhadap kesepakatan).
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Menaati himbauan terkait ketertiban umum
Konsep	:	Menaati himbauan terkait ketertiban umum
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif seberapa sering masyarakat menaati himbauan terkait ketertiban umum.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{k=1}^{m} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Akses Publikasi	:	Publik

MS-KEG SURVEI TINGKAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Survei Tingkat Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Cara Pengumpulan Data	: Survei
Sektor Kegiatan	: Demografi Dan Kependudukan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: V-25.3603.004

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	: Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Alamat Lengkap Instansi	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alamat	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan : Keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama dapat dinilai dengan melihat indikator kerukunan yang paling mendasar, yang dapat ditingkatkan di tingkat nasional maupun wilayah, atau paling tidak, sejauh mana permasalahan yang muncul di sekitar indikator dasar tersebut dapat teratasi atau diminimalkan (Sujati, 2020). Namun persoalannya adalah capaian pembangunan kerukunan sangat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, dimana beberapa aspek kerukunan tertentu di suatu wilayah berhasil diwujudkan, sementara beberapa aspek lain mengalami hambatan di wilayah lainnya (Pramono, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memiliki tolak ukur keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama berdasarkan capaian nasional yang terstandarisasi (Mulia & Sari, 2019).

Dewasa ini, persoalan mengenai capaian pembangunan kerukunan umat beragama telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat (Arifin, 2018). Berbagai hasil penilaian capaian tentang kerukunan (atau dengan istilah/sebutan yang lain) telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda (Zulkarnain, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai instansi pemerintah yang bertugas salah satunya di bidang agama, perlu menetapkan ukuran standar indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan mengikuti standar nasional (Yulianto, 2018).

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Survei ini penting untuk memahami tingkat hubungan, interaksi, serta kedekatan antarumat beragama di Kabupaten Tangerang. Indeks

Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mengambil konsep dasar kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Indeks kerukunan yang akan dibentuk berdasarkan tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima dan menghormati perbedaan, yang menjadi elemen penting dalam masyarakat multikultural (Firdaus, 2020). Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi dan memberi kesempatan yang sama, tanpa mengedepankan superioritas, sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif dalam bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati serta simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Mulia & Sari, 2019). Toleransi, meskipun penting, hanyalah langkah awal; agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan yang kemudian diterjemahkan dalam tindakan nyata berupa kerjasama dalam masyarakat majemuk (Pramono, 2017).

Berdasarkan kajian pengalaman bangsa dalam membangun kerukunan, tampak bahwa arah dan sasaran kebijakan sering ditetapkan secara sporadis dan belum berdasarkan blueprint yang kuat (Zulkarnain, 2019). Program kerukunan umat beragama umumnya diarahkan pada kegiatan yang kurang mempertimbangkan tahapan dan skala prioritas kebutuhan nasional maupun daerah secara spesifik (Arifin, 2018). Kegiatan kerukunan biasanya dilakukan di sekitar: (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan, (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan media, dan (4) pengembangan wawasan serta penguatan kesadaran kerukunan umat beragama (Sujati, 2020). Kegiatan-kegiatan ini seringkali dilakukan tanpa peta masalah kerukunan yang jelas di masing-masing wilayah, sehingga beberapa daerah mengalami hambatan dalam keberhasilan pembangunan kerukunan.

Akibatnya, problematika kerukunan senantiasa mengintai dan dapat merusak stabilitas pembangunan bangsa (Mulia & Sari, 2019). Tidak jarang, suatu daerah yang dianggap cukup baik kerukunannya, tiba-tiba muncul konflik besar yang mengguncang. Dengan dibuatnya indeks kerukunan melalui pedoman yang jelas, daerah yang memperoleh hasil indeks

tinggi dapat diberi apresiasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama di wilayahnya. Sebaliknya, daerah dengan perolehan indeks rendah dapat menggunakan hasil indeks tersebut untuk memperbaiki kekurangan secara terarah (Firdaus, 2020). Di samping itu, penting untuk melihat pencapaian pembangunan kerukunan secara nasional, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing wilayah dalam capaian tingkat kerukunan tersebut (Zulkarnain, 2019).

Kabupaten Tangerang dikenal sebagai wilayah yang memiliki keragaman etnis dan agama. Masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan memeluk keyakinan agama yang berbeda dapat menjadi pemicu kebutuhan akan penilaian dan pemahaman lebih mendalam terkait kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan pembangunan daerah. Untuk menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk memahami sejauh mana kerukunan umat beragama terwujud dan dapat dijaga di Kabupaten Tangerang. Dalam konteks global, fenomena polarisasi dan konflik antaragama telah menjadi perhatian serius (Mulia & Sari, 2019).

Survei di tingkat lokal seperti Kabupaten Tangerang dapat memberikan wawasan konkret mengenai tantangan dan potensi solusi yang sesuai dengan konteks setempat. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memiliki data yang akurat dan komprehensif mengenai tingkat kerukunan umat beragama di wilayahnya. Survei ini dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan memerlukan lingkungan yang stabil dan harmonis. Kerukunan umat beragama menjadi landasan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan (Pramono, 2017).

Tujuan Kegiatan :

1. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Tangerang;
2. Menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam rangka membangun iklim/kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif;

3. Menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
2. Desain 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
3. Pengumpulan Data 24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
4. Pengolahan Data 10 Maret 2025 s.d. 16 Maret 2025
5. Analisis 17 Maret 2025 s.d. 23 Maret 2025
6. Diseminasi Hasil 24 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025
7. Evaluasi 01 April 2025 s.d. 07 April 202

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :
- Dimensi Toleransi
- Dimensi Kesetaraan
- Dimensi Kerjasama

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data : *Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang

Wilayah Kegiatan
Nama Provinsi : Banten
Kabupaten/Kota : Tangerang

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Mengisi kuisioner sendiri

Sarana Pengumpulan Data : *Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*

DESAIN SAMPEL

Jenis Rancangan Sampel : Multi Stage

Metode Pemilihan Sampel : Metode Probabilitas

Jenis Metode Sampel : Systematic Random Sampling

Fraksi Sampel Keseluruhan : Tahap 1
Sampel Rukun Tetangga (RT)

f1 = n(h) x [M(hi)/M(h)]
dimana:
f1 : fraksi sampling Rukun Tetangga (RT)
n(h) : Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang dgunakan sebagai Master Sampling Frame di starata ke-h
(h = 1 untuk daerah perkotaan, h = 2 untuk daerah perdesaan)
M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h
M(h) : Jumlah Populasi Keluarga pada strata ke-h pada sampling frame

Tahap 2
Sampel Keluarga
f2 = m(hi)/M(hi)
dimana:
f2 : fraksi sampling Keluarga
m(hi) : Jumlah Sampel Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h
M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h

Tahap 3
Sampel Individu
Seluruh anggota keluarga berusia 17 Tahun keatas akan terpilih sebagai sampel (take all)
f3 = k(j)/K(j)
dimana:
f3 : fraksi sampling individu
k(j) : Jumlah Anggota Keluarga berusia 17 Tahun keatas pada sampel keluarga j1

K(j) : Jumlah Seluruh Anggota Keluarga pada sampel keluarga j

Fraksi Sampling Keseluruhan (f)
f = f1 x f2 x f3

Unit Sampel	: Anggota Keluarga berusia 17 Tahun keatas
Unit Observasi	: Anggota Keluarga berusia 17 Tahun keatas
Jumlah Responden	: 400

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	: Tidak
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:
Supervisor/Penyelia/Pengawas	3 Orang
Pengumpul Data/Enumerator	27 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	: Kunjungan Kembali Supervisi

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	: Tidak
Penyandian (*Coding*)	: Tidak
Data Entry	: Tidak
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	: 30 April 2025
Digital	: 30 April 2025
Data Mikro	: -

MS-VAR SURVEI TINGKAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Skor Indikator Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb
Alias	:	B5R6
Konsep	:	Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb
Definisi	:	Keterlibatan aktif seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok yang anggotanya berasal dari beragam latar belakang agama, untuk mencapai tujuan bersama di bidang sosial, ekonomi, hobi, atau kepentingan lainnya. Berpartisipasi berarti ikut serta secara aktif, baik sebagai anggota, pengurus, atau peserta dalam kegiatan organisasi. Organisasi yang melibatkan penganut agama lain mengacu pada kelompok atau komunitas yang bersifat inklusif, di mana anggotanya berasal dari berbagai agama.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb
Alias	:	B5R6
Konsep	:	Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama
Definisi	:	Keterlibatan seseorang dalam kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan secara bersama-sama dengan rekan kerja atau mitra yang menganut agama berbeda, dalam semangat kerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Terlibat usaha berarti ikut serta dalam kegiatan kewirausahaan, baik sebagai pemilik, pengelola, investor, maupun pekerja aktif. Dikelola bersama menunjukkan bahwa usaha tersebut dijalankan secara kolaboratif atau kemitraan. Teman/kolega berbeda agama menegaskan bahwa kerja sama usaha dilakukan oleh orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Melakukan jual beli/ transaksi dengan orang yang berbeda agama

Alias	:	B5R4
Konsep	:	Melakukan jual beli/ transaksi dengan orang yang berbeda agama
Definisi	:	Kegiatan ekonomi berupa pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan individu lain yang menganut agama berbeda, dalam situasi saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jual beli/transaksi mencakup segala bentuk kegiatan ekonomi, seperti membeli makanan, pakaian, jasa layanan, menyewa, berdagang, dan lain-lain. Dengan orang yang berbeda agama berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa mempersoalkan atau membatasi diri berdasarkan agama pihak lain.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/ pesta/ pernikahan/ dll)
Alias	:	B5R3
Konsep	:	Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/ pesta/ pernikahan/ dll)

Definisi	:	Tindakan memberikan dukungan, tenaga, waktu, atau bantuan lainnya kepada orang yang menganut agama berbeda dalam kegiatan atau acara penting mereka, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, sebagai bentuk kepedulian dan kerukunan antarumat beragama. Membantu mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti ikut menyiapkan acara, menyumbang, menjaga keamanan, atau sekadar hadir sebagai bentuk penghormatan. Penganut agama lain berarti orang yang berbeda agama. Yang membutuhkan bantuan menandakan bahwa bantuan diberikan atas dasar kebutuhan atau permintaan, dalam semangat sukarela.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah
Alias	:	B5R2
Konsep	:	Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah
Definisi	:	Tindakan bekerja sama atau bergotong royong dengan orang-orang yang menganut agama berbeda untuk memberikan bantuan kepada siapa pun yang sedang mengalami penderitaan, bencana, atau masalah, tanpa memandang latar belakang agama.

Bersama-sama penganut agama lain berarti melakukan suatu aksi kemanusiaan secara kolektif dengan orang yang berbeda keyakinan atau agama. Membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti memberi makanan, pakaian, dana, tenaga, atau dukungan moral kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, sakit, dll.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks KerukunaUmat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/ sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb
Alias	:	B5R1
Konsep	:	Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/ sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb
Definisi	:	Keterlibatan aktif seseorang dalam kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal atau masyarakat yang bersifat sosial, kemasyarakatan, atau kebangsaan, bersama warga lain yang menganut agama berbeda dari dirinya. Berpartisipasi berarti ikut serta secara langsung, baik sebagai panitia, peserta, maupun

pendukung kegiatan. Kegiatan lingkungan/sosial mencakup aktivitas yang mempererat hubungan sosial antarwarga, seperti Perayaan Hari Kemerdekaan RI, Kerja bakti membersihkan lingkungan, Pertemuan warga (Rukun Tetangga/Rukun Warga), Kegiatan sosial seperti pembagian sembako, donor darah, dll. Yang melibatkan penganut agama lain menandakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh warga dari berbagai agama, mencerminkan keberagaman.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia
Alias	:	B5R7
Konsep	:	Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia
Definisi	:	Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia, tanpa diskriminasi berdasarkan agama yang dianut, selama memenuhi syarat-syarat konstitusional dan hukum yang berlaku. Warga Negara Indonesia adalah individu yang secara sah memiliki kewarganegaraan Indonesia. Apapun agamanya menegaskan bahwa agama tidak

boleh menjadi dasar pelarangan atau penghalang bagi seseorang untuk menjadi calon presiden. Berhak menjadi Presiden berarti memiliki peluang dan kedudukan yang setara dalam sistem demokrasi untuk mencalonkan diri, dipilih, dan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa)
Alias	:	B5R6
Konsep	:	Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa)
Definisi	:	Setiap orang yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi pemimpin daerah, tanpa diskriminasi atau pembatasan berdasarkan agama yang dianutnya. Warga Negara Indonesia mencakup semua penduduk yang secara sah memiliki kewarganegaraan Indonesia. Apapun agamanya menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi alasan penghalang untuk menjadi calon kepala daerah. Berhak menjadi kepala daerah berarti setiap WNI berhak mencalonkan diri

dan/atau dipilih dalam jabatan publik seperti gubernur, walikota, bupati, hingga kepala desa, selama memenuhi syarat administratif dan hukum yang berlaku.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak Pernah - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya
Alias	:	B5R5
Konsep	:	Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya
Definisi	:	Setiap peserta didik memiliki hak untuk menerima pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya, yang diselenggarakan oleh pihak sekolah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Setiap siswa mencakup semua murid tanpa membedakan latar belakang agama. Berhak mendapat pendidikan agama berarti siswa wajib difasilitasi untuk belajar agama sebagai bagian dari pembentukan moral dan spiritual. Sesuai dengan agama yang dianutnya menegaskan bahwa pelajaran agama harus diberikan berdasarkan agama masing-masing siswa, bukan dipaksakan mengikuti agama mayoritas di sekolah.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamany
Alias	:	B5R4
Konsep	:	Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya
Definisi	:	Setiap orang yang menjadi warga negara berhak memperoleh kesempatan dan akses yang adil untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaannya, tanpa diskriminasi berdasarkan agama yang dianut. Hak untuk mendapatkan pekerjaan berarti setiap individu berhak melamar, diterima, dan bekerja dalam bidang apa pun yang sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan yang layak mencakup pekerjaan yang memberikan penghasilan cukup, kondisi kerja yang aman, penghormatan terhadap hak pekerja, serta perlindungan sosial. Apapun agamanya menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda, penolakan, atau hambatan terhadap seseorang dalam dunia kerja hanya karena agamanya..
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya
Alias	:	B5R3
Konsep	:	Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya
Definisi	:	Prinsip bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh akses dan perlakuan yang setara dalam menerima layanan dari pemerintah atau institusi publik, tanpa memandang agama yang dianut. Layanan publik mencakup pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta), kesehatan, pendidikan, keamanan, bantuan sosial, dan lain-lain. Hak yang sama berarti tidak boleh ada perlakuan berbeda, penghambatan, atau diskriminasi berdasarkan agama. Apapun agamanya menegaskan bahwa hak ini berlaku bagi semua penganut agama, baik mayoritas maupun minoritas...
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju

Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya
Alias	:	B5R2
Konsep	:	Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya
Definisi	:	Prinsip bahwa semua orang yang menjadi warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan sistem peradilan, tanpa membedakan latar belakang agama yang dianut. Sama di muka hukum berarti setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban hukum yang setara, termasuk dalam hal perlindungan hukum, pengadilan, serta penegakan hukum. Apapun agamanya menegaskan bahwa hukum tidak boleh mendiskriminasi atau memihak berdasarkan keyakinan atau agama seseorang.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Alias	:	B5R1

Konsep	:	Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Definisi	:	Setiap agama, tanpa terkecuali, berhak menyampaikan, mengajarkan, atau menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai agamanya kepada umat atau masyarakat, selama dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di negara tersebut. Semua kelompok agama mencakup agama-agama besar maupun minoritas, baik yang diakui negara maupun yang hidup di tengah masyarakat. Diberi hak menunjukkan bahwa negara atau masyarakat seharusnya memberikan ruang yang adil. Menyiarkan ajaran agamanya bisa dalam bentuk ceramah, pengajaran di rumah ibadah, siaran radio/TV, media sosial, buku, dll. Sesuai peraturan perundangan artinya tidak boleh melanggar hukum, seperti menyebarkan kebencian, memaksa orang berpindah agama, atau merendahkan agama lain.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Anak-anak berteman/ berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain
Alias	:	B5R5
Konsep	:	Anak-anak berteman/ berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain

Definisi	:	Situasi di mana anak menjalin hubungan sosial, seperti bermain, belajar, berbicara, atau beraktivitas bersama, dengan anak-anak yang memeluk agama berbeda dari agamanya sendiri. Berteman mencakup hubungan pergaulan yang akrab, saling mengenal, dan bersifat positif. Berinteraksi mencakup segala bentuk komunikasi dan kegiatan bersama, baik di sekolah, lingkungan tempat tinggal, atau kegiatan umum lainnya. Anak-anak penganut agama lain berarti teman-teman anak responden menganut agama yang berbeda dari yang dianut oleh anak, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/ kelurahan tempat tinggal
Alias	:	B5R4
Konsep	:	Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/ kelurahan tempat tinggal
Definisi	:	Kegiatan umat beragama yang berbeda dari agama responden atau agama mayoritas di lingkungan tempat tinggal, dalam menyelenggarakan perayaan hari besar keagamaan sesuai ajaran dan tradisi agamanya di wilayah tempat tinggal, seperti desa atau kelurahan. Penganut agama lain merujuk pada orang-orang yang

memeluk agama berbeda di wilayah tersebut. Melakukan perayaan keagamaan mencakup kegiatan ibadah dan/atau acara keagamaan yang bersifat khusus atau meriah, seperti misa Natal, prosesi Waisak, Galungan, Nyepi, Cap Go Meh, dll. Di desa/kelurahan tempat tinggal menekankan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat
Alias	:	B5R3
Konsep	:	Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat
Definisi	:	Situasi di mana umat beragama yang berbeda dari agama mayoritas membangun tempat ibadah (seperti gereja, pura, vihara, klenteng, dll.) di lingkungan tempat tinggal , dengan terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. Penganut agama lain merujuk pada warga yang memeluk agama berbeda dari mayoritas di desa/kelurahan tersebut. Membangun rumah ibadat berarti

mendirikan bangunan khusus untuk kegiatan keagamaan. Setelah mendapat izin dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa proses pendirian dilakukan secara legal dan mengikuti prosedur, seperti yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat..

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya
Alias	:	B5R2
Konsep	:	Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya
Definisi	:	Setiap orang yang menganut agama berbeda dari mayoritas atau dari agama responden sendiri memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan agamanya masing-masing. Penganut agama lain merujuk pada individu atau kelompok yang menganut agama berbeda di suatu wilayah. Beribadat sesuai agama dan keyakinannya berarti menjalankan kegiatan keagamaan seperti sembahyang, misa, doa, puasa, ritual, atau upacara keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini.

Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju - Sangat Setuju
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Skor Indikator Hidup bertetangga dengan penganut agama lain
Alias	:	B5R1
Konsep	:	Hidup bertetangga dengan penganut agama lain
Definisi	:	Situasi di mana seseorang tinggal dan menjalin hubungan sosial dalam lingkungan tempat tinggal (seperti desa, kelurahan, kompleks, atau perumahan) bersama orang-orang yang menganut agama berbeda dari agamanya sendiri. Hidup bertetangga mencakup aktivitas saling berinteraksi, membantu, menjaga kerukunan, dan berbagi ruang sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penganut agama lain merujuk pada tetangga yang memeluk agama berbeda dari agama yang dianut.
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Sangat Tidak Setuju - Tidak Setuju - Netral - Setuju

- Sangat Setuju

Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Alias	:	B5R13
Konsep	:	Jenis Kelamin
Definisi	:	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki..
Referensi Pemilihan	:	Laporan Akhir Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Laki-Laki - Perempuan
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-2
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Alamat Tempat Tinggal
Alias	:	B5R11
Konsep	:	Alamat
Definisi	:	Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Di Lingkungan Kementerian Sosial

Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 10
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Nama Rukun Tetangga (RT)
Alias	:	B5R11
Konsep	:	Rukun Tetangga (RT)
Definisi	:	Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. RT merupakan bagian dari pembagian wilayah di bawah Rukun Warga (RW).
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi RT 001, RT 002, RT 002, RT 004, atau RT 005
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Nama Rukun Warga (RW)
Alias	:	B5R11
Konsep	:	Rukun Warga (RW)
Definisi	:	Lembaga masyarakat yang dibentuk dari beberapa kelompok Rukun Tetangga (RT) di suatu desa atau kelurahan.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022

Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi RW 001, RW 002, RW 003, RW 004, RW 005, atau RW 006
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Nama Desa/Kelurahan
Alias	:	B5R10
Konsep	:	Desa/Kelurahan
Definisi	:	Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Surya Bahari
Aturan Validasi	:	Hanya berisi 010 - Surya Bahari
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Kecamatan
Alias	:	B5R9
Konsep	:	Kecamatan
Definisi	:	Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Pakuhaji
Aturan Validasi	:	Hanya berisi 190 - Pakuhaji
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Penghasilan per bulan
Alias	:	B5R8
Konsep	:	Penghasilan per bulan
Definisi	:	Pendapatan yang diterima selama sebulan baik yang berupa uang maupun barang/jasa dalam rupiah.
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tanpa Penghasilan - Dibawah 1 Juta - 1-3 Juta - 3-5 Juta - Diatas 5 Juta
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-5
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Pekerjaan
Alias	:	B5R7

Konsep	:	Pekerjaan
Definisi	:	Jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.
Referensi Pemilihan	:	KBBI, kbbi.web.id/kerja
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- Tidak/Belum Kerja - Ibu Rumah Tangga - Pelajar/Mahasiswa - PNS/ASN - Wiraswasta - TNI/Polri - Petani - Karyawan Swasta
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-8
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Pendidikan
Alias	:	B5R6
Konsep	:	Pendidikan
Definisi	:	usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Referensi Pemilihan	:	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Referensi Waktu	:	24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
Tipe Data	:	*String*

Klasifikasi Isian	:	- SD - SMP - SMA - D1/D2/D3 - S1 - S2 - S3
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka 1-8
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Umur/Usia
Alias	:	B5R5
Konsep	:	Umur/Usia
Definisi	:	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.
Referensi Pemilihan	:	1.https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Laporan-Riskesdas-2018-Nasional.pdf 2.https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf 3.https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html 4.https://www.abs.gov.au/statistics/standards/age-standard/2014-version-17
Referensi Waktu	:	-
Tipe Data	:	-

Klasifikasi Isian :

- 0-14 tahun
- 0-4 tahun
- 0 tahun
- 1 tahun
- 2 tahun
- 3 tahun
- 4 tahun
- 5-14 tahun
- 5-9 tahun
- 5 tahun
- 6 tahun
- 7 tahun
- 8 tahun
- 9 tahun
- 10-14 tahun
- 10 tahun
- 11 tahun
- 12 tahun
- 13 tahun
- 14 tahun
- 15-64 tahun
- 15-24 tahun
- 15-19 tahun
- 15 tahun
- 16 tahun
- 17 tahun
- 18 tahun
- 19 tahun
- 20-24 tahun
- 20 tahun
- 21 tahun
- 22 tahun
- 23 tahun
- 24 tahun
- 25-34 tahun
- 25-29 tahun
- 25 tahun
- 26 tahun
- 27 tahun
- 28 tahun
- 29 tahun
- 30-34 tahun
- 30 tahun
- 31 tahun
- 32 tahun
- 33 tahun

- 34 tahun
- 35-44 tahun
- 35-39 tahun
- 35 tahun
- 36 tahun
- 37 tahun
- 38 tahun
- 39 tahun
- 40-44 tahun
- 40 tahun
- 41 tahun
- 42 tahun
- 43 tahun
- 44 tahun
- 45-54 tahun
- 45-49 tahun
- 45 tahun
- 46 tahun
- 47 tahun
- 48 tahun
- 49 tahun
- 50-54 tahun
- 50 tahun
- 51 tahun
- 52 tahun
- 53 tahun
- 54 tahun
- 55-64 tahun
- 55-59 tahun
- 55 tahun
- 56 tahun
- 57 tahun
- 58 tahun
- 59 tahun
- 60-64 tahun
- 60 tahun
- 61 tahun
- 62 tahun
- 63 tahun
- 64 tahun
- 65+ tahun
- 65-74 tahun
- 65-69 tahun
- 65 tahun
- 66 tahun
- 67 tahun

- 68 tahun
- 69 tahun
- 70-74 tahun
- 70 tahun
- 71 tahun
- 72 tahun
- 73 tahun
- 74 tahun
- 75+ tahun
- 75-84 tahun
- 75-79 tahun
- 75 tahun
- 76 tahun
- 77 tahun
- 78 tahun
- 79 tahun
- 80-84 tahun
- 80 tahun
- 81 tahun
- 82 tahun
- 83 tahun
- 84 tahun
- 85+ tahun
- 85-94 tahun
- 85-89 tahun
- 85 tahun
- 86 tahun
- 87 tahun
- 88 tahun
- 89 tahun
- 90-94 tahun
- 90 tahun
- 91 tahun
- 92 tahun
- 93 tahun
- 94 tahun
- 95+ tahun
- 95 tahun
- 96 tahun
- 97+ tahun

Aturan Validasi : Hanya berisi angka 1-8

Akses Publikasi : Terbuka

MS-IND SURVEI TINGKAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya
Konsep	:	Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan, penghormatan, dan jaminan terhadap kebebasan beragama dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan antarumat beragama.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/ pesta/ pernikahan/ dll)
Konsep	:	Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/ pesta/ pernikahan/ dll)
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kepedulian sosial lintas agama dalam kehidupan bermasyarakat

Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia
Konsep	:	Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sikap inklusif dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip kesetaraan dalam hak politik, terutama hak untuk dipilih menjadi pemimpin tertinggi negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-

Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah
Konsep	:	Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda mau dan mampu bekerja sama membantu orang yang mengalami kesulitan, tanpa memandang perbedaan keyakinan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya

Konsep	:	Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik diterapkan di suatu wilayah atau oleh suatu institusi, tanpa diskriminasi berdasarkan agama
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/ sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb
Konsep	:	Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/ sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan warga dalam aktivitas sosial lintas agama sebagai indikator harmoni sosial, kohesi antarumat beragama, dan kualitas hidup bertetangga dalam masyarakat yang majemuk.

Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Melakukan jual beli/ transaksi dengan orang yang berbeda agama
Konsep	:	Melakukan jual beli/ transaksi dengan orang yang berbeda agama
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan sosial dan toleransi ekonomi masyarakat terhadap keberagaman agama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas ekonomi
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-

Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Kesetaraan
Konsep	:	Kesetaraan
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat kesetaraan antar umat beragama. Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hal dan kewajiban.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $D2 = \frac{(\sum j=1^{(m)} I2j)}{m;m}; = 7$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb
Konsep	:	Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb

Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur dan mempromosikan keterbukaan, toleransi, serta integrasi sosial antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat melalui partisipasi bersama dalam organisasi non-keagamaan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Konsep	:	Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat atau pemerintah menjamin dan menghormati hak semua kelompok agama dalam menyampaikan ajarannya secara terbuka, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)

Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya
Konsep	:	Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur dan memastikan pemenuhan hak konstitusional siswa dalam bidang pendidikan, khususnya hak atas pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Konsep	:	Kerukunan Umat Beragama
Definisi	:	Sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Kerukunan mengarah pada sudut pandang tidak mengganggu keselarasan yang sudah ada pada lingkungan masyarakat.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $IKS = \frac{D1 + D2 + D3}{3}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya
Konsep	:	Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk sejauh mana masyarakat dan institusi (baik pemerintah maupun swasta) menjamin hak semua warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa mempermasalahkan latar belakang agama.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan

menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)

Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj, k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Toleransi
Konsep	:	Toleransi
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $D2 = \frac{(\sum j=1^{(l)} I1J)}{l;l} = 5$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten

Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/ kelurahan tempat tinggal
Konsep	:	Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/ kelurahan tempat tinggal
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur tingkat toleransi, inklusivitas, dan kebebasan beragama di tingkat lokal, khususnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat di desa atau kelurahan.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj, k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Anak-anak berteman/ berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain
Konsep	:	Anak-anak berteman/ berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan, toleransi, dan inklusivitas sosial sejak usia dini dalam konteks kehidupan beragama

Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj, k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Dimensi Kerjasama
Konsep	:	Kerjasama
Definisi	:	Angka yang menggambarkan secara komprehensif tingkat kerjasama antar umat beragama. Kerjasama adalah tindakan saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerjasama.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $D3 = \frac{(\sum j=1^{(n)} I3J)}{n;n} = 6$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah

Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat
Konsep	:	Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat penerimaan sosial dan keterbukaan masyarakat terhadap kebebasan beragama.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/ kolega berbeda agama

Konsep	:	Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kerja sama lintas agama dalam bidang ekonomi
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya
Konsep	:	Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan tanpa diskriminasi berdasarkan agama
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis

$$Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$$

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa)
Konsep	:	Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa)
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung hak setiap warga negara, tanpa memandang agama, untuk menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah.
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten

Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Indeks Indikator Hidup bertetangga dengan penganut agama lain
Konsep	:	Hidup bertetangga dengan penganut agama lain
Definisi	:	Angka yang digunakan untuk mengukur kualitas dan intensitas hubungan sosial antarwarga yang berbeda agama dalam kehidupan bertetangga
Interpretasi	:	Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks suatu wilayah, menunjukkan semakin baik. Capaian indeks ini di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Sangat Rendah (0-19), Rendah (20-39), Sedang (40-59), Tinggi (60-79), Sangat Tinggi (80-100)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Perhitungan Matematis $Ij = \frac{\sum_{m=1}^{k} yj,k}{nmax\ x\ s}$
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

MS-KEG SURVEI PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Survei Pembangunan Pemuda Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Cara Pengumpulan Data	: Survei
Sektor Kegiatan	: Demografi Dan Kependudukan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: V-25.3603.003

PENYELENGGARA	
Instansi Penyelenggara	: Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alamat	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
Latar Belakang Kegiatan	: Kriteria pemuda dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu menyangkut batasan usia pemuda, sifat atau karakteristik pemuda, dan tujuan. Posisi pemuda yang dimaksudkan adalah mereka yang berusia 16 tahun hingga usia 29 tahun lebih atau menjelang usia 30 tahun. Tiga sudut pandang terkait pemuda menjadi pertimbangan dalam keterlibatan pada pembangunan. Pemuda menempati posisi yang sangat strategis yang mampu menciptakan hal-hal luar biasa termasuk faktor perubahan yang fundamental. Pemuda memiliki peran besar dan kontribusi aktif melalui gerakan perubahan pada kehidupan bermasyarakat. Agent of change memiliki pengaruh dalam merawat dan mengokohkan nilai-nilai baik nilai-nilai kejujuran, gotong royong, empati, keadilan. Pemuda sebagai agen perubahan melakukan berbagai tahapan kegiatan baru dan inovatif yang membutuhkan regulasi/kebijakan guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan pembangunan pemuda menjadi dasar dalam merumuskan kegiatan yang dilakukan secara inklusif, setara, dan merata di daerah perdesaan dan perkotaan. Pendekatan pembangunan pemuda memanfaatkan kebijakan pembangunan lokal. Kebijakan memiliki pendekatan teritorial dalam pembangunan yang mempertimbangkan pemanfaatan potensi pembangunan masing masing wilayah yang bersifat strategis bagi pertumbuhan daerah dan kota. Kebijakan pembangunan pemuda disertakan dengan penguatan kapasitas yang menekankan pada pemanfaatan berbagai potensi yang terdapat di daerah. Pemerintah memfokuskan pembangunan kepemudaan kepada seluruh pemuda dengan prioritas target ke arah peningkatan kualitas pemuda, baik

dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun karakter dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai keberhasilannya. Keberhasilan pembangunan pemuda diukur dengan berbagai kriteria dan metode salah satunya melalui Indeks Pembangunan Pemuda.

Tingkat pencapaian pembangunan pemuda diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Pemuda, tidak hanya bermakna bagi optimalisasi peningkatan peran atau partisipasi pemuda dalam pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki, namun juga bermakna dalam konteks penyiapan masa depan bangsa. Pembangunan pemuda sendiri dapat ditelisik melalui 3 (tiga) lapisan, yakni: (1) pembangunan individu, (2) penghidupan dan kesejahteraan, serta (3) partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kaum muda mencari keterlibatan yang bermakna dalam layanan, sistem, lembaga, dan komunitas tempat mereka terlibat. Budaya pemuda memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan antar budaya, dan mendorong partisipasi dalam platform sipil, politik dan demokrasi. Kepemimpinan pemuda menjadi bentuk partisipasi yang nyata dalam memperkuat kapasitas mereka. Media komunikasi yang mudah di akses serta minimnya akses terhadap ruang partisipasi masyarakat oleh pemuda pada usia 16-30 tahun menjadi penyebab rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Partisipasi pemuda merupakan proses pelibatan generasi muda dalam institusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan meningkatkan pendanaannya untuk organisasi masyarakat dan lembaga sipil; asosiasi nasional telah memperluas dukungan mereka terhadap inisiatif lokal; dan organisasi perantara telah memperluas pelatihan dan bantuan teknis.

Penelitian tentang kepemudaan melingkupi kebijakan pembangunan berupa model program intervensi yang menjamin pemuda serta meningkatkan kualitas kesejahteraan. Namun masih minim sekali penelitian mengenai pengembangan pemuda yang ditinjau dari perspektif kebutuhan pada setiap Kawasan Dalam sebuah daerah. Untuk itu, penelitian ini, mengisi kekosongan pengetahuan terkait pengembangan pemuda dengan basis perspektif kebutuhan pada Kawasan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menyajikan data lapangan secara empiris mengenai pengembangan pemuda setiap Kawasan pada Kabupaten Tangerang. Pengembangan pemuda ditinjau dari aspek kebijakan yang menyasar seluruh pemuda, partisipasi

pemuda dalam pembangunan serta kemampuan pemuda sebagai agen perubahan. Hal ini guna melengkapi argumentasi kebijakan terhadap capaian Indeks Pembangunan Pemuda yang ada.

Tujuan Kegiatan : Menghasilkan gambaran tingkat Pembangunan Pemuda Kabupaten Tangerang melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
2. Desain 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
3. Pengumpulan Data 24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
4. Pengolahan Data 10 Maret 2025 s.d. 16 Maret 2025
5. Analisis 17 Maret 2025 s.d. 23 Maret 2025
6. Diseminasi Hasil 24 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025
7. Evaluasi 01 April 2025 s.d. 07 April 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Rata-rata lama sekolah
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
- Angka kesakitan pemuda
- Persentase pemuda korban kejahatan
- Persentase pemuda yang merokok
- Persentase remaja perempuan yang sedang hamil
- Persentase pemuda wirausaha kerah putih
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda
- Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
- Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
- Angka perkawinan usia anak
- Persentase pemuda perempuan berusia 16 24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas
- Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sector formal

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Wawancara Mengisi kuisioner sendiri
Sarana Pengumpulan Data	:	*Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*

DESAIN SAMPEL

Jenis Rancangan Sampel	:	Multi Stage
Metode Pemilihan Sampel	:	Metode Probabilitas
Jenis Metode Sampel	:	Systematic Random Sampling
Fraksi Sampel Keseluruhan	:	Tahap 1 Sampel Rukun Tetangga (RT) f1 = n(h) x [M(hi)/M(h)] dimana: f1 : fraksi sampling Rukun Tetangga (RT) n(h) : Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang dgunakan sebagai Master Sampling Frame di starata ke-h (h = 1 untuk daerah perkotaan, h = 2 untuk daerah perdesaan) M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h M(h) : Jumlah Populasi Keluarga pada strata ke-h pada sampling frame Tahap 2 Sampel Keluarga f2 = m(hi)/M(hi) dimana: f2 : fraksi sampling Keluarga m(hi) : Jumlah Sampel Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h Fraksi Sampling Keseluruhan (f)

	f = f1 x f2
Unit Sampel	: Keluarga
Unit Observasi	: Keluarga
Jumlah Responden	: 270

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	: Tidak
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:
Supervisor/Penyelia/Pengawas	3 Orang
Pengumpul Data/Enumerator	27 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	: Kunjungan Kembali Supervisi

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data	
Penyuntingan (*Editing*)	: Tidak
Penyandian (*Coding*)	: Tidak
Data Entry	: Tidak
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Rumah Tangga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum	
Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan	
Tercetak	: 30 April 2025

Digital	: 30 April 2025
Data Mikro	: -

MS-KEG SURVEI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Cara Pengumpulan Data	: Survei
Sektor Kegiatan	: Demografi Dan Kependudukan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: V-25.3603.002

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	: Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alamat	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	: kabtangerangbappeda@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	: Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara- bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan

kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan.
Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan

secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas.

Salah satu modal dasar pembangunan yaitu sumber daya kebudayaan. Selain itu SDB juga memiliki peran penting karena Indonesia memiliki SDB yang berlimpah, dapat diperbarui, digunakan kembali, dan didaur ulang (renewable, reuse, and recycle). Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai strategi pembangunan daerah juga menjadi salah satu program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang. IPK merupakan alat ukur capaian pembangunan wilayah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memajukan wilayah secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Kegiatan : Menghasilkan gambaran tingkat Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
2. Desain 02 Januari 2025 s.d. 23 Februari 2025
3. Pengumpulan Data 24 Februari 2025 s.d. 09 Maret 2025
4. Pengolahan Data 10 Maret 2025 s.d. 16 Maret 2025
5. Analisis 17 Maret 2025 s.d. 23 Maret 2025
6. Diseminasi Hasil 24 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025
7. Evaluasi 01 April 2025 s.d. 07 April 2025

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data : *Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, Kabupaten Tangerang
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Wawancara Mengisi kuisioner sendiri
Sarana Pengumpulan Data	:	*Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Dimensi Ekonomi Budaya - Dimensi Pendidikan - Dimensi Ketahanan Sosial Budaya - Dimensi Warisan Budaya - Dimensi Ekspresi Budaya - Dimensi Literasi Budaya - Dimensi Gender

DESAIN SAMPEL

Jenis Rancangan Sampel	:	Multi Stage
Metode Pemilihan Sampel	:	Metode Probabilitas
Jenis Metode Sampel	:	Systematic Random Sampling
Fraksi Sampel Keseluruhan		Tahap 1 Sampel Rukun Tetangga (RT) f1 = n(h) x [M(hi)/M(h)] dimana: f1 : fraksi sampling Rukun Tetangga (RT) n(h) : Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang dgunakan sebagai Master Sampling Frame di starata ke-h (h = 1 untuk daerah perkotaan, h = 2 untuk daerah perdesaan) M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i : strata ke-h M(h) : Jumlah Populasi Keluarga pada strata ke-h pada sampling frame Tahap 2 Sampel Keluarga f2 = m(hi)/M(hi) dimana: f2 : fraksi sampling Keluarga m(hi) : Jumlah Sampel Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h

	M(hi) : Jumlah Populasi Keluarga pada Rukun Tetangga (RT) i strata ke-h Fraksi Sampling Keseluruhan (f) f = f1 x f2
Unit Sampel	: Keluarga
Unit Observasi	: Keluarga
Jumlah Responden	: 270

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	: Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	: Supervisi Kunjungan Kembali
Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	: Tidak
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	: SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:
Supervisor/Penyelia/Pengawas	3 Orang
Pengumpul Data/Enumerator	27 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	: Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data	
Penyuntingan (*Editing*)	: Tidak
Penyandian (*Coding*)	: Tidak
Data Entry	: Tidak
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Rumah Tangga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak : Ya

Digital : Ya

Data Mikro : Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak : 30 April 2025

Digital : 30 April 2025

Data Mikro : -

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pendidikan Dan Pelatihan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Gedung Lingkup Pekerjaan Umum Jl. M. Atik Soewardi, Kadu Agung, Tigaraksa
Email	:	kesbangpolkabtng@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Alamat	:	Gedung Lingkup Pekerjaan Umum Jl. M. Atik Soewardi, Kadu Agung, Tigaraksa
Email	:	kesbangpolkabtng@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	-
Tujuan Kegiatan	:	-
Rencana Jadwal Kegiatan	:	
1. Perencanaan Kegiatan		03 Februari 2025 s.d. 27 Februari 2025

2.	Desain	03 Februari 2025 s.d. 27 Februari 2025
3.	Pengumpulan Data	01 Maret 2025 s.d. 30 April 2025
4.	Pengolahan Data	01 Maret 2025 s.d. 30 April 2025
5.	Analisis	01 April 2025 s.d. 30 April 2025
6.	Diseminasi Hasil	01 Mei 2025 s.d. 17 Mei 2025
7.	Evaluasi	17 Mei 2025 s.d. 24 Mei 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
- Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
- Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
- Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah menurut Partai Politik
- Nama LSM, Ormas yang terdaftar
- Pembinaan LSM dan ORMAS

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Individu Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Ya
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S-I/S-II/ S-III
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2025
Digital	:	31 Mei 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Variabel	:	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
Alias	:	Tabel 3.18.2
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah kegiatan dan jenis kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
Alias	:	Tabel 3.18.2
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Alias	:	Tabel 3.18.3
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya Kegiatan pembinaan dan pendidikan politik menurut partai politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Alias	:	Tabel 3.18.3
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol

Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah menurut Partai Politik
Alias	:	Tabel 3.18.4
Konsep	:	Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah
Definisi	:	Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama LSM, Ormas yang terdaftar
Alias	:	Tabel 3.18.5
Konsep	:	LSM dan ORMAS
Definisi	:	Nama-nama LSM dan ORMAS merupakan nama yang terdaftar di Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan dilaksanakannya setiap tahunnya. Nama-nama LSM dan ORMAS yang dimaksud adalah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Bakesbangpol.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Pembinaan LSM dan ORMAS
Alias	:	Tabel 3.18.6
Konsep	:	LSM dan ORMAS
Definisi	:	Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS merupakan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan dilaksanakannya setiap tahunnya. LSM dan ORMAS yang dimaksud adalah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Bakesbangpol.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka

Akses Publikasi : Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Variabel : Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan

Konsep : Kegiatan Pembinaan politik daerah

Definisi : Banyaknya jumlah kegiatan dan jenis kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Kegiatan

Nama Variabel : Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan

Konsep : Peserta Kegiatan Pembinaan politik daerah

Definisi : Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik

Konsep : Kegiatan Pembinaan politik daerah

Definisi	:	Banyaknya Kegiatan pembinaan dan pendidikan politik menurut partai politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah menurut Partai Politik
Konsep	:	Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah
Definisi	:	Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Pembinaan LSM dan ORMAS
Konsep	:	LSM dan ORMAS
Definisi	:	Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS merupakan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan dilaksanakannya setiap tahunnya. LSM dan ORMAS yang dimaksud adalah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Bakesbangpol.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jalan raya Curug Km.2 Curug Tangerang
Email	:	bpbd.kabtng@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Alamat	:	Jalan raya Curug Km.2 Curug Tangerang
Email	:	bpbd.kabtng@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		

Latar Belakang Kegiatan : -

Tujuan Kegiatan : -

Rencana Jadwal Kegiatan :

8. Perencanaan Kegiatan 03 Februari 2025 s.d. 27 Februari 2025
9. Desain 03 Februari 2025 s.d. 27 Februari 2025
10. Pengumpulan Data 01 Maret 2025 s.d. 30 April 2025
11. Pengolahan Data 01 Maret 2025 s.d. 30 April 2025
12. Analisis 01 April 2025 s.d. 30 April 2025
13. Diseminasi Hasil 01 Mei 2025 s.d. 17 Mei 2025
14. Evaluasi 17 Mei 2025 s.d. 24 Mei 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya
- Jumlah Bencana Non Alam Menurut Jenisnya
- Jumlah Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, Kelompok Usia, Dan Jenis Kelamin
- Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
- Jumlah Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
- Jumlah Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam
- Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
- Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Menurut Jenisnya
- Jumlah Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
- Jumlah Personil ASN dan Non ASN Berdasarkan Pos Pembantu

- Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencan
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Menurut Jenis, Kondisi dan Pos Pemadam
- Jumlah Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
- Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk
- Jumlah Sistem Peringatan Dini Yang Sudah Terintegrasi
- Jumlah Relawan Bencana
- Jumlah Kegiatan Pembinaan Bencana
- Jumlah Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
- Potensi Luas Bahaya Menurut Jenis Bencana

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Individu Lainnya (BPBD Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi

Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Ya
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S-I/S-II/ S-III
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		3 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		10 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2025
Digital	:	31 Mei 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.15.2 dan 3.15.3
Konsep	:	Bencana Alam
Definisi	:	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Non Alam Menurut Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.15.4 dan 3.15.5
Konsep	:	Bencana Non Alam
Definisi	:	Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, Kelompok Usia, Dan Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.15.6
Konsep	:	Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam
Definisi	:	Korban manusia adalah orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Alias	:	Tabel 3.15.9
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Korban yang seharusnya di prioritaskan di evakuasi tanggap darurat lengkap
Referensi Pemilihan	:	UU No.29 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Alias	:	Tabel 3.15.9
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan
Referensi Pemilihan	:	UU No.29 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam
Alias	:	Tabel 3.15.10 dan 3.15.11
Konsep	:	Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam
Definisi	:	Jumlah Rumah Rusak adalah banyaknya rumah rusak yang diakibatkan oleh bencana alam
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Alias	:	Tabel 3.15.12
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Definisi	:	Wilayah Menajemen Kebakaran (WMK) adalah sistem penataan dini dalam rangka mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran sehingga kerugian berupa material dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan
Referensi Pemilihan	:	UU No. 28 Thn 2002
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Alias	:	Tabel 3.15.12
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Definisi	:	Jumlah umlah kejadian wilayah menegament minimal 15 menit Sesuai dengan Pencapaian Setandar Pelayanan Minimum (SPM). Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Referensi Pemilihan	:	UU No. 28 Thn 2002
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Menurut Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.15.13
Konsep	:	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Jumlah kendaraan oprasional pemadam kebakaran dan jenisnya yang terdiri dari 12 pos dan berbagaimacam jenisnya diantara lain kendaraan bermotor dan kendaraan mobil pemadam atau yang di sebut sebagai fire truck
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Alias	:	Tabel 3.15.14
Konsep	:	Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Definisi	:	Retribusi alat proteksi kebakaran adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Referensi Pemilihan	:	UU 28 Tahun 2009

Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	- Target Pendapatan - Realisasi Pendapatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Personil ASN dan Non ASN Berdasarkan Pos Pembantu
Alias	:	Tabel 3.15.15
Konsep	:	Personil ASN dan Non ASN
Definisi	:	Personil ASN dan Non ASN di 12 Pos Pemadam Kebakaran Tersebar di masing masing Kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan umpeg No.26 thn 2020
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Pos Pembantu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.17 dan 3.15.18
Konsep	:	Kawasan Rawan Bencana
Definisi	:	Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam
Referensi Pemilihan	:	UU No.21 2008
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Menurut Jenis, Kondisi dan Pos Pemadam
Alias	:	Tabel 3.15.19
Konsep	:	Mobil Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Mobil pemadam adalah perlengkapan yang vital bagi petugas pemadam kebakaran dalam bertugas melakukan pemadaman kebakaran. - Foam Tender Truck. Mobil pemadam kebakaran ini khusus untuk menyemprotkan busa atau foam. - Pump Truck. Truck pemadam ini dikhususkan untuk membawa pompa sekaligus mengambil air yang ada di lokasi kebakaran. - Turntable Tender And Snorkle.
Referensi Pemilihan	:	UU No.22 Thn 2009
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Alias	:	Tabel 3.15.19
Konsep	:	Pos Pembantu Pemadam Kebakara
Definisi	:	Pos Pemadam kebakaran adalah salah satu bentuk tempat masyarakat untuk melaporkan bencana

		kebarakan yang ada sehingga bencana ini langsung bisa teratasi dan tidak menimbulkan kerugian yang banyak
Referensi Pemilihan	:	UU No.23 Thn 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Alias	:	Tabel 3.15.20
Konsep	:	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Definisi	:	Destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan
Referensi Pemilihan	:	Perka BNPB No.1 Thn 2012
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sistem Peringatan Dini Yang Sudah Terintegrasi
Alias	:	Tabel 3.15.21
Konsep	:	Sistem Peringatan Dini
Definisi	:	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan

akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

Referensi Pemilihan	:	Peraturan BNPB NO.4 thn 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Relawan Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.22
Konsep	:	Relawan Bencana
Definisi	:	Relawan Penanggulangan Bencana merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.22
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan Bencana
Definisi	:	Pembinaan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Alias	:	Tabel 3.15.23
Konsep	:	Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Definisi	:	Pembinaan Satuan Pendidikan sekolah tentang bencana
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Potensi Luas Bahaya Menurut Jenis Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.24
Konsep	:	Potensi Luas Bahaya
Definisi	:	Potensi Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Mustahil untuk mengetahui semua bahaya yang ada
Referensi Pemilihan	:	UU No.29 Thn 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya
Konsep	:	Bencana Alam
Definisi	:	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Bencana

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Non Alam Menurut Jenisnya
Konsep	:	Bencana Non Alam
Definisi	:	Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Bencana

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, Kelompok Usia, Dan Jenis Kelamin
Konsep	:	Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam
Definisi	:	Korban manusia adalah orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan, jenis bencana alam, kelompok usia, dan jenis kelamin
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Korban yang seharusnya di prioritaskan di evakuasi tanggap darurat lengkap
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam
Konsep	:	Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam
Definisi	:	Jumlah Rumah Rusak adalah banyaknya rumah rusak yang diakibatkan oleh bencana alam
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis bencana alam
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Definisi	:	Wilayah Menajemen Kebakaran (WMK) adalah sistem penataan dini dalam rangka mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran sehingga kerugian berupa material dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Definisi	:	Jumlah umlah kejadian wilayah menegament minimal 15 menit Sesuai dengan Pencapaian Setandar Pelayanan

		Minimum (SPM). Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Menurut Jenisnya
Konsep	:	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Jumlah kendaraan oprasional pemadam kebakaran dan jenisnya yang terdiri dari 12 pos dan berbagaimacam jenisnya diantara lain kendaraan bermotor dan kendaraan mobil pemadam atau yang di sebut sebagai fire truck
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis kendaraan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Konsep	:	Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Definisi	:	Retribusi alat proteksi kebakaran adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	- Target Pendapatan - Realisasi Pendapatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Personil ASN dan Non ASN Berdasarkan Pos Pembantu
Konsep	:	Personil ASN dan Non ASN
Definisi	:	Personil ASN dan Non ASN di 12 Pos Pemadam Kebakaran Tersebar di masing masing Kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Pos Pembantu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana
Konsep	:	Kawasan Rawan Bencana
Definisi	:	Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kawasan

Nama Variabel	:	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran
Konsep	:	Mobil Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Mobil pemadam adalah perlengkapan yang vital bagi petugas pemadam kebakaran dalam bertugas melakukan pemadaman kebakaran.

- Foam Tender Truck. Mobil pemadam kebakaran ini khusus untuk menyemprotkan busa atau foam.
- Pump Truck. Truck pemadam ini dikhususkan untuk membawa pompa sekaligus mengambil air yang ada di lokasi kebakaran.

Turntable Tender And Snorkle.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Konsep	:	Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Pos Pemadam kebakaran adalah salah satu bentuk tempat masyarakat untuk melaporkan bencana kebarakan yang ada sehingga bencana ini langsung bisa teratasi dan tidak menimbulkan kerugian yang banyak
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pos

Nama Variabel	:	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Konsep	:	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Definisi	:	Destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pos

Nama Variabel	:	Jumlah Sistem Peringatan Dini Yang Sudah Terintegrasi
Konsep	:	Sistem Peringatan Dini
Definisi	:	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan

akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Sistem

Nama Variabel	:	Jumlah Relawan Bencana
Konsep	:	Relawan Bencana
Definisi	:	Relawan Penanggulangan Bencana merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Bencana
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan Bencana
Definisi	:	Pembinaan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Jumlah Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Konsep	:	Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Definisi	:	Pembinaan Satuan Pendidikan sekolah tentang bencana
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Potensi Luas Bahaya Menurut Jenis Bencana
Konsep	:	Potensi Luas Bahaya
Definisi	:	Potensi Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Mustahil untuk mengetahui semua bahaya yang ada
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Luas

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Kesehatan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan	:	Kesehatan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	K-002.2021

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Abdul Hamid
Email	:	officialdinkestangerangkab@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Alamat	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa, Jl. H. Abdul Hamid No.rt.2, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	officialdinkestangerangkab@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Mengkompilasi dan memvalidasi serta melengkapi data-data program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disajikan sebagai produk publikasi untuk memenuhi keterbukaan informasi publik dinas kesehatan dalam bentuk Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Tujuan Kegiatan	:	Disusunnya buku Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2023. Dimaksudkan agar pembaca dapat memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan khususnya mengenai derajat kesehatan serta capaian kinerja masing-masing program kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Rencana Jadwal Kegiatan	:	
15. Perencanaan Kegiatan		02 Januari 2025 s.d. 31 Januari 2025
16. Desain		03 Februari 2025 s.d. 06 Februari 2025
17. Pengumpulan Data		07 Februari 2025 s.d. 28 Februari 2025
18. Pengolahan Data		03 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025
19. Analisis		01 April 2025 s.d. 24 Mei 2025
20. Diseminasi Hasil		26 Mei 2025 s.d. 13 Juni 2025
21. Evaluasi		16 Juni 2025 s.d. 23 Juni 2025
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	1. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang 2. Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I 3. Jumlah dan Persentase Posyandu Pratama 4. Jumlah dan Persentase Posyandu Madya 5. Jumlah dan Persentase Posyandu Purnama 6. Jumlah dan Persentase Posyandu Mandiri 7. Jumlah dan Persentase Posyandu Aktif* 8. Jumlah Posbindu PTM** 9. Jumlah dokter Spesialis menurut Unit Kerja 10. Jumlah dokter Umum menurut Unit Kerja 11. Jumlah dokter gigi Umum menurut Unit Kerja 12. Jumlah dokter gigi Spesialis menurut Unit Kerja 13. Jumlah Lahir hidup Menurut jenis Kelamin, kecamatan dan puskesmas 14. Jumlah Kematian Bayi Menurut Penyebab Utama, Kecamatan, Dan Puskesmas

15. Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Utama, Kecamatan, Dan Puskesmas
16. Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama, Kecamatan, Dan Puskesmas
17. Jumlah Ibu Hamil Menurut Kecamatan dan Puskesmas
18. Jumlah Ibu Bersalin/Nifas Menurut Kecamatan dan Puskesmas
19. Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant) menurut Kecamatan dan Puskesmas
20. Jumlah Balita Usia 12-59 Bulan Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas, dan Kecamatan
21. Cakupan Pelayanan kesehatan balita
22. Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
23. Jumlah dan Persentase Balita Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
24. Jumlah Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan
25. Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
26. Jumlah Penderita Tuberkulosis Pada Anak Usia 0-14 Tahun Menurut Kecamatan dan Puskesmas
27. Jumlah Penderita Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar Dan Diobati*) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
28. Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati*) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
29. Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
30. Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
31. Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/Sr) Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
32. Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas

33. Jumlah temuan kasus HIV/AIDS
34. Jumlah Kematian Kasus HIV/AIDS
35. Jumlah Kasus AFP (Non Polio) Menurut Kecamatan dan Puskesmas
36. Jumlah Penderita dan Kematian Pada KLB Menurut Jenis Kejadian
37. Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa yang Ditangani <24 jam Menurut Kecamatan dan Puskesmas
38. Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
39. Jumlah Kasus Positif Pada Penyakit Malaria Menurut Jenis kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
40. Jumlah dan Persentase Pasien yang Mendapatkan pengobatan Standard Pada Penyakit Malaria Menurut Kecamatan dan Puskesmas
41. Jumlah puskesmas menurut jenisnya dan kecamatan
42. Jumlah Pos Kesehatan Desa menurut kecamatan
43. Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya menurut jenisnya
44. Jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian menurut jenisnya
45. Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan menurut puskesmas
46. Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap menurut puskesmas
47. Jumlah kunjungan pasien baru gangguan jiwa menurut puskesmas
48. Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan menurut Rumah Sakit
49. Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap menurut Rumah Sakit
50. Jumlah kunjungan pasien baru gangguan jiwa menurut rumah sakit
51. Jumlah tempat tidur menurut Rumah Sakit
52. Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
53. Jumlah Pasien Keluar Mati menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang

54. Jumlah Pasien Keluar Mati > 48 jam dirawat menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
55. Jumlah Gross Death Rate menurut Rumah Sakit
56. Jumlah Net Death Rate menurut Rumah Sakit
57. Jumlah Hari Perawatan menurut Rumah Sakit
58. Jumlah Lama dirawat menurut Rumah Sakit
59. BTO (Bed Turn Over) menurut Rumah Sakit
60. BOR (Bed Occupancy Rate) menurut Rumah Sakit
61. TOI (Turn Over Interval) menurut Rumah Sakit
62. ALOS (Average Length of Stay) menurut Rumah Sakit
63. Jumlah Tenaga Keperawatan menurut Unit Kerja
64. Jumlah Bidan menurut Unit Kerja
65. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat menurut Unit Kerja
66. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Unit Kerja
67. Jumlah Tenaga Gizi menurut Unit Kerja
68. Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan menurut Unit Kerja
69. Jumlah Nutrisionis menurut Unit Kerja
70. Jumlah Dietisien menurut Unit Kerja
71. Jumlah Psikologi Klinis menurut Unit Kerja
72. Jumlah Epidemiologi Kesehatan menurut Unit Kerja
73. Jumlah Entomolog menurut Unit Kerja
74. Jumlah Mikrobiolog Kesehatan menurut Unit Kerja
75. Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut Unit Kerja
76. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya menurut Unit Kerja
77. Jumlah Keterapian Fisik menurut Unit Kerja
78. Jumlah Keteknisan Medis menurut Unit Kerja
79. Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Menurut Unit Kerja
80. Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja Menurut Unit Kerja
81. Jumlah Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Menurut Unit Kerja
82. Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Menurut Unit Kerja
83. Jumlah Tenaga Kefarmasian Menurut Unit Kerja

84. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Menurut Unit Kerja
85. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Menurut Unit Kerja
86. Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Menurut Unit Kerja
87. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Segmen Kepesertaan
88. Alokasi Anggaran Kesehatan Menurut Sumber Biaya
89. Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
90. Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab, Kecamatan, Dan Puskesmas
91. Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah Menurut Kecamatan dan Puskesmas
92. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
93. Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
94. Jumlah Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
95. Jumlah Bayi Menurut Kecamatan dan puskesmas
96. Jumlah SD/MI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dan Sikat Gigi Massal Menurut Kecamatan dan Puskesmas
97. Jumlah Murid SD/MI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Kecamatan dan Puskesmas
98. Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-59 Tahun) Berisiko Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
99. Jumlah Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
100. Jumlah Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
101. Jumlah Kasus Kematian Balita Akibat Pneumonia
102. Jumlah Penderita Batuk Bukan Pneumonia Menurut Kecamatan dan Puskesmas

103. Jumlah Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
104. Jumlah Kasus Baru Kusta Menurut Tingkat Kecacatannya, Kecamatan, dan Puskesmas
105. Jumlah Penderita Kusta Anak (<15 Tahun) Menurut Kecamatan, dan Puskesmas
106. Jumlah Kasus Terdaftar Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis, Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
107. Jumlah Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/Rft) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
108. Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah (PD3i) Pada Penyakit Difteri Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
109. Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah (PD3i) Pada Penyakit Pertusis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
110. Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah (PD3i) Pada Penyakit Tetanus Neonatorum Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
111. Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah (PD3i) Pada Penyakit Hepatitis B Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
112. Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah (PD3i) Pada Penyakit Campak Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
113. Jumlah Penderita Campak
114. Jumlah Kasus Kematian Akibat Campak
115. Jumlah IR DBD < 10 per 100.000 penduduk
116. Jumlah Kasus Suspek dan Konfirmasi Laboratorium Pada penyakit Malaria Menurut Kecamatan dan Puskesmas
117. Jumlah Ibu Hamil Anemia
118. Jumlah Balita Gizi Kurang Yang Mendapat Makanan Tambahan
119. Jumlah Bayi < 6 bulan dengan Gizi Buruk
120. Jumlah Klinik yang terintegrasi
121. Jumlah Kasus Meninggal dan CFR Pada Penyakit Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas

122. Jumlah Penderita Kronis Filariasis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
123. Jumlah Sarana Air Minum Menurut Kecamatan dan Puskesmas
124. Jumlah Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Jenis Jamban, Kecamatan, Dan Puskesmas
125. Jumlah ibu Hamil dengan Lila<23,5 cm Menurut Kecamatan dan Puskesmas
126. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
127. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
128. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap
129. Rasio posyandu per satuan balita
130. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
131. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
132. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
133. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
134. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
135. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
136. Cakupan Imunisasi Dpt-Hb-Hib 3 Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
137. Cakupan Imunisasi Polio 4* Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
138. Cakupan Imunisasi Campak/Mr Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
139. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
140. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
141. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
142. Penderita diare yang ditangani
143. Angka kejadian malaria

144. Cakupan kunjungan bayi
145. Cakupan puskesmas
146. Cakupan pembantu puskesmas
147. Persentase balita gizi buruk
148. Cakupan pelayanan nifas
149. Cakupan pelayanan anak balita
150. Indeks Kesehatan
151. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
152. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
153. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
154. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
155. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
156. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
157. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
158. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
159. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
160. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
161. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
162. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
163. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
164. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
165. Prevalensi stunting
166. Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)
167. Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil Menurut Kecamatan dan Puskesmas

168. Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin/Nifas Menurut Kecamatan dan Puskesmas
169. Ibu Hamil Penderita Kek (Kekurangan Energi Kronis) Menurut Kecamatan dan Puskesmas
170. Ibu Hamil Penderita Kurang Darah Menurut Kecamatan dan Puskesmas
171. Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
172. Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
173. Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas
174. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
175. Cakupan Imunisasi Hepatitis B0 (0 -7 Hari) Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
176. Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
177. Cakupan Imunisasi Dpt-Hb-Hib4 Pada Baduta Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
178. Cakupan Imunisasi Polio 4* Pada Baduta Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
179. Cakupan Imunisasi Campak/Mr2 Pada Baduta Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
180. Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
181. Status Gizi Balita Underweight menurut Indeks Bb/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
182. Jumlah dan Persentase Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
183. Jumlah dan Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas

184. Jumlah dan Persentase Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
185. Jumlah dan Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
186. Jumlah dan Persentase Balita Normal Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
187. Jumlah dan Persentase Balita Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
188. Status Gizi Balita Wasting menurut Indeks Bb/Tb,Kecamatan Dan Puskesmas
189. Jumlah dan Persentase Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
190. Jumlah dan Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
191. Jumlah dan Persentase Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
192. Kasus Kematian Balita Akibat Gizi Buruk Menurut Kecamatan dan Puskesmas
193. Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik Usia Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
194. Cakupan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenjang Sekolah, Kecamatan Dan Puskesmas
195. Rasio Tumpatan/Pencabutan Pada Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
196. Persentase Kasus dirujuk Pada Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
197. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Menurut Jenis Kegiatan dan Puskesmas
198. Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
199. Persentase Sarana Air Minum Yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar

200. Persentase Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menurut Kategori, Kecamatan, dan Puskesmas
201. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan pada sarana Pendidikan Tingkat SD/MI menurut Kecamatan dan Puskesmas
202. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan pada sarana Pendidikan Tingkat SMP/MTS menurut Kecamatan dan Puskesmas
203. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan pada sarana Pendidikan Tingkat SD dan SMP menurut Kecamatan dan Puskesmas
204. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan pada sarana Kesehatan Puskesmas
205. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan pada sarana Pasar
206. Persentase Seluruh Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas
207. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Jasa Boga yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas
208. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Jasa Rumah Makan/Restaurant yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas
209. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Jasa Depot Air Minum (DAM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas
210. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Makanan Jajanan/Kantin/Sentra Makanan Jajanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas
211. Persentase Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas

212. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
213. Cakupan Desa Siaga Aktif
214. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
215. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk
216. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
217. Rasio dokter per satuan penduduk
218. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan
219. Persentase keluarga dengan akses jamban sehat
220. Prevalensi anemia ibu hamil
221. Prevalensi balita gizi kurang
222. Presentase anemia ibu hamil
223. Presentase balita malnutrisi
224. Persentase Screening pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV
225. Persentase Pengendalian Penyakit Menular
226. Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi
227. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
228. Pelayanan kesehatan ibu hamil
229. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
230. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
231. Pelayanan kesehatan balita
232. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
233. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
234. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
235. Pelayan kesehatan ODGJ
236. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis
237. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
238. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas
239. Persentase alat kesehatan memenuhi standar
240. Persentase Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan
241. Persentase Balita Wasting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan

242. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
243. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
244. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Hamil
245. Persentase Logistik pelayanan kesehatan ODGJ Berat
246. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC
247. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
248. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi
249. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV
250. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar
251. Persentase Logistik pelayanan kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas
252. Persentase Logistik Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun
253. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial
254. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi
255. Persentase SDM Kesehatan yang melakukan Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun
256. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Balita
257. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
258. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
259. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
260. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ODGJ Berat
261. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC
262. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

263. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi
264. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV
265. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar
266. Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun ke atas
267. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
268. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
269. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
270. Persentase P-IRT yang sesuai standar
271. Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar
272. Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan
273. Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga
274. Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri
275. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Tertentu yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas
276. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada Rumah Makan yang Memenuhi Syarat Kesehatan menurut Kecamatan dan Puskesmas

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia

Wilayah Kegiatan

Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/kota	:	Tangerang

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
Unit Pengumpulan Data	:	Individu Lainnya : Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik, Apotek

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Ya
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S-I/S-II/ S-III
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		3 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Ya
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu Lainnya: Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik, Apotek
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Tidak
Digital	:	Ya

Data Mikro : Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak : -

Digital : 17 Agustus 2025

Data Mikro : -

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel : Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang

Alias : -

Konsep : Rumah Sakit

Definisi : Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Referensi Pemilihan : Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024

Referensi Waktu : 2024

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : Diklasifikasikan menurut :

- Kecamatan
- Tipe Rumah Sakit
  - Rumah Sakit Tipe A
  - Rumah Sakit Tipe B
  - Rumah Sakit Tipe C
  - Rumah Sakit Tipe D
- Jenis Rumah Sakit
  - Rumah Sakit Umum
  - Rumah Sakit Khusus

Aturan Validasi : Harus Berisi Angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I
Alias	:	-
Konsep	:	Rumah Sakit, Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1
Definisi	:	Ketentuan umum pelayanan gawat darurat level 1 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Jenis Rumah Sakit : - Rumah Sakit Umum - Rumah Sakit Khusus
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya menurut jenisnya
Alias	:	-
Konsep	:	Sarana Pelayanan Kesehatan, Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan
Definisi	:	Sarana Pelayanan Kesehatan selain Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Sarana Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari: - Klinik Pratama - Klinik Utama - Tempat Praktik Mandiri Dokter - Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi - Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis - Tempat Praktik Mandiri Bidan

- Tempat Praktk Mandiri Perawat
- Griya Sehat
- Panti Sehat
- Unit Transfusi Darah
- Laboratorium Kesehatan

Klasifikasi Menurut Kepemilikan :
- Kemenkes
- Pem. Prov
- Pem Kab/Kota
- TNI/POLRI
- BUMN
- Swasta
- Organisasi Masyarakat

Aturan Validasi : Harus Berisi Angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian menurut jenisnya

Alias : -

Konsep : Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA), Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOt/UMOT), Produksi Alat Kesehatan, Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan (Alkes)

Definisi : Pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan

Referensi Pemilihan : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009

Referensi Waktu : 2024

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : Sarana produksi dan distribusi kefarmasian terdiri dari :
- Industri Farmasi
- Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA)
- Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)
- Produksi Alat Kesehatan

- Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
- Industri Kosmetika
- Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- Apotek
- Toko Obat
- Toko Alkes

Klasifikasi Menurut Kepemilikan :
- Kemenkes
- Pem. Prov
- Pem Kab/Kota
- TNI/POLRI
- BUMN
- Swasta
- Organisasi Masyarakat

Aturan Validasi : Harus Berisi Angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Jumlah Puskesmas menurut jenisnya dan kecamatan

Alias : -

Konsep : Puskesmas

Definisi : Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya

Referensi Pemilihan : Permenkes No. 43 Tahun 2019

Referensi Waktu : 2024

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : Terdiri dari :
- Puskesmas Non Rawat Inap
- Puskesmas Rawat Inap
- Puskesmas Pembantu
- Puskesmas Keliling

Klasifikasi Menurut Kepemilikan :
- Kemenkes
- Pem. Prov
- Pem Kab/Kota
- TNI/POLRI

- BUMN
- Swasta
- Organisasi Masyarakat

Aturan Validasi : Harus Berisi Angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan menurut puskesmas

Alias : -

Konsep : Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan

Definisi : Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. Kunjungan rawat jalan puskesmas termasuk kunjungan ke jaringan puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung (puskesmas keliling, puskemas pembantu, bidan desa, pemeriksaan anak sekolah, dsb).

Referensi Pemilihan : Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024

Referensi Waktu : 2024

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)

Aturan Validasi : Harus Berisi Angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap menurut puskesmas

Alias : Tabel 3.9.6 kolom 6-8, 15-17, 24-26

Konsep : Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap

Definisi : Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan

		kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru gangguan jiwa menurut puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa
Definisi	:	Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan menurut Rumah Sakit
Alias	:	-
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan

Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap menurut Rumah Sakit
Alias	:	-
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru gangguan jiwa menurut rumah sakit
Alias	:	-
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa
Definisi	:	Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I
Alias	:	-
Konsep	:	Rumah Sakit, Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1
Definisi	:	Ketentuan umum pelayanan gawat darurat level 1 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Jenis Rumah Sakit, yakn Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah tempat tidur menurut Rumah Sakit

Alias	:	-
Konsep	:	Tempat Tidur Rumah Sakit
Definisi	:	Tempat tidur yang berada di ruang rawat inap dan ruang pasca persalinan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Pasien Keluar Hidup, Pasien Keluar Mati
Definisi	:	Seluruh Pasien yang keluar dalam keadaan hidup dan keluar mati setelah kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam dirawat.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Pasien Keluar Mati

Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat kurang dari 48 jam
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati > 48 jam dirawat menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Pasien Keluar Mati Lebih dari 48 jam dirawat
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat lebih dari 48 jam
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Hari Perawatan Menurut Rumah Sakit
Alias	:	-
Konsep	:	Hari Perawatan
Definisi	:	Total hari rawat dari semua pasien yang dirawat selama satu tahun
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024

Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lama dirawat menurut Rumah Sakit
Alias	:	-
Konsep	:	Lama Dirawat
Definisi	:	Total lama dirawat dari pasien sejak masuk sampai pulang, selama satu tahun
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Alias	:	-
Konsep	:	Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Definisi	:	Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB

		Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Pratama
Alias	:	-
Konsep	:	Posyandu Pratama
Definisi	:	Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Madya
Alias	:	-
Konsep	:	Posyandu Madya
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan Pengelolaan Posyandu rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Purnama
Alias	:	-
Konsep	:	Posyandu Purnama
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Mandiri
Alias	:	-
Konsep	:	Posyandu Mandiri

Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posbindu PTM**
Alias	:	-
Konsep	:	Posbindu PTM
Definisi	:	Upaya kesehatan berbasis bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	-
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter gigi Umum menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Dokter Gigi
Definisi	:	Dokter Gigi adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter gigi Spesialis menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Dokter Gigi Spesialis
Definisi	:	Dokter Gigi Spesialis adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter Spesialis menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Dokter Spesialias
Definisi	:	Dokter Spesialis adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter Umum menurut Unit Kerja
Alias	:	
Konsep	:	Dokter Umum
Definisi	:	Dokter Umum adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Keperawatan menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Keperawatan
Definisi	:	Tenaga Kesehatan yang bekerja sebagai perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 38 tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bidan menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Bidan
Definisi	:	Tenaga kesehatan yang bekerja sebagai bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Masyarakat
Definisi	:	Tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Lingkungan
Definisi	:	Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Gizi menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Gizi
Definisi	:	Tenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutririonis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keteknisan Medis menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Keteknisian Medis
Definisi	:	Tenaga keteknisian medis adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keteknisian medis yang terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi (perawat anastesi), terapis gigi dan mulut (perawat gigi), dan audiologis.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan

Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
Definisi	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya
Definisi	:	Tenaga teknik biomedika lainnya adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri dari radiografer, elektromedis, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keterapian Fisik menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Keterapian Fisik
Definisi	:	Tenaga keterapian fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kefarmasian Menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kefarmasian
Definisi	:	Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan

Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Menurut Unit Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan
Definisi	:	– Tenaga penunjang/pendukung kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen. – Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. – Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya. – Tenaga dukungan manajemen Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, staf penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, dan tenaga penunjang kesehatan lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut: - Unit Kerja • Rumah Sakit • Puskesmas - Jenis Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan • Pejabat Struktural • Tenaga Pendidik • Tenaga Dukungan Manajemen
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Kelahiran, Jenis Kelamin, Lahir Hidup, Lahir Mati, Lahir Hidup dan Mati, Angka Lahir Mati per 1000 Kelahiran yang dilaporkan
Definisi	:	Banyaknya jumlah kelahiran bayi dalam periode satu tahun tertentu. Kelahiran bisa berupa lahir hidup maupun lahir mati. Lahir Hidup adalah Suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot. Lahir Mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas, Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Kematian Ibu Kelompok Umur, Jenis Kematian Ibu
Definisi	:	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas, Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Risiko Lebih : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score lebih dari +1 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks B**B**/U
Definisi	:	Penjumlahan Balita Berat Badan Kurang dengan Jumlah Balita Berat Badan sangat kurang Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD, Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat

		Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD, Z score : Nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Balita Ditimbang
Definisi	:	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan penimbangan berat badan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U

Definisi	:	Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-

Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Normal : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score mulai dari +1 sampai dengan -2 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Sangat Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Tinggi Normal Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score -2 SD sampai dengan +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score lebih dari +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah balita gizi buruk
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/TB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan
Referensi Waktu	:	Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas dan Kecamatan

Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Kurang
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi kurang
Definisi	:	Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan
Referensi Waktu	:	Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	Integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score -2 SD s.d +1 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan
Referensi Waktu	:	Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	Integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi menurut Kecamatan

Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +1 SD s.d +2 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan
Referensi Waktu	:	Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	Integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +2 SD s.d +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan
Referensi Waktu	:	Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	Integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	-
Konsep	:	Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score lebih dari atau sama dengan +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan
Referensi Waktu	:	Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	Integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan
Alias	:	-
Konsep	:	Balita Kurus
Definisi	:	Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah
Referensi Pemilihan	:	sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi
Referensi Waktu	:	-
Tipe Data	:	2024
Klasifikasi Isian	:	Integer
Aturan Validasi	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Akses Publikasi	:	Harus Berisi Angka

Nama Variabel	:	Jumlah Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Alias	:	-

Konsep	:	Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Definisi	:	Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Definisi	:	Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik karena gangguan pada pembuluh darah. Sebagai akibatnya suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Alias	:	-

Konsep	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Definisi	:	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan 2. Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus
Definisi	:	Diabetes mellitus adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah secara terus-menerus. Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Definisi	:	Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi: 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; 3. Melakukan rujukan jika diperlukan **Keterangan:** 1. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi 2. Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Alias	:	-
Konsep	:	Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Definisi	:	Deteksi dini dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun yang memiliki Riwayat hubungan seksual, deteksi dini kanker leher Rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan metode SADANIS di fasyankes, minimal 80% pada sasaran penduduk di satu wilayah

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Iva Positif
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Iva Positif
Definisi	:	IVA positif : Ditemukan bercak putih (lesi pra kanker) dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat , IVA (Inspeksi Visual : dengan Asam asetat) Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Deteksi dini yang dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sasaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Menurut Kecamatan dan Puskesmas

Alias	:	-
Konsep	:	Sasaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Definisi	:	Penderita Skizofrenia dan Psikosis akut. Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Alias	:	-
Konsep	:	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Definisi	:	Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. Menurut standardnya pelayanan kesehatan dilakukan oleh minimal 1 orang Dokter Umum/Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 orang Perawat/ Perawat Spesialis Keperawatan Jiwa. ODGJ berat yang mendapat layanan adalah penderita Skizofrenia dan Psikosis Akut yang mendapatkan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ). Gejala Psikotik akut yang di timbulkan sama dengan skizofrenia hanya belum sampai 30 hari. Skizofrenia yaitu Gangguan jiwa kompleks dengan persentasi

klinis, perjalanan penyakit, dan respon terapi yang beragam. Gejala Skizofrenia terdiri dari:

1. Gejala positif, yaitu yang berlebihan dibandingkan fungsi normal, seperti waham, halusinasi, perilaku yang tidak terorganisasi;
2. Gejala negatif, dimana fungsi mental dan ekspresi emosi menjadi berkurang, misalnya ditandai dengan anhedonia, interaksi sosial yang terganggu, dan afek tumpul;
3. Gejala afektif, seperti cemas dan mood yang depresif;
4. Gejala kognitif, misalnya gangguan memori kerja dan episodik, gangguan atensi, gangguan fungsi eksekutif dsbnya. Skizofrenia apabila gejala tsb sudah lebih 30 hari.

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2024
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Indikator	:	Jumlah Gross Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Gross Death Rate (GDR)
Definisi	:	Gross Death Rate (GDR) merupakan Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Semakin tinggi angkanya maka semakin banyak pasien yang keluar dalam keadaan meninggal

Metode/Rumus Perhitungan	:	GDR = Jumlah Seluruh Pasien Keluar Mati / Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) X 1000%
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Jumlah Net Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Net Death Rate (NDR)
Definisi	:	Net Death Rate (NDR) adalah Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir yaitu < 25 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Semakin tinggi angkanya maka semakin banyak pasien yang keluar setelah lebih dar 48 jam dalam keadaan meninggal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Net Death Rate (NDR) = Jumlah Seluruh Pasien Keluar Mati Setelah Lebih dari 48 jam dirawat / Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) x 1000%
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Bed Occupancy Rate (BOR) menurut Rumah Sakit

Konsep	:	Bed Occupancy Rate (BOR)
Definisi	:	BOR (Bed Occupancy Rate) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Nilai BOR yang lebih rendah dari parameter ideal menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (diluar parameter ideal) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur.
Metode/Rumus Perhitungan	:	BOR = Jumlah hari perawatan/ (Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam setahun)x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	BTO (Bed Turn Over) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	BTO (Bed Turn Over)
Definisi	:	BTO (Bed Turn Over) adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Nilai parameter BTO yang ideal adalah 40-50 kali dalam satu tahun. Nilai BTO dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Nilai BTO yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan aspek klinis, seperti infeksi nosokomial rumah sakit. Hal ini terjadi karena jumlah pasien yang dirawat melebihi kapasitas tempat tidur yang ada, sehingga satu tempat tidur terlalu banyak digunakan oleh pasien secara berkali-kali.

Metode/Rumus Perhitungan	:	BTO (Bed Turn Over)= Jumlah pasien keluar (hidup + mati)/Jumlah tempat tidur
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kali
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	TOI (Turn Over Interval) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	TOI (Turn Over Interval)
Definisi	:	TOI (Turn Over Interval adalah Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. TOI merupakan indikator yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Nilai parameter TOI yang ideal pada kisaran 1-3 hari. Nilai TOI dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Semakin besar nilai TOI, maka semakin lama tempat tidur kosong dan tidak digunakan oleh pasien.
Metode/Rumus Perhitungan	:	TOI =((Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam setahun) - Jumlah hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup dan mati)
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	ALOS (Average Length of Stay) menurut Rumah Sakit

Konsep	:	ALOS (Average Length of Stay)
Definisi	:	ALOS (Average Length of Stay) merupakan rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Nilai ALOS yang berada di bawah angka ideal dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Sistem BPJS yang merupakan sistem paket dengan lama rawatan yang tidak terbatas, Banyak pasien umum yang PAPS dengan alasan kekurangan biaya
Metode/Rumus Perhitungan	:	ALOS = jumlah hari perawatan rumah sakit / jumlah pasien keluar (hidup dan mati).
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Jumlah Posyandu Aktif*
Konsep	:	Posyandu Aktif
Definisi	:	Jumlah Posyandu aktif merupakan Penjumlahan dari Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri Posyandu aktif memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes. 2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah 3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi.

4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA).

Interpretasi	:	Semakin banyak jumlah posyandu aktif, maka semakin banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Posyandu Aktif = Posyandu Purnama + Posyandu Mandiri
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi menurut kecamatan dan puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Segmen Kepesertaan
Konsep	:	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Definisi	:	Jaminan Kesehatan Nasional adalah Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Cakupan Jaminan Kesehatan didapat dari Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama lalu dikali 100%

Interpretasi	:	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi di suatu wilayah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	JKN = Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama × 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri dari: – PBI APBN – PBI APBD NON PBI terdiri dari : – Pekerja Penerima Upah (PPU) – Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri – Bukan Pekerja (BP)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase anggaran Kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota
Konsep	:	Persentase APBD Kesehatan
Definisi	:	Persentase Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota merupakan pembagian dari jumlah alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk kesehatan dalam 1 tahun dengan Jumlah total anggaran APBD pada tahun yang sama. Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota adalah Dana yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota. Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK :

		– Fisik (reguler, penugasan, afirmasi) – Non fisik (BOK, akreditasi, jampersal) Dana Dekonsentrasi yaitu Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak anggaran APBD yang dialokasikan ke dalam ranah kesehatan
Metode/Rumus Perhitungan	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per Tahun = Jumlah Alokasi Kesehatan Pemerinah dalam 1 tahun (rupiah) di wilaya tertentu/ Jumlah penduduk pada wilayah dan tahun yang sama
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun (rupiah)
Konsep	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita
Definisi	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun yaitu Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun; Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK : - Fisik (reguler, penugasan, afirmasi)

- Non fisik (BOK, akreditasi, jampersal);

Dana Dekonsentrasi yaitu Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;

Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah anggaran kesehatan pemerintah per kapita pe tahun maka semakin banyak dana yang dilokasikan untuk masyarakat per orangnya per tahun
Metode/Rumus Perhitungan	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per Tahun = Jumlah Alokasi Kesehatan Pemerinah dalam 1 tahun (rupiah) di wilayah tertentu/ Jumlah penduduk pada wilayah dan tahun yang sama
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U merupakan persentase banyaknya balita berat badan risiko lebih dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut indeks BB/U.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak balita yang memiliki berat badan lebih (overweight)

Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih = Jumlah balita berat badan risiko lebih / Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut indeks BB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Underweight Berdasarkan Indeks BB/U menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Underweight menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Underweight merupakan persentase dari jumlah anak berusia 0-59 bulan dengan kategori underweight dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berdasarkan index BB/U. Balita underweight merupakan penambahan dari jumlah balita berat badan kurang dengan jumlah balita berat badan sangat kurang
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita underweight
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Underweight = Jumlah Balita Underweight/ Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U x 100% Jumlah Balita Underweight = Jumlah Balita berat badan kurang + Jumlah Balita berat badan sangat kurang
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Ya

Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori berat badan sangat kurang dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita berat badan sangat kurang
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang = Jumlah balita berat badan sangat kurang / Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/Ux 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Normal merupakan persentase dari Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori balita berat badan normal dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat menurut index BB/U

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita berat badan normal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Normal = Jumlah balita berat badan normal / Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita dengan Tinggi Badan Sangat Tinggi Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita dengan Tinggi Badan Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Tinggi merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Tinggi dibagi dengan Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi menurut index TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita sangat tinggi
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Sangat Tinggi = Jumlah Balita Sangat Tinggi / Jumlah balita yang diukur panjang atau tinggi badan Menurut TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Pendek dibagi jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita sangat pendek
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Sangat Pendek = Jumlah Balita Sangat Pendek / Jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Pendek Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Pendek
Definisi	:	Persentase Balita Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Pendek dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita pendek

Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Pendek = Jumlah Balita Pendek / Jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Tinggi Normal Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Tinggi Normal merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori tinggi badan normal dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita yang memiliki tinggi badan normal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Tinggi Normal = Jumlah Balita Tinggi Normal / Jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Stunting Berdasarkan Indeks TB/U menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Konsep	:	Persentase Balita Stunting menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Stunting merupakan persentase dari jumlah anak berusia 0-59 bulan dengan kategori stunting dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berdasarkan index TB/U. Balita stunting merupakan penambahan dari jumlah balita pendek dengan jumlah balita sangat pendek
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita stunting
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Stunting = Jumlah Balita Stunting/ Jumlah balita diukur tingi badan menurut index TB/U x 100% Jumlah Balita Stunting = Jumlah Balita sangat pendek + Jumlah Balita pendek
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Resiko Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita resiko gizi lebih
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Balita Resiko gizi lebih = Jumlah Balita Resiko gizi lebih/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) x 100%
Ukuran	:	Persentase

Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi lebih
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Balita gizi lebih= Jumlah Balita gizi lebih/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Obesitas Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori

		Obesitas dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita Obesitas
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Balita Obesitas = Jumlah Balita Obesitas/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Wasting Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Wasting menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita wasting merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Wasting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB. Balita Wasting merupakan penambahan dari Jumlah Balita Gizi Buruk dengan Balita Gizi Kurang. Balita Wasting yaitu Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) yang berada pada -3 SD s.d <-2 SD. Selain itu juga memiliki lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 12,5 cm sampai dengan 11,5 cm.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita Wasting
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita wasting = Jumlah Balita dengan kategori Wasting / Jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB X 100% Jumlah Balita Wasting = Balita Gizi Buruk + Balita Gizi Kurang

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Gizi Buruk Berdasarkan Index BB/TBMenurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Buruk merupakan persentase dari Jumlah balita 0 – 59 bulan dengan status gizi buruk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah balita yang diukur menurut index (BB/TB)
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyakjumlah balita gizi buruk
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Jumlah Balita Gizi Buruk = Jumlah balita gizi buruk /
Ukuran	:	Jumlah balita yang diukur berat badan (BB/TB) x 100%
Satuan	:	Persentase
Klasifikasi Penyajian	:	Persen
Indikator Komposit	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Level Estimasi	:	Tidak
Akses Publikasi	:	Kabupaten

Nama Indikator	:	Prevalensi balita gizi kurang Berdasarkan Index BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Prevalensi balita gizi kurang

Definisi	:	Prevalensi balita gizi kurang merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-5 bulan dengan Gizi Kurang dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur menurut index BB/TB
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi kurang
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah balita gizi kurang = Jumlah Balita Gizi Kurang / Jumlah Balita yang diukur berat menurut index BB/TB x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Gizi Normal Berdasakan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Normal merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-59 bulan dengan Gizi Normal dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) dikali 100%
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi normal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumla Balita Gizi Normal = Jumlah Balita Gizi Normal/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Pelayanan pada penderita Hipertensi
Definisi	:	Persentase pelayanan pada penderita hypertensi merupakan persentase dari Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi dengan Jumlah Penderita Hipertensi dalam satu waktu tertentu
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlahpenderita hipertensi
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertesi = Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah Penderita Hipertensi di kabupaten/kota x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas, dan Menurut Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Menurut Kecamanan
Konsep	:	Persentase Pelayanan pada penderita diabetes
Definisi	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus merupakan persentase dari Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM)usia >=15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia >= 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan anka prevalensi kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah penderita Diabetes Militus
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus = Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM)usia >=15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu 1 tahun/Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia >= 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan anka prevalensi kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas, dan Menurut Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan
Definisi	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang ditemukan tumor/benjolan pada payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah penemuan tumor/benjolan
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) = Jumlah

		perempuan usia 30-50 tahun yang ditemukan tumor/benjolan pada payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan)/Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Curiga Kanker
Definisi	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah orang yang dicurigai kanker payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah perempuan yang dicurigai terkena kanker
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) = Jumlah perempuan yang dicurigai kanker payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan)/Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase

Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Konsep	:	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Definisi	:	Persentase Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) merupakan persentase Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah perempuan yang mengikuti Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara = Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan/Jumlah perempuan usia 30-50 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak

Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Iva Positif Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Iva Positif
Definisi	:	Persentase Iva Positif merupakan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun dengan IVA positif di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah perempuan yang terdeteksi IVA Positif
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Iva Positif = Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun dengan IVA positif di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan)/Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus menurut kecamatan
Konsep	:	Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus

Definisi	:	Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut : - Kepemilikan/Pengelolaan, yakni : • Kemenkes • Pem.Prov • Pem.Kab/Kota • TNI • POLRI • BUMN • Swasta - Kecamatan - Tipe Rumah Sakit • Rumah Sakit Tipe A • Rumah Sakit Tipe B • Rumah Sakit Tipe C • Rumah Sakit Tipe D - Jenis Rumah Sakit • Rumah Sakit Umum • Rumah Sakit Khusus
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian menurut jenisnya
Konsep	:	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA), Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOt/UMOT), Produksi Alat Kesehatan, Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan (Alkes)
Definisi	:	Pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan

Klasifikasi Penyajian	:	Sarana produksi dan distribusi kefarmasian terdiri dari : - Industri Farmasi - Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA) - Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT) - Produksi Alat Kesehatan - Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) - Industri Kosmetika - Pedagang Besar Farmasi (PBF) - Penyalur Alat Kesehatan (PAK) - Apotek - Toko Obat - Toko Alkes Klasifikasi Menurut Kepemilikan/Pengelolaan, yakni : – Kemenkes – Pem.Prov – Pem.Kab/Kota – TNI – POLRI – BUMN – Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I
Konsep	:	Rumah Sakit, Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1
Definisi	:	Ketentuan umum pelayanan gawat darurat level 1 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Jenis Rumah Sakit : - Rumah Sakit Umum - Rumah Sakit Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya menurut jenisnya

Konsep	:	Sarana Pelayanan Kesehatan, Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan
Definisi	:	Sarana Pelayanan Kesehatan selain Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan.
Klasifikasi Penyajian	:	Sarana Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari: - Klinik Pratama - Klinik Utama - Tempat Praktik Mandiri Dokter - Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi - Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis - Tempat Praktik Mandiri Bidan - Tempat Praktk Mandiri Perawat - Griya Sehat - Panti Sehat - Unit Transfusi Darah - Laboratorium Kesehatan Klasifikasi Menurut Kepemilikan/Pengelolaan, yakni : – Kemenkes – Pem.Prov – Pem.Kab/Kota – TNI – POLRI – BUMN – Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah puskesmas menurut jenisnya dan kecamatan
Konsep	:	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Non Rawat Inap
Definisi	:	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseOrangan (UKP) tingkat pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya

Klasifikasi Penyajian : - Klasifikasi Menurut Kecamatan
- Klasifikasi Menurut Jenisnya :
  - Puskesmas Non Rawat Inap
  - Puskesmas Rawat Inap
  - Puskesmas Pembantu
  - Puskesmas Keliling
- Klasifikasi Menurut Kepemilikan :
  - Kemenkes
  - Pem. Prov
  - Pem Kab/Kota
  - TNI/POLRI
  - BUMN
  - Swasta
  - Organisasi Masyarakat

Ukuran : Jumlah

Satuan : Unit

Nama Variabel : Jumlah kunjungan Pasien baru rawat inap menurut puskesmas

Konsep : Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap

Definisi : Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseOrangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Puskesmas

Ukuran : Jumlah

Satuan : Pasien

Nama Variabel : Jumlah kunjungan Pasien baru gangguan jiwa menurut puskesmas

Konsep : Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa

Definisi : Kunjungan Pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku

yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru rawat jalan menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseOrangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru rawat inap menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseOrangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Pasien

Nama Variabel : Jumlah kunjungan Pasien baru gangguan jiwa menurut rumah sakit

Konsep : Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa

Definisi : Kunjungan Pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut:
- Rumah Sakit
- Menurut Jenis Kelamin
  - Laki-laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Pasien

Nama Variabel : Jumlah tempat tidur menurut Rumah Sakit

Konsep : Tempat Tidur Rumah Sakit

Definisi : Tempat tidur yang berada di ruang rawat inap dan ruang pasca persalinan

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Rumah Sakit

Ukuran : Jumlah

Satuan : Unit

Nama Variabel : Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pasien Keluar Hidup, Pasien Keluar Mati

Definisi	:	Seluruh Pasien yang keluar dalam keadaan hidup dan keluar mati setelah kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam dirawat.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pasien Keluar Mati
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat kurang dari 48 jam
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati > 48 jam dirawat menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pasien Keluar Mati Lebih dari 48 jam dirawat
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat lebih dari 48 jam
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Gross Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Gross Death Rate
Definisi	:	Gross Death Rate (GDR) merupakan Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 Pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu

Nama Variabel	:	Jumlah Net Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Net Death Rate
Definisi	:	Net Death Rate (NDR) adalah Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 Pasien keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir yaitu < 25 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Rumah Sakit - Menurut Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu

Nama Variabel	:	Jumlah Hari Perawatan menurut Rumah Sakit

Konsep	:	Hari Perawatan
Definisi	:	Total hari rawat dari semua Pasien yang dirawat selama satu tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	Jumlah Lama dirawat menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Lama Dirawat
Definisi	:	Total lama dirawat dari Pasien sejak masuk sampai pulang, selama satu tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	BOR (Bed Occupancy Rate) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	BOR (Bed Occupancy Rate)
Definisi	:	BOR (Bed Occupancy Rate)adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	BTO (Bed Turn Over) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	BTO (Bed Turn Over)
Definisi	:	BTO (Bed Turn Over) adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Nilai parameter BTO yang ideal adalah 40-50 kali dalam satu

tahun. Nilai BTO dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kali

Nama Variabel	:	TOI (Turn Over Interval) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	TOI (Turn Over Interval)
Definisi	:	TOI (Turn Over Interval adalah Rata-rata Hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. TOI merupakan indikator yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Nilai parameter TOI yang ideal pada kisaran 1-3 Hari. Nilai TOI dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	ALOS (Average Length of Stay) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	ALOS (Average Length of Stay)
Definisi	:	ALOS (Average Length of Stay) merupakan rata-rata lama rawat (dalam satuan Hari) seOrang Pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 Hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	Jumlah Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Konsep	:	Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

Definisi	:	Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Pratama
Konsep	:	Posyandu Pratama
Definisi	:	Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Madya
Konsep	:	Posyandu Madya
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan Pengelolaan Posyandu rata-rata jumlahkader sebanyak lima Orang atau lebih, tetapi cakupan

kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Purnama
Konsep	:	Posyandu Purnama
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima Orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Mandiri
Konsep	:	Posyandu Mandiri
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima Orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Aktif*
Konsep	:	Posyandu Aktif
Definisi	:	Jumlah Posyandu aktif merupakan Penjumlahan dari Posyandu Purnama dan Posyandu MandiriPosyandu aktif memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan Hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik Hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes. 2. Posyandu memiliki kader minimal 5 Orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah 3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi. 4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA).
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posbindu PTM**
Konsep	:	Posbindu PTM

Definisi	:	Upaya kesehatan berbasis bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah dokter gigi Umum menurut Unit Kerja
Konsep	:	Dokter Gigi
Definisi	:	Dokter Gigi adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Klasifikasi Penyajian	:	- Berdasarkan Unit Kerja • Puskesmas • Rumah Sakit - Berdasarkan Jenis Kelamin: • Laki-Laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Dokter gigi Spesialis menurut Unit Kerja
Konsep	:	Dokter Gigi Spesialis
Definisi	:	Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter lulusan pendidikan keDokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran).

Klasifikasi Penyajian : - Berdasarkan Unit Kerja
  - Puskesmas
  - Rumah Sakit
- Berdasarkan Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Dokter Spesialis menurut Unit Kerja

Konsep : Dokter Spesialias

Definisi : Dokter Spesialis adalah Dokter lulusan pendidikan keDokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran).

Klasifikasi Penyajian : - Berdasarkan Unit Kerja
  - Puskesmas
  - Rumah Sakit
- Berdasarkan Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Dokter Umum menurut Unit Kerja

Konsep : Dokter Umum

Definisi : Dokter Umum adalah Dokter lulusan pendidikan keDokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).

Klasifikasi Penyajian	:	- Berdasarkan Unit Kerja • Puskesmas • Rumah Sakit - Berdasarkan Jenis Kelamin: • Laki-Laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokter

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Keperawatan menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Keperawatan
Definisi	:	Tenaga Kesehatan yang bekerja sebagai perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa.
Klasifikasi Penyajian	:	- Berdasarkan Unit Kerja • Puskesmas • Rumah Sakit - Berdasarkan Jenis Kelamin: • Laki-Laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Bidan menurut Unit Kerja
Konsep	:	Bidan
Definisi	:	Tenaga kesehatan yang bekerja sebagai bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Penyajian	:	- Berdasarkan Unit Kerja • Puskesmas • Rumah Sakit
Ukuran	:	Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat menurut Unit Kerja

Konsep : Tenaga Kesehatan Masyarakat

Definisi : Tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut :
- Kecamatan
- Puskesmas
- Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Unit Kerja

Konsep : Tenaga Kesehatan Lingkungan

Definisi : Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut :
- Kecamatan
- Puskesmas
- Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Gizi menurut Unit Kerja

Konsep : Tenaga Gizi

Definisi : Tenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut :

- Jenis Tenaga Gizi:
  - Nutririonis
  - dietisien
- Kecamatan
- Puskesmas
- Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Keteknisan Medis menurut Unit Kerja

Konsep : Tenaga Keteknisian Medis

Definisi : Tenaga keteknisian medis adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keteknisian medis yang terdiri dari :

- Perekam medis dan informasi Kesehatan
- Teknik kardiovaskuler
- Teknisi pelayanan darah
- Refraksionis optisien/optometris
- Teknisi gigi
- Penata anestesi (perawat anastesi)
- Terapis gigi dan mulut (perawat gigi)
- Audiologis.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut :

- Kecamatan
- Puskesmas
- Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki

- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya menurut Unit Kerja

Konsep : Tenaga Teknik Biomedika Lainnya

Definisi : Tenaga teknik biomedika lainnya adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri dari :

- Radiographer
- Elektromedis
- fisikawan medik
- radioterapis
- dan ortotik prostetik.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut :
- Kecamatan
- Puskesmas
- Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Keterapian Fisik menurut Unit Kerja

Konsep : Tenaga Keterapian Fisik

Definisi : Tenaga keterapian fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri dari :

- Fisioterapis
- Okupasi terapis
- Terapis wicara
- Akupunktur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut :
- Kecamatan
- Puskesmas

- Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki
  - Perempuan

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kefarmasian Menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Kefarmasian
Definisi	:	Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Kecamatan - Jenis Kelamin : • Laki-laki • Perempuan - Jenis Tenaga Kefarmasian • Tenaga Teknis Kefarmasian • Apoteker
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan
Definisi	:	Tenaga penunjang/pendukung kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen. Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya. Tenaga dukungan manajemen Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, staf penunjang

administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, dan tenaga penunjang kesehatan lainnya.

Klasifikasi Penyajian : – Klasifikasi Menurut Kecamatan
– Klasifikasi Menurut Jenis Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan, yang terdiri atas :
  - Pejabat Struktural
  - Tenaga Pendidik
  - Tenaga Dukungan Managemen
- Jenis Kelamin :
  - Laki-laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Segmen Kepesertaan

Konsep : Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Definisi : Jaminan Kesehatan Nasional adalah Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap Orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Cakupan Jaminan Kesehatan didapat dari Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama lalu dikali 100%

Klasifikasi Penyajian : Diklasifikasikan atas:
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri dari:
  - PBI APBN
  - PBI APBD
- NON PBI terdiri dari :
  - Pekerja Penerima Upah (PPU)
  - Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri
  - Bukan Pekerja (BP)

Ukuran : Persentase

Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan Menurut Kecamatan
Konsep	:	Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan
Definisi	:	Banyaknya desa yang mengalokasikan sebagian dana desa untuk anggaran kesehatan pada kecamatan tertentu dibagi jumlah desa pada kecamatan tersebut dikali 100%
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase anggaran Kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota
Konsep	:	Persentase APBD Kesehatan
Definisi	:	Persentase Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota merupakan pembagian dari jumlah alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk kesehatan dalam 1 tahun dengan Jumlah total anggaran APBD pada tahun yang sama. Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota adalah Dana yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota, Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun yaitu Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun; Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK: – fisik (reguler, penugasan, afirmasi) – non fisik (BOK, akreditasi, jampersal) Dana Dekonsentrasi yaitu Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

		pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun (rupiah)
Konsep	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita
Definisi	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun yaitu Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun;
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Konsep	:	Kelahiran, Jenis Kelamin, Lahir Hidup, Lahir Mati, Lahir Hidup dan Mati, Angka Lahir Mati per 1000 Kelahiran yang dilaporkan
Definisi	:	Jumlah Lahir Hidup maupun Lahir Mati. Lahir Hidup adalah Suatu Kelahiran seOrang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot. Lahir Mati adalah Kelahiran seOrang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menuurt Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Kematian Ibu Kelompok Umur, Jenis Kematian Ibu
Definisi	:	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 Hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemlikan/Pengelolaan, yaitu: - BUMN, - Swasta, Organisasi Kemasyarakatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Lahir hidup Menurut jenis Kelamin, kecamatan dan puskesmas
Konsep	:	Lahir Hidup, Jenis Kelamin, Kecamatan, Puskesmas
Definisi	:	Suatu Kelahiran seOrang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemlikan/Pengelolaan, yaitu: - BUMN - Swasta - Organisasi Kemasyarakatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Risiko Lebih : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score lebih dari +1 SD

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut: - Puskesmas - Menurut Jenis Kelamin: • Laki-Laki • Perempuan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U merupakan persentase banyaknya balita berat badan risiko lebih dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut indeks BB/U.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Penjumlahan Balita Berat Badan Kurang dengan Jumlah Balita Berat Badan sangat kurang Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD, Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD, Z score : Nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Ditimbang
Definisi	:	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan penimbangan berat badan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan

		kategori berat badan sangat kurang dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Kurang Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Underweight merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori underweight dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U Jumlah Balita Underweight merupakan penambahan dari jumlah balita berat badan kurang dengan balita berat badan sangat kurang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Normal : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score mulai dari +1 sampai dengan -2 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Normal merupakan persentase dari Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori balita berat badan normal dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat menurut index BB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score lebih dari +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit dan Menurut Jenis Kelamin, yaitu Laki-laki, Perempuan
Ukuran	:	Persentase

Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Tinggi Badan Sangat Tinggi Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Tinggi Badan Sangat Tinggi Berdasarkan Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Tinggi merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Tinggi dibagi dengan Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi menurut index TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Prevalensi stunting
Konsep	:	Prevalensi stunting
Definisi	:	Persentase Balita Stunting merupakan persentase dari jumlah anak berusia 0-59 bulan dengan kategori stunting dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berdasarkan index TB/U. Balita stunting merupakan penambahan dari jumlah balita pendek dengan jumlah balita sangat pendek
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Sangat Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Pendek dibagi jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Pendek Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Pendek
Definisi	:	Persentase Balita Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Pendek dibagi

dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Tinggi Normal Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score -2 SD sampai dengan +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Tinggi Normal Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Tinggi Normal merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori tinggi badan normal dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB

Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +1 SD s.d +2 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Resiko Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +2 SD s.d +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB

Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score lebih dari atau sama dengan +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Obesitas Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Obesitas dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Wasting Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Konsep	:	Jumlah Balita Wasting menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita wasting merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Wasting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB. Balita Wasting merupakan penambahan dari Jumlah Balita Gizi Buruk dengan Balita Gizi Kurang Balita Wasting yaitu Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) yang berada pada -3 SD s.d <-2 SD. Selain itu juga memiliki lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 12,5 cm sampai dengan 11,5 cm.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah balita gizi buruk
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/TB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Gizi Buruk Berdasarkan Index BB/TBMenurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Buruk merupakan persentase dari Jumlah balita 0 – 59 bulan dengan status gizi buruk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah balita yang diukur menurut index (BB/TB)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Junlah Balita Gizi Kurang
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi kurang
Definisi	:	Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Prevalensi balita gizi kurang Berdasarkan Index BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Prevalensi balita gizi kurang
Definisi	:	Prevalensi balita gizi kurang merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-5 bulan dengan Gizi Kurang dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score -2 SD s.d +1 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Gizi Normal Berdasakan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Normal merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-59 bulan dengan Gizi Normal dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) dikali 100%
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan
Konsep	:	Balita Kurus
Definisi	:	Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Konsep	:	Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Definisi	:	Banyaknya anak yang berusia 6-24 Bulan yang menerima makanan pendamping ASI
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Konsep	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Definisi	:	Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik karena gangguan pada pembuluh darah. Sebagai akibatnya suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Konsep	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Definisi	:	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: – Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan – Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
Klasifikasi Penyajian	:	– Klasifikasi Menurut Kecamatan – Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin yaitu : • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Pelayanan pada penderita Hipertensi

Definisi	:	Persentase pelayanan pada penderita hypertensi merupakan persentase dari Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi dengan Jumlah Penderita Hipertensi dalam satu waktu tertentu
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus
Definisi	:	Diabetes mellitus adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah secara terus-menerus. Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Definisi	:	Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi: 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; 3. Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan: – Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi – Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Menurut Kecamanan
Konsep	:	Persentase Pelayanan pada penderita diabetes
Definisi	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus merupakan persentase dari Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM)usia >=15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia >= 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan anka prevalensi kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Tumor/benjolan
Konsep	:	Jumlah Tumor/benjolan
Definisi	:	Benjolan tidak normal pada payudara pada pemeriksaan klinis payudara oleh petugas kesehatan terlatih
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan

Definisi	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang ditemukan tumor/benjolan pada payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Curiga Kaker
Konsep	:	Jumlah Curiga Kaker
Definisi	:	Perempuan usia 30-50 tahun yang dicurigai memiliki tumor/benjolan dan dicurigai menderita kanker payudara berdasarkan pemeriksaan sadanis yang dirujuk ke pelayanan kesehatan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Curiga Kanker
Definisi	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah Orang yang dicurigai kanker payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Konsep	:	Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Definisi	:	Deteksi dini dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun yang memiliki Riwayat hubungan seksual, deteksi dini kanker leher Rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan metode SADANIS di fasyankes, minimal 80% pada sasaran penduduk di satu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Konsep	:	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Definisi	:	Persentase Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) merupakan persentase Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Iva Positif
Konsep	:	Jumlah Iva Positif

Definisi	:	IVA positif : Ditemukan bercak putih (lesi pra kanker) dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat , IVA (Inspeksi Visual : dengan Asam asetat) Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Deteksi dini yang dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Iva Positif Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Iva Positif
Definisi	:	Persentase Iva Positif merupakan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun dengan IVA positif di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

MS-KEG PENDATAAN LENGKAP RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Infrastruktur Jalan Jembatan, Sumber Daya Air Dan Drainase Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan	:	Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Ateik Soewardi No. 1 Lingkup Gedung Pekerjaan Umum
Email	:	-

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Alamat	:	Jl. Ateik Soewardi No. 1 Lingkup Gedung Pekerjaan Umum
Email	:	-

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Infrastruktur Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, dan Drainase Kabupaten Tangerang diperlukan untuk menyediakan gambaran terpadu tentang ketersediaan, kondisi, pemanfaatan, dan kebutuhan infrastruktur dasar yang menjadi tulang punggung mobilitas, pelayanan publik, dan ketahanan lingkungan daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan menentukan aksesibilitas antarwilayah serta

distribusi barang dan jasa; sementara sumber daya air dan sistem drainase berperan penting dalam penyediaan air bersih, pencegahan banjir, dan pengendalian daya rusak akibat hujan ekstrem. Perubahan iklim, urbanisasi pesat, dan tekanan pembangunan menjadikan data akurat dan terintegrasi semakin krusial untuk perencanaan yang responsif dan berkelanjutan.

Kompilasi statistik yang sistematis dan terstandarisasi akan memperbaiki interoperabilitas data—memungkinkan agregasi indikator kunci seperti panjang jalan per kondisi, jumlah jembatan menurut tingkat kerusakan, kapasitas tampung sistem drainase, serta cakupan layanan air bersih dan jaringan irigasi. Data tersebut menjadi dasar untuk perencanaan anggaran, penentuan lokasi intervensi prioritas, evaluasi kinerja pemeliharaan, mitigasi risiko bencana (banjir dan erosi), dan pemenuhan target pembangunan berkelanjutan di level kabupaten.

Lebih jauh, ketersediaan statistik yang andal mendukung keterbukaan informasi publik, memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan aset publik, dan memudahkan koordinasi antarlembaga serta dengan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah provinsi, kementerian, donor, sektor swasta). Dengan adanya kompilasi yang konsisten pula, Kabupaten Tangerang dapat menyusun indikator kinerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pemantauan tren, dan menyusun proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur yang realistis.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Kompilasi Statistik Infrastruktur Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas perencanaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, dan menjamin ketahanan wilayah terhadap risiko hidrometeorologi serta tekanan pembangunan.

iya

Tujuan Kegiatan :

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai kondisi, kapasitas, dan sebaran infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, dan drainase di Kabupaten Tangerang.
2. Mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
3. Menjadi dasar monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur, termasuk tingkat kerusakan, kebutuhan rehabilitasi, serta efektivitas program pemeliharaan.
4. Mendukung mitigasi bencana (khususnya banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan) melalui data drainase, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.
5. Meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses data yang relevan untuk pengawasan, penelitian, maupun partisipasi pembangunan.

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	03 Januari 2025 s.d. 28 Februari 2025
Pengumpulan Data	28 Februari 2025 s.d. 24 September 2025
Pengolahan	01 Oktober 2025 s.d. 01 November 2025
Analisis	23 November 2025 s.d. 01 Desember 2025
Diseminasi	20 Desember 2025 s.d. 27 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah
- Panjang Irigasi
- Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi di Kabupaten Tangerang

- Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan
- Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Tangerang
- Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Tangerang
- Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Tangerang
- Panjang Drainase di Kabupaten Tangerang
- Luas Daerah Rawan Genangan atau Berpotensi Genangan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Tangerang
- Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Tangerang
- Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi
- Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
- Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
- Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
- Jumlah Bangunan Irigasi di Kabupaten Tangerang
- Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Kabupaten Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengamatan
Sarana Pengumpulan Data	:	*Paper-assisted Personal Interviewing* (PAPI)
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya: Jalan

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA/SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		6 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		6 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Ya
Penyandian	:	Tidak

Data Entry : Ya

Validasi : Ya

Metode Analisis : Deskriptif

Unit Analisis : Lainnya: Jalan

Tingkat Penyajian Data : Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak : Ya

Digital : Ya

Data Mikro : Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak : 29 Desember 2025

Digital : 29 Desember 2025

Data Mikro : -

MS-VAR PENDATAAN LENGKAP RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel : Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah

Alias :

Konsep : Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah

Definisi	:	Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan nasional adalah Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi
Definisi	:	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

		Luas irigasi menurut kecamatan dan kondisi adalah luas daerah irigasi yang dikelompokkan menurut kecamatan dan kondisi baik dan atau rusak.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan
Definisi	:	Panjang jalan yang dekolompokkan berdasarkan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)
Definisi	:	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air dengan panjang minimal 1,5 m.
Referensi Pemilihan	:	-

Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan

Nama Variabel	:	Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar
Definisi	:	Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan. Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima adalah Panjang sempadan jalan yg digunakan oleh pedagang kaki lima Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Bangunan Rumah Liar adalah Panjang sempadan jalan yg digunakan untuk berdirinya bangunan liar
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-

Konsep	:	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
Definisi	:	garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai namun digunakan untuk mendirikan bangunan liar.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Drainase di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang drainase
Definisi	:	Pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Daerah Rawan Genangan atau Berpotensi Genangan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Luas Daerah Rawan Genangan atau Berpotensi Genangan

Definisi	:	Luas Daerah yang rawan terdapat genangan atau berpotensi genangan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Definisi	:	Banyaknya pembangunan turap atau struktur konstruksi batu yang berbentuk dinding dan berfungsi untuk menyokong tekanan dan gerakan tanah yang kurang stabil pada jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
Definisi	:	Panjang jalan yang didasarkan pada permukaan jalan aspal, beton,kerikil,tanah dan lainnya
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Jenis Permukaan Jalan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.12
Konsep	:	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi
Definisi	:	Banyaknya jembatan yang dikelompokkan berdasarkan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan atau rusak berat. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi adalah Panjang drainase dengan system terbuka yang dikelompokkan berdasarkan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Drainase adalah saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
Alias	:	Tabel 3.13.16
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bangunan Irigasi di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Bangunan Irigasi
Definisi	:	Banyaknya infrastruktur prasarana irigasi yang merupakan suatu kelengkapan jaringan irigasi teknis yang terletak pada jaringan irigasi dan berfungsi sebagai pengatur dan pengukur pemberian dan pembagian air irigasi ke areal pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang
Alias	:	-
Konsep	:	Panjang sungai
Definisi	:	Sungai adalah Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Nama Sungai

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK TATA RUANG DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	sektoraldtrb@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Tata Ruang
Alamat	:	Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	sektoraldtrb@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah strategis dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur yang sangat pesat. Perkembangan ini

menuntut adanya pengelolaan tata ruang dan bangunan yang terarah, berkelanjutan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dinamika pembangunan di Kabupaten Tangerang juga menimbulkan tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan ruang untuk perumahan, kegiatan ekonomi, serta fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, data dan informasi terkait tata ruang dan bangunan menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan.

Kegiatan kompilasi statistik tata ruang dan bangunan Kabupaten Tangerang dilaksanakan sebagai upaya menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan kompilasi statistik tata ruang dan bangunan, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pemanfaatan ruang, pola pembangunan, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat untuk mendukung pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan, tetapi juga menjadi dasar koordinasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata ruang yang berkualitas dan bangunan yang memenuhi standar teknis.

Tujuan Kegiatan :

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai kondisi tata ruang dan bangunan di Kabupaten Tangerang.
2. Menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

3. Memberikan bahan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tata ruang dan bangunan.

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	08 November 2024 s.d. 02 januari 2025
Pengumpulan Data	06 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025
Pengolahan	20 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025
Analisis	20 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025
Diseminasi	03 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Luas Ruang Terbuka Hijau
- Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
- Luas Daerah
- Luas Wilayah
- Titik Koordinat Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Gudang
- Jumlah Pulau
- Rencana Peruntukkan RTRW
- Realisasi RTRW
- Tinggi wilayah

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data : *Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	CAPI
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		2 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak : Tidak

Digital : Ya

Data Mikro : Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak : -

Digital : 31 Maret 2025

Data Mikro : -

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK TATA RUANG DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel : Luas Ruang Terbuka Hijau

Alias : -

Konsep : Ruang Terbuka Hijau

Definisi : Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika

Referensi Pemilihan : PERMEN ATR/KBPN No 14 Tahun 2022

Referensi Waktu : 2024

Tipe Data : *Float*

Klasifikasi Isian : Klasifikasi berdasarkan kecamatan

Aturan Validasi : Harus berisi angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel	:	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Alias	:	-
Konsep	:	RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Definisi	:	Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dikali 20% (dua puluh persen)
Referensi Pemilihan	:	PERMEN ATR/KBPN No 14 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Daerah
Alias	:	-
Konsep	:	Luas Daerah
Definisi	:	Luas Kecamatan yang dihitung berdasarkan delineasi Kecamatan yang dikeluarkan oleh pihak terkait
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Wilayah
Alias	:	-

Konsep	:	Luas Wilayah
Definisi	:	Luas Desa / Kelurahan yang dihitung berdasarkan delineasi Desa / Kelurahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Titik Koordinat Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.14.4
Konsep	:	Titik Koordinat Desa/Kelurahan
Definisi	:	Titik Koordinat Desa / Kelurahan yang dihitung berdasarkan titik tengah (centroid) dari delineasi Desa / Kelurahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Titik koordinat dinyatakan dengan lintang dan bujur dengan sistem koordinat WGS 1984
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Gudang
Alias	:	Tabel 3.14.5
Konsep	:	Gudang

Definisi	:	Jumlah gudang yang berada di Kabupaten Tangerang berdasarkan data IMB/PBG dengan bentuk kegiatan pergudangan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2022-2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Rencana Peruntukkan RTRW
Alias	:	-
Konsep	:	Rencana Peruntukkan RTRW
Definisi	:	Luas Rencana Pola Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (RTRW)
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Realisasi RTRW
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi RTRW
Definisi	:	Luas daerah yang telah sesuai dengan Rencana Ruang yang dihitung berdasarkan data tutupan lahan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Tinggi wilayah
Alias	:	-
Konsep	:	Tinggi wilayah
Definisi	:	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI DATA STATISTIK TATA RUANG DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TANGERANG

Nama Indikator	:	Persentase Luas Daerah terhadap Luas Kabupaten
Konsep	:	Luas Daerah
Definisi	:	Perbandingan Luas Kecamatan terhadap Kabupaten
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Luas Daerah/Total Luas wlayah Kabupaten Tangerang x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi		Kecamatan
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan terhadap pola dan struktur ruang
Konsep	:	-
Definisi	:	Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan terhadap pola dan struktur ruang
Interpretasi	:	Semakin tinggi tingkat kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan terhadap pola dan struktur ruang maka semakin baik
Metode/Rumus Perhitungan	:	Realisasi Program atau Kegiatan Pembangunan / Rencana Program atau Kegiatan Pembangunan yang terdapat dalam RT RW x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi		Kecamatan
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Ketaatan Terhadap RTRW
Konsep	:	Ketaatan Terhadap RTRW
Definisi	:	Kesesuaian Pemanfaatn ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Interpretasi	:	Semakin tinggi tingkat kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka semakin baik
Metode/Rumus Perhitungan	:	Realisasi RT RW/Rencana Peruntukkan x 100%

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi		Kecamatan
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-KEG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Judul Kegiatan	: Verifikasi dan Validasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Survei
Sektor Kegiatan	: Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -
PENYELENGGARA	
Instansi Penyelenggara	: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Jl. Atik Soewardi No. 1 Lingkup Gedung Pekerjaan Umum Lantai I
Email	: dinsos.tangerangkab@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pengelolaan Data
Alamat	: Komplek Perkantoran Pemda Lantai I Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jl. Atik Soewardi No. 1
Email	: dppkb.kabtangerang@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	
Latar Belakang Kegiatan	: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah dalam rangka

penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Masalah kesejahteraan sosial akan selalu terjadi di manapun dan kapanpun, sehingga diperlukan penanganan yang holistik dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya akurasi data program penanganan bantuan sosial. Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) telah diakui dan menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan. Data ini menjadi dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program bantuan sosial. Akan tetapi, untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka diperlukan metodologi dan instrumen yang benar-benar mampu mengukur akurasi data khususnya kelayakan keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan sosial berdasarkan konsep dan indikatornya.

Tujuan Kegiatan :

a) Meningkatkan kualitas data penerima bantuan sosial
b) Tersedianya data *by name by adress* PPKS yang lengkap dan akurat

Jadwal Kegiatan :

8. Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2025 s.d. 24 Februari 2025
9. Desain	14 Januari 2025 s.d. 24 Februari 2025
10. Pengumpulan Data	24 Februari s.d. 19 November 2025
11. Pengolahan Data	24 Februari 2025 s.d. 19 November 2025
12. Analisis	11 Maret 2025 s.d. 19 November 2025
13. Diseminasi Hasil	20 November 2025 s.d. 22 Desember 2025

14. Evaluasi	23 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah fakir miskin
- Nama Provinsi
- Nama Kabupaten/Kota
- Nama Kecamatan
- Nama Rukun Warga (RW)
- Nama Rukun Tetangga (RT)
- Nama Kepala Keluarga
- Alamat Tempat Tinggal
- Nama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Jenis Kelamin
- Status Perkawinan
- Status Hubungan dalam Keluarga
- Status kepemilikan tempat tinggal
- Status bekerja kepala keluarga
- Status kekhawatiran tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir
- Status pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
- Status Keberadaan pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir
- Jenis Dinding Terluas
- Status Kepemilikan Jamban
- Sumber Penerangan Tempat Tinggal

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	: Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	: Triwulanan
Tipe Pengumpulan Data	: *Longitudinal Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	- Wawancara - Pengamatan
Sarana Pengumpulan Data	:	*Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)* *Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*
Unit Pengumpulan Data	:	- Individu - Rumah Tangga

DESAIN SAMPEL

Jenis Rancangan Sampel	:	Single Stage Atau Phase
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	:	Sampel Nonprobabilitas
Metode Yang Digunakan	:	Purposive Sampling
Kerangka Sampel Tahap Terakhir	:	List Frame
Unit Sampel	:	Kepala Keluarga Yang Terdaftar Dalam Data P3KE
Unit Observasi	:	Keluarga Dan Anggota Keluarga

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		29 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		274 Orang

Melakukan Pelatihan Petugas ? : Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	: Ya
Penyandian (*Coding*)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya
Metode Analisis	: Deskriptif
Unit Analisis	: Rumah Tangga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	: Ya
Digital	: Ya
Data Mikro	: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	: 18 Desember 2025
Digital	:
Data Mikro	: -

MS-VAR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Alias	:	B3R3
Konsep	:	Jenis Kelamin
Definisi	:	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

Referensi Pemilihan	:	Kondef Operasional Baku Statistik Sosial (2018)
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran (20 s.d. 24 Juni 2025)
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	1. Laki-laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	:	Harus berisi Laki-laki atau Perempuan
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alias	:	B3R2
Konsep	:	keluarga
Definisi	:	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang.
Referensi Pemilihan	:	UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran (20 s.d. 24 Juni 2025)
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Nama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Alias	:	B3R1
Konsep	:	-
Definisi	:	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan

		pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran (20 s.d. 24 Juni 2025)
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Tidak boleh berisi angka
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Alamat Tempat Tinggal
Alias	:	B1R8
Konsep	:	Alamat
Definisi	:	Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Di Lingkungan Kementerian Sosial
Referensi Waktu	:	20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Minimal berisi 10 karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Kepala Keluarga
Alias	:	B1R7
Konsep	:	Kepala Keluarga
Definisi	:	Kepala keluarga adalah salah seorang dari anggota keluarga yang tertulis di dalam kartu keluarga sebagai kepala

		keluarga. keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga (KK) dan tinggal bersama dalam satu bangunan. jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No.52 tahun 2009. Keluarga adalah unit terkjecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak anakanya, atau ibu dan anaknya
Referensi Pemilihan	:	Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Sumber Penerangan Tempat Tinggal
Alias	:	B4R8
Konsep	:	Sumber Penerangan
Definisi	:	Sumber penerangan/cahaya yang digunakan pada tempat tinggal
Referensi Pemilihan	:	- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 - Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran
Tipe Data	:	*Boolean*
Klasifikasi Isian	:	1. Listrik 450 watt atau bukan listrik (YA) 2. Listrik diatas 450 Watt (Tidak)
Aturan Validasi	:	Harus berisi YA atau Tidak
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Status Kepemilikan Jamban
Alias	:	B4R7
Konsep	:	Jamban
Definisi	:	Jenis penggunaan fasilitas buang air besar yang digunakan oleh mayoritas keluarga.
Referensi Pemilihan	:	- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 - Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran
Tipe Data	:	*Boolean*
Klasifikasi Isian	:	1. Jamban Sendiri (YA) 2. Bukan Jamban Sendiri (Tidak)
Aturan Validasi	:	Harus berisi YA atau Tidak
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Jenis Dinding Terluas
Alias	:	B4R6
Konsep	:	Dinding
Definisi	:	Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran
Tipe Data	:	*Boolean*
Klasifikasi Isian	:	1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/kawat 3. Kayu/Papan/Gypsum/GRC/Calciboard 4. Anyaman bambu

5. Batang kayu
6. Bambu
7. Lainnya

Aturan Validasi : Harus berisi YA atau Tidak

Akses Publikasi : Tertutup

Nama Variabel : Status Keberadaan Pengeluaran untuk Pakaian Selama 1 (satu) Tahun Terakhir

Alias : B4R5

Konsep : Pengeluaran pakaian

Definisi : Biaya yang dikeluarkan untuk membeli Pakaian

Referensi Pemilihan :
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022
- Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022

Referensi Waktu : Pada saat pemutakhiran

Tipe Data : *Boolean*

Klasifikasi Isian :
1. Ya
2. Tidak

Aturan Validasi : Harus berisi YA atau Tidak

Akses Publikasi : Tertutup

Nama Variabel : Rukun Warga

Alias : B1R5

Konsep : -

Definisi : Lembaga masyarakat yang di bentuk dari beberapa kelompk rukun tetangga di satu desa atau kelurahan

Referensi Pemilihan :
- Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022

Referensi Waktu : Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025

Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	- 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009
Aturan Validasi	:	001,002,...,009
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Status Bekerja Kepala Keluarga
Alias	:	B4R2
Konsep	:	Bekerja
Definisi	:	Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir. Seminggu terakhir adalah jangka waktu tujuh (7) hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pendataan.
Referensi Pemilihan	:	- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 - Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*Boolean*
Klasifikasi Isian	:	1. Ya 2. Tidak

Aturan Validasi	:	Harus berisi YA atau Tidak
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Desa/Kelurahan
Alias	:	B1R4
Konsep	:	- Desa - Kelurahan
Definisi	:	Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Status Kepemilikan Tempat Tinggal
Alias	:	B4R1
Konsep	:	Status Kepemilikan Tempat Tinggal
Definisi	:	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati
Referensi Pemilihan	:	- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 - Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*Boolean*

Klasifikasi Isian	:	1. Milik Sendiri (Ya) 2. Bukan Milik Sendiri (Tidak)
Aturan Validasi	:	Harus berisi YA atau Tidak
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Kecamatan
Alias	:	B1R3
Konsep	:	Kecamatan
Definisi	:	Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang di sebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah
Referensi Pemilihan	:	- Buku Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	
Aturan Validasi	:	Data harus terisi
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Kabupaten/Kota
Alias	:	B1R2
Konsep	:	1. Kabupaten 2. Kota
Definisi	:	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	

Klasifikasi Isian	:	
Aturan Validasi	:	Hanya berisi [03] Tangerang
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Status Hubungan dalam Keluarga
Alias	:	B3R5
Konsep	:	1. Kabupaten 2. Kota
Definisi	:	Ikatan atau pertalian setiap anggota keluarga dengan kepala keluarga berdasarkan kartu keluarga atau pengakuan dari kepala keluarga.
Referensi Pemilihan	:	1. Data Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Sensus Penduduk 2020
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	1. Kepala Keluarga 2. Istri 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang Tua 7. Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu/Sopir/ART/Pengasuh 10. Lainnya
Aturan Validasi	:	Harus berisi Kepala Keluarga, Suami, Istri, Anak, Menantu, Cucu, Orang Tua, Mertua, atau Lainnya
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Status Perkawinan
Alias	:	B3R4
Konsep	:	Perkawinan
Definisi	:	Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan.
Referensi Pemilihan	:	1. Sirusa BPS https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/35 2. UU No 23 Tahun 2006
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati
Aturan Validasi	:	Harus berisi Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, atau Cerai Mati
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Provinsi
Alias	:	B1R1
Konsep	:	1. Wilayah 2. Provinsi
Definisi	:	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran 20 s.d. 24 Juni 2025
Tipe Data	:	*String*

Klasifikasi Isian	:	
Aturan Validasi	:	Hanya berisi [36] Banten
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Nama Indikator	:	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Konsep	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Definisi	:	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
Interpretasi	:	Semakin besar nilainya maka semakin banyak jumlah PPKS nya
Metode/Rumus Perhitungan	:	Kumulatif jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari seluruh Rukun Warga
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Berdasarkan Rukun Warga
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Rukun Warga
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Konsep	:	Jenis Kelamin
Definisi	:	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Konsep	:	keluarga
Definisi	:	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Konsep	:	-
Definisi	:	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar

Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Alamat Tempat Tinggal
Konsep	:	Alamat
Definisi	:	Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Kepala Keluarga
Konsep	:	Kepala Keluarga
Definisi	:	Kepala keluarga adalah salah seorang dari anggota keluarga yang tertulis di dalam kartu keluarga sebagai kepala keluarga. keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga (KK) dan tinggal bersama dalam satu bangunan. jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No.52 tahun 2009. Keluarga adalah unit terkjecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak anakanya, atau ibu dan anaknya
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Sumber Penerangan Tempat Tinggal
Konsep	:	Sumber Penerangan

Definisi	:	Sumber penerangan/cahaya yang digunakan pada tempat tinggal
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Status Kepemilikan Jamban
Konsep	:	Jamban
Definisi	:	Jenis penggunaan fasilitas buang air besar yang digunakan oleh mayoritas keluarga.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jenis Dinding Terluas
Konsep	:	Dinding
Definisi	:	Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Status Keberadaan Pengeluaran untuk Pakaian Selama 1 (satu) Tahun Terakhir
Konsep	:	Pengeluaran pakaian
Definisi	:	Biaya yang dikeluarkan untuk membeli Pakaian
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-

Satuan : -

Nama Variabel : Rukun Warga

Konsep : -

Definisi : Lembaga masyarakat yang di bentuk dari beberapa kelompok rukun tetangga di satu desa atau kelurahan

Klasifikasi Penyajian : -

Ukuran : -

Satuan : -

Nama Variabel : Status Bekerja Kepala Keluarga

Konsep : Bekerja

Definisi : Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir. Seminggu terakhir adalah jangka waktu tujuh (7) hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pendataan.

Klasifikasi Penyajian : -

Ukuran : -

Satuan : -

Nama Variabel : Desa/Kelurahan

Konsep :
- Desa
- Kelurahan

Definisi : Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.

Klasifikasi Penyajian : -

Ukuran : -

Satuan : -

Nama Variabel	:	Status Kepemilikan Tempat Tinggal
Konsep	:	Status Kepemilikan Tempat Tinggal
Definisi	:	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Kecamatan
Konsep	:	Kecamatan
Definisi	:	Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang di sebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Kabupaten/Kota
Konsep	:	1. Kabupaten 2. Kota
Definisi	:	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Status Hubungan dalam Keluarga
Konsep	:	1. Kabupaten 2. Kota
Definisi	:	Ikatan atau pertalian setiap anggota keluarga dengan kepala keluarga berdasarkan kartu keluarga atau pengakuan dari kepala keluarga.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Status Perkawinan
Konsep	:	Perkawinan
Definisi	:	Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Provinsi
Konsep	:	1. Wilayah 2. Provinsi
Definisi	:	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Konsep	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Definisi	:	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Berdasarkan Rukun Warga
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

Judul Kegiatan	: Kompilasi Data Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan	: Ketenagakerjaan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -
PENYELENGGARA	
Instansi Penyelenggara	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Desa Parahu Kecamatan Sukamulya
Email	: disnaker@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB	
Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Alamat	: Jl. Parahu Rt/rw. 005/001 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang
Email	: disnaker@tangerangkab.go.id

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan : Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah dengan dinamika ekonomi yang tinggi menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa menyebabkan terjadinya pergeseran pola pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Di sisi lain, angka pengangguran, pekerja informal, dan ketidaksesuaian kompetensi (*mismatch*) masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius. Untuk itu, ketersediaan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting agar kebijakan ketenagakerjaan dapat dirumuskan secara efektif.

Kegiatan Kompilasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dilaksanakan untuk menyusun data ketenagakerjaan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kebijakan program di tingkat kabupaten. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki informasi ketenagakerjaan yang mutakhir, konsisten, serta sesuai dengan standar Sistem Statistik Nasional.

Kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai upaya teknis pengumpulan data, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Data ketenagakerjaan yang terhimpun secara akurat dan terintegrasi akan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya

manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan Kegiatan :

1. Mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan yang terstandar, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor ketenagakerjaan.
2. Mendorong keterbukaan dan transparansi data ketenagakerjaan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor ketenagakerjaan yang berbasis pada data.
3. Meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

Jadwal Kegiatan :

1.	Perencanaan Kegiatan	01 November 2024 s.d. 01 Desember 2024
2.	Desain	04 Desember 2024 s.d. 29 Desember 2024
3.	Pengumpulan Data	15 Januari 2025 s.d. 01 Februari 2025
4.	Pengolahan Data	01 Maret 2025 s.d. 29 Maret 2025
5.	Analisis	01 April 2025 s.d. 30 April 2025
6.	Diseminasi Hasil	01 Mei 2025 s.d. 31 Mei 2025
7.	Evaluasi	01 Juni 2025 s.d. 30 Juni 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
- Jumlah Tenaga Kerja
- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan
- Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek
- Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi

- Jumlah pekerja warga negara asing
- Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	- Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	*Mail* Lainnya: Aplikasi D'Naker DIGI
Unit Pengumpulan Data	:	- Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Kunjungan Kembali Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		4 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Tidak
Digital	:	Tidak
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	-
Digital	:	-
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

Nama Variabel	:	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Alias	:	Pencaker
Konsep	:	Pencari Kerja Terdaftar
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kerja
Definisi	:	Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat. Jumlah ini meliputi tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian, tenaga kerja berdasarkan jenis kompetensi profesi.

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Alias	:	-
Konsep	:	Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek
Alias	:	-
Konsep	:	Pekerja Jamsostek
Definisi	:	Banyaknya tenaga kerja yang menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi
Alias	:	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK)
Konsep	:	- Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi - Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
Definisi	:	Banyaknya peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan Sisnaker (memiliki kode transaksi).
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
Alias	:	-
Konsep	:	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Definisi	:	Banyaknya instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan melalui perjanjian bersama
Alias	:	-

Konsep	:	- kasus sengketa pengusaha pekerja - perjanjian bersama
Definisi	:	Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah pekerja warga negara asing
Alias	:	Jumlah pekerja WNA
Konsep	:	- Pekerja - WNA
Definisi	:	Banyaknya pekerja yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI.

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

Nama Indikator	:	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Konsep	:	kasus sengketa pengusaha pekerja
Definisi	:	angka perselisihan hubungan industrial adalah tentang penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial yaitu pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja, berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan pekerja. jumlah kasus yang dimaksud adalah jumlah kasus pertentangan antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha
Interpretasi	:	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak sengketa pengusaha-pekerja
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja/Jumlah Perusahaan dikali 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Konsep	:	pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Definisi	:	Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja. Jumlah pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja
Interpretasi	:	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak sengketa pengusaha-pekerja
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah pekerja/buruh Jamsostek dibagi Jumlah pekerja/buruh dikali 100%
Ukuran	:	P
		ersentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Konsep	:	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Definisi	:	Perselisihan hubungan industrial adalah tentang penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial yaitu pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja, berhubung dengan tidak adanya persesuaian

		paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan pekerja
Interpretasi	:	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dibagi Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemerintah dikali 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Konsep	:	tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Definisi	:	jumlah pendaftar pelatihan program yang cenderung fokus dalam membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam persiapan untuk memulai suatu usaha, dimana dalam program pelatihan ini, menuntun peserta untuk terlibat kedalam praktek.
Interpretasi	:	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten

Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

Nama Variabel	:	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Konsep	:	Pencari Kerja Terdaftar
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja.
Klasifikasi Penyajian	:	- Wilayah - Jenis Kelamin
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Konsep	:	Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Klasifikasi Penyajian	:	- Wilayah - Jenis Kelamin
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kerja

Konsep	:	Tenaga Kerja
Definisi	:	Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat. Jumlah ini meliputi tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian, tenaga kerja berdasarkan jenis kompetensi profesi.
Klasifikasi Penyajian	:	- Wilayah - Jenis Kelamin
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Konsep	:	Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Definisi	:	Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Klasifikasi Penyajian	:	- Wilayah - Jenis Kelamin
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek
Konsep	:	Pekerja Jamsostek
Definisi	:	Banyaknya tenaga kerja yang menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang

bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Klasifikasi Penyajian : - Wilayah

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi

Konsep : - Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
- Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Definisi : Banyaknya peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan Sisnaker (memiliki kode transaksi).

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja

Konsep : Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Definisi : Banyaknya instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Ukuran : Total

Satuan : Unit

MS-KEG PENDATAAN LENGKAP RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	: Pendataan Lengkap Rumah Sewa Milik Masyarakat Di Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Pendataan Lengkap
Sektor Kegiatan	: Sosial & Kesejahteraan Rakyat
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: V-25.3603.007

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Gedung Lingkup Teknis PU, Jl. M. Atik Soeardia, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang
Email	: dinasperkimtgr@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Bidang Perumahan
Alamat	: Gedung Lingkup Teknis PU, Jl. M. Atik Soeardia, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang
Email	: dinasperkimtgr@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan : Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku

kepentingan. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan. Untuk dapat melaksanakan tahapan-tahapan tersebut diperlukan data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pemrograman, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Manajemen data pembangunan perumahan dan permukiman yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektivitas serta efisiensi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu di Kabupaten Tangerang telah memiliki Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2021 tentang pedoman satu data tingkat Kabupaten Tangerang, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah. Sehingga ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan perangkat daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Data rumah sewa milik masyarakat merupakan salah satu item satu data dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. Data ini memiliki peranan penting dalam nenunjang evaluasi dan perencanaan terkait ketersediaan rumah bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Mengingat strategisnya peran data dan informasi mengenai perumahan dan permukiman tersebut dalam mendukung Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041. Maka diperlukan penyediaan basis data ketersediaan rumah sewa milik masyarakat yang layak huni dan terjangkau di Kabupaten Tangerang yang akurat dengan metode sensus, yaitu menyisir wilayah di Kecamatan Kelapa Dua, Pagedangan, dan Cisauk sebagai wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan.

Tujuan Kegiatan : Tersedianya data terkini tentang jumlah Rumah Sewa milik Masyarakat sebagai acuan atau dasar dalam perencanaan Bidang perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

Jadwal Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan 14 April 2025 s.d. 25 April 2025
2. Desain 14 April 2025 s.d. 25 April 2025
3. Pengumpulan Data 28 April 2025s.d. 23 Mei 2025
4. Pengolahan Data 19 Mei 2025 s.d. 23 Mei 2025
5. Analisis 19 Mei 2025 s.d. 23 Mei 2025
6. Diseminasi Hasil 26 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Nama Rumah Sewa - Nomor HP - Alamat Rumah Sewa - Koordinat Lokasi - Jumlah Kamar (Unit) - Jenis Hunian - Peruntukan - Jumlah Penghuni - Tanggal Pendataan - Luas Tanah - Luas Bangunan - Jumlah Lantai - Material Bangunan - Kondisi Bangunan - Harga Sewa

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	- Wawancara
Sarana Pengumpulan Data	:	*Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)*
Unit Pengumpulan Data	:	- Individu - Rumah Tangga

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	Supervisi
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	Tidak
Petugas Pengumpulan Data	:	- Staf instansi penyelenggara - Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA Atau SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		3 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Ya
Penyandian (*Coding*)	:	Ya
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Rumah Sewa
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kecamatan Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	28 Mei 2025
Digital	:	28 Mei 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR PENDATAAN LENGKAP RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Nama Rumah Sewa
Alias	:	-
Konsep	:	Rumah Sewa
Definisi	:	Identitas atau nama unik yang diberikan pada rumah sewa.
Referensi Pemilihan	:	1. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM PUPR;
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nomor HP
Alias	:	Nomor Handphone
Konsep	:	Nomor HP
Definisi	:	Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keperluan pendataan atau komunikasi lanjutan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Alamat Rumah Sewa
Alias	:	-
Konsep	:	Rumah Sewa
Definisi	:	Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keperluan pendataan atau komunikasi lanjutan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi
Akses Publikasi	:	Tertutup

Nama Variabel	:	Koordinat Lokasi
Alias	:	-
Konsep	:	Koordinat Lokasi
Definisi	:	Titik koordinat geografis (latitude & longitude) lokasi rumah sewa.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jenis Hunian
Alias	:	-
Konsep	:	Jenis Hunian

Definisi	:	Bentuk bangunan tempat tinggal sewa: Kontrakan, Indekos, Hotel Melati, Kostel.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*integer*
Klasifikasi Isian	:	Kontrakan, Indekos, Hotel Melati, Kostel
Aturan Validasi	:	Data harus terisi
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kamar
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Kamar
Definisi	:	Total kamar atau unit yang tersedia untuk disewakan dalam satu rumah sewa.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Tanah
Alias	:	-

Konsep	:	Luas Tanah
Definisi	:	Luas total tanah (dalam meter persegi) tempat rumah sewa berdiri.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Kondisi Bangunan
Alias	:	-
Konsep	:	Kondisi Bangunan
Definisi	:	Tingkat kelayakan bangunan: Layak / Tidak Layak huni berdasarkan visual dan fungsi.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Harga Sewa
Alias	:	-
Konsep	:	Harga Sewa
Definisi	:	Biaya sewa yang dikenakan kepada penyewa per bulan atau per tahun, dinyatakan dalam rupiah.
Referensi Pemilihan	:	-

Referensi Waktu	:	28 April 2025 s.d. 23 Mei 2025
Tipe Data	:	*integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Data harus terisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sewa
Alias	:	-
Konsep	:	Rumah Sewa
Definisi	:	Unit hunian yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam komunitas masyarakat yang kemudian disewakan kepada pihak lain, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Rumah ini biasanya bukan bagian dari badan usaha formal seperti pengembang atau badan hukum, melainkan dimiliki secara pribadi dan dikelola secara mandiri oleh pemiliknya.
Referensi Pemilihan	:	1. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM PUPR;
Referensi Waktu	:	Pada saat pemutakhiran (20 s.d. 24 Juni 2025)
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	1. Laki-laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	:	Harus berisi Laki-laki atau Perempuan
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-KEG PENDATAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Pendataan Perumahan Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan	:	Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Perumahan Permukiman Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Gedung Lingkup Pu Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	dinasperkimtgr@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pemakaman
Alamat	:	Gedung Lingkup Pu, Lantai 3, Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	dppp.keuangan@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah yang sangat pesat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, serta ketersediaan lahan untuk pemakaman.

Di sisi lain, permasalahan yang muncul seperti keterbatasan lahan, pertumbuhan kawasan permukiman baru, serta ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan fasilitas perumahan dan pemakaman menuntut adanya data yang terintegrasi sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Pendataan perumahan, permukiman, dan pemakaman di Kabupaten Tangerang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan pendataan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perumahan, permukiman, serta pemakaman. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan perumahan rakyat, pengendalian tata ruang, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, hingga perencanaan ketersediaan lahan pemakaman yang memadai dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendataan perumahan, permukiman, dan pemakaman di Kabupaten Tangerang bukan hanya sekadar inventarisasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, tertata, dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.tujuan

Tujuan Kegiatan :

- Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai kondisi perumahan, permukiman, dan pemakaman di Kabupaten Tangerang.
- Menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang perumahan, permukiman, dan penyediaan lahan pemakaman.

- Mendukung penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, kebutuhan hunian layak, serta pelayanan pemakaman.

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	06 Januari 2025 s.d. 14 Februari 2025
Pengumpulan Data	13 Januari 2025 s.d. 14 Februari 2025
Pengolahan	03 Februari 2025 s.d. 29 April 2025
Analisis	03 Februari 2025 s.d. 29 April 2025
Diseminasi	01 Mei 2025 s.d. 30 Mei 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah tempat pemakaman umum
- Jumlah Rumah Layak Huni
- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
- Jumlah Lingkungan Perumahan
- Jumlah Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
- Luas Kawasan Permukiman Kumuh
- Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (KK)
- Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh
- Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
- Luas Area Permukiman yang Tertata (Ha)
- Jumlah Truk Tinja

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan

Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya: Rumah

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara dan Mitra Atau Tenaga Kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA/SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		7 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		21 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Lainnya: Rumah

Tingkat Penyajian Data : Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak : Tidak

Digital : Ya

Data Mikro : Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak : -

Digital : 30 Mei 2025

Data Mikro : -

MS-VAR PENDATAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel : Jumlah tempat pemakaman umum

Alias : TPU

Konsep : Tempat Pemakaman Umum

Definisi : Banyaknya areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Referensi Pemilihan : PP Nomor 9 Tahun 1987

Referensi Waktu : 2024

Tipe Data : *Integer*

Klasifikasi Isian : Klasifikasi berdasarkan kecamatan

Aturan Validasi : Harus berisi angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Alias	:	-
Konsep	:	Kawasan Permukiman Kumuh
Definisi	:	Luas wilayah Permukiman yg tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi serta sarana prasana yang tidak menuhi syarat
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Float,*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Alias	:	-
Konsep	:	Rumah Layak Huni
Definisi	:	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Alias	:	-

Konsep	:	Rumah Tidak Layak Huni
Definisi	:	rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan
Alias	:	-
Konsep	:	Lingkungan Perumahan
Definisi	:	Lingkungan Perumahan adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuaan permukiman yang di kelola swasta dan sudah serah terimakan ke pemerintah Daerah
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah Kab. Tangerang No 4 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Perumahan, Dan Permukiman.
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Alias	:	-

Konsep	:	Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Definisi	:	Lingkungan Perumahan di dukung PSU adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuaan permukiman yang di kelola swasta dan sudah diserah terimakan PSUnya Kepada Pemerintah Daerah
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah Kab. Tangerang No 4 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Perumahan, Dan Permukiman. Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (KK)
Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (KK)
Definisi	:	Banyaknya Tempat tinggal satu keluarga yang memiliki sarana sanitasi yang baik
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR PENDATAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah tempat pemakaman umum
Konsep	:	Tempat Pemakaman Umum
Definisi	:	jumlah TPU yang menjadi aset pemda
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	TPU

Nama Variabel	:	Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Konsep	:	Kawasan Permukiman Kumuh
Definisi	:	Lingkungan Perumahan yang dilengkapi dengan kelengkapan pisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat aman dan terjangkau
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Luas

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Konsep	:	Rumah Layak Huni
Definisi	:	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rumah

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Konsep	:	Rumah Tidak Layak Huni
Definisi	:	rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rumah

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan
Konsep	:	Lingkungan Perumahan
Definisi	:	Lingkungan Perumahan adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuaan permukiman yang di kelola swasta dan sudah serah terimakan ke pemerintah Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lingkungan Perumahan

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Konsep	:	Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Definisi	:	Lingkungan Perumahan yang dilengkapi dengan kelengkapan pisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat aman dan terjangkau
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lingkungan Perumahan

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PENDIDIKAN

Judul Kegiatan	: Kompilasi Statistik Pendidikan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	: Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	: -

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D. No. 1 Tigaraksa
Email	: perencanaandisdik.kabtangerang@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	: Kepala Sub Bagian Perencanaan
Alamat	: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D. No. 1 Tigaraksa
Email	: perencanaandisdik.kabtangerang@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan : Merupakan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang menyajikan keadaan umum non Pendidikan dan Pendidikan anak usia dini , Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Kesetaraan. Keadaan umum non Pendidikan menyajikan informasi meliputi administrasi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan serta aspek geografi, Demografi, Sosial Budaya, Agama, Insfrastruktur dan ekonomi. Informasi yang dihimpun meliputi data-data sektoral Perangkat Daerah dan Sebagian data-data Statistik Dasar yang bersumber dari

DAPODIK Kementrian Pendidikan. Data tersebut akan dijadikan materi publikasi serta data evaluasi terutama dalam rangka perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Tujuan Kegiatan : Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Buku Profil Pendidikan sehingga dpat diketahui gambaran umum non Pendidikan dan Pendidikan di masing-masing jenjang lingkup dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Non Pendidikan ini meliputi informasi administrasi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan serta aspek geografi, Demografi, Sosial Budaya, Agama, Insfrastruktur dan ekonomi. di Kabupaten Tangerang yang dihimpun dari data data sektoral Perangkat Daerah dan Sebagian data – data Statistik Dasar yang bersumber dari DAPODIK Kementrian Pendidikan.

Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai publikasi yang memberikan kemudahan bagi pengguna data. Selain itu juga digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang

Jadwal Kegiatan :

15. Perencanaan Kegiatan 08 November 2024 s.d. 02 Februari 2024
16. Pengumpulan Data 03 Maret 2024 s.d. 20 Desember 2024
17. Pengolahan Data 01 Maret 2025 s.d. 30 April 2025
18. Analisis 01 April 2024 s.d. 30 April 2025
19. Diseminasi Hasil 01 Mei 2025 s.d. 17 Mei 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah murid menurut kelompok usia dan jenis kelamin di kabupaten Tangerang
- Jumlah Warga Negara Usia 3- 6 Tahun di Kabupaten Tangerang

- Jumlah Siswa Usia Paud Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Sekolah Paud Menurut Kondisi, Status Sekolah,dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Pendidik Paud Menurut Kepemilikan Ijazah Guru, Status Sekolah, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa TK Menurut Status Sekolah, Jenis Kelamin, Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Sekolah TK dan Ruang Kelas Sekolah TK Menurut Kondisi, Status Sekolah Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah TK Menurut Kepemilikan Sertifikat, Status Sekolah, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Sekolah SD dan Ruang Kelas SD Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Pendidik SD Berdasarkan Status Tenaga Pendidik, Status Sekolah, Kepemilikan Ijazah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Kelulusan Tingkat SD menurut Status Sekolah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

- Jumlah SMP dan Ruang Kelas SMP Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SD Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa Baru SMP Menurut Status Sekolah dan Kecamatan

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan		
Nama Provinsi	:	Banten
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Kompromin
Unit Pengumpulan Data	:	-

PENGUMPULAN DATA

Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*) ?	:	-
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	:	-
Melakukan Penyesuaian Nonrespon ?	:	-
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan (*Editing*)	:	Tidak
Penyandian (*Coding*)	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Penyahihan (Validasi)	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2025

Digital	:	31 Mei 2025
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK PERTANIAN

Nama Variabel	:	Jumlah Murid Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.2
Konsep	:	Murid, Kelompok Usia, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan dengan peserta didik berusia 3 sampai dengan 18 tahun
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Warga Negara Usia 3- 6 Tahun di Kabupaten Tangerang yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
Alias	:	Tabel 3.8.3
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Definisi	:	Jumlah anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa Usia Paud Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.4
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Definisi	:	Jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan yang diluar usia 4-6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah Paud Menurut Kondisi, Status Sekolah,dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.5
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah jenjang PAUD yang memiliki kondisi bangunan baik dan rusak yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Paud Menurut Kepemilikan Ijazah Guru, Status Sekolah, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.6
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah, Guru
Definisi	:	Pendidik profesional yang berstatus PNS dan Non PNS pada pendidikan jenjang PAUD dengan tingkat pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan yang belum memiliki ijazah S1
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa TK Menurut Status Sekolah, Jenis Kelamin, Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.7
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah Siswa TK Menurut status sekolah dan jenis kelamin dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah TK dan Ruang Kelas Sekolah TK Menurut Kondisi, Status Sekolah Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.8
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah sekolah TK Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah TK Menurut Kepemilikan Sertifikat, Status Sekolah, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.9
Konsep	:	Guru, Taman Kanak-Kanak, Sertifikat
Definisi	:	Jumlah Guru TK Menurut kepemilikan sertifikat, status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah SD dan Ruang Kelas SD Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.10
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah SD Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.11
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berusia 7 sampai dengan 12 tahun dan di luar usia 7-12 tahun dan menurut status sekolah dan jenis kelamin

Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik SD Berdasarkan Status Tenaga Pendidik, Status Sekolah, Kepemilikan Ijazah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.12
Konsep	:	Guru, Sekolah Dasar, Status sekolah, Ijazah
Definisi	:	Pendidik profesional yang berstatus PNS dan non PNS pada pendidikan jenjang SD yang memiliki ijazah pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan belum memiliki ijazah pendidikan S1 Menurut status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kelulusan Tingkat SD menurut Status Sekolah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.13
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah

Definisi	:	Data jumlah siswa lulus sekolah dasar (SD) dan tidak lulus SD berdasarkan status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah SMP dan Ruang Kelas SMP Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.14
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah jenjang SMP dan ruang kelas SMP yang memiliki kondisi bangunan baik dan bangunan rusak dengan tingkat kerusakan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dilihat status sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.15

Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah Pertama dengan peserta didik berusia 13 sampai dengan 15 tahun dan di luar usia 13 -15 tahun menurut status sekolah dan jenis kelamin
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.16
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan Tingkat kelas menurut status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Alias	:	Tabel 3.8.17
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan Tingkat kelas menurut status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.18 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan status kelulusan dan status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Alias	:	Tabel 3.8.19
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah Pertama dengan peserta didik berdasarkan status kelulusan dan status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2024
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa Baru SMP Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.20 kol (3) – kol (7)
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Peserta Didik Baru Jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas 7 yang dilihat berdasarkan Status Sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah Kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI STATISTIK PERTANIAN

Nama Variabel	:	Jumlah Murid Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Murid, Kelompok Usia, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan dengan peserta didik berusia 3 sampai dengan 18 tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan kelompok usia : - 3 – 6 Tahun - 7 – 12 Tahun - 13 – 15 Tahun - 16 – 18 Tahun
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Warga Negara Usia 3- 6 Tahun di Kabupaten Tangerang yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Definisi	:	Jumlah anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Usia - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Tahun - 6 Tahun Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Siswa Usia Paud Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pendidikan Anak Usia Dini

Definisi : Jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan yang diluar usia 4-6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Usia
- 4 – 6 Tahun
- Di luar 4 – 6 Tahun

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Sekolah Paud Menurut Kondisi, Status Sekolah,dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah

Definisi : Jumlah sekolah jenjang PAUD yang memiliki kondisi bangunan baik dan rusak yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Kondisi sekolah :

- Bangunan baik
- Bangunan rusak

Ukuran : Jumlah

Satuan : Bangunan

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Pendidik Paud Menurut Kepemilikan Ijazah Guru, Status Sekolah, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah, Guru

Definisi : Pendidik profesional yang berstatus PNS dan Non PNS pada pendidikan jenjang PAUD dengan tingkat pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan yang belum memiliki ijazah S1

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Guru :
- PNS
- Non PNS

Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan ijazah guru :
- Pendidikan S1/D-IV/S2/S3
- Belum memiliki ijazah S1

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Siswa TK Menurut Status Sekolah, Jenis Kelamin, Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin

Definisi : Jumlah Siswa TK Menurut status sekolah dan jenis kelamin dalam suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah TK dan Ruang Kelas Sekolah TK Menurut Kondisi, Status Sekolah Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah sekolah TK Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit Kelas

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah TK Menurut Kepemilikan Sertifikat, Status Sekolah, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Guru, Taman Kanak-Kanak, Sertifikat
Definisi	:	Jumlah Guru TK Menurut kepemilikan sertifikat, status sekolah dalam suatu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan sertifikat : - Bersertifikat - Tidak memiliki sertifikat
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah SD dan Ruang Kelas SD Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah SD Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Kondisi sekolah : - Bangunan baik - Bangunan rusak
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit Kelas

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik SD Berdasarkan Status Tenaga Pendidik, Status Sekolah, Kepemilikan Ijazah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Guru, Sekolah Dasar, Status sekolah, Ijazah
Definisi	:	Pendidik profesional yang berstatus PNS dan non PNS pada pendidikan jenjang SD yang memiliki ijazah pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan belum memiliki ijazah pendidikan S1 Menurut status sekolah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Status Guru : - PNS - Non PNS Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan Ijazah : - Pendidikan SI/DIV/S2/S3 - Belum Memiliki Ijazah S1
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah SMP dan Ruang Kelas SMP Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah jenjang SMP dan ruang kelas SMP yang memiliki kondisi bangunan baik dan bangunan rusak dengan tingkat kerusakan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dilihat status sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Kondisi sekolah : - Bangunan baik - Bangunan rusak
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Bangunan